



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL
PENGELOLAAN KELAUTAN DAN RUANG LAUT
LOKA KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN NASIONAL
PEKANBARU

JALAN BUDI LUHUR KELURAHAN MENTANGOR PEKANBARU-RIAU 28286

TELEPON/FAKSIMILE (0761) 8404510

LAMAM www.kkp.go.id SUREL kkpn.pekanbaru@kkp.go.id

Nomor : B.311/LKKPN/TU.140/II/2024 12 Februari 2024
Sifat : Biasa
Lampiran : Satu Berkas
Hal : Penyampaian Laporan Kinerja Tahun 2023 hasil reviu

Yth. Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut
di Jakarta

Sehubungan dengan surat Direktur Jenderal PKRL Nomor B.958/DJPKRL.1/HP.330/II/2024 tanggal 12 Februari 2024 hal hasil reviu Laporan Kinerja (LKj) tahun 2023 level II lingkup DJPKRL, bersama ini dengan hormat kami sampaikan Laporan Kinerja LKKPN Pekanbaru Tahun 2023 sebagaimana terlampir.

Demikian kami sampaikan. Atas perhatian dan arahan lebih lanjut dari Bapak kami ucapkan terima kasih.

Kepala Loka Kawasan Konservasi
Perairan Nasional Pekanbaru,



Ditandatangani
Secara Elektronik

Rahmat Irfansyah

Tembusan :

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut
2. Ketua Tim Kerja Program Setditjen PKRL



LAPORAN KINERJA TAHUN 2023



**LOKA KAWASAN
KONSERVASI
PERAIRAN NASIONAL
PEKANBARU**

**DIREKTORAT JENDERAL
PENGELOLAAN KELAUTAN
DAN RUANG LAUT**



TIM PENYUSUN

Pengarah :

Rahmat Irfansyah

Muhammad Lukman Faishol

Penyusun :

Muhamad Faisal Siddiq

Kontributor :

Hanna Maryam Meilasari

Pejabat Fungsional Tertentu LKKPN Pekanbaru

Penanggungjawab Kegiatan Teknis Pengelolaan Kawasan

Tim Pengelola Kinerja Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut

KATA PENGANTAR



Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat, taufik dan hidayah-Nya hingga Laporan Kinerja (LKJ) LKKPN Pekanbaru Tahun 2023 ini dapat diselesaikan.

Laporan ini disusun dalam rangka memberikan informasi tentang capaian kinerja LKKPN Pekanbaru tahun 2023 melalui pelaksanaan program dan kegiatan serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi.

Harapan kami kiranya LKJ ini dapat dijadikan bahan evaluasi dan *feed back* terhadap penyelenggaraan program Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan Nasional, sekaligus sebagai bahan masukan bagi penyusunan LKJ di tingkat Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut (PKRL).

Disadari bahwa laporan ini masih banyak kekurangannya, maka saran yang bersifat membangun sangat diharapkan. Akhirnya atas perhatian dan bantuan semua pihak terhadap terselenggaranya program dan kegiatan LKKPN Pekanbaru diucapkan terima kasih.

Pekanbaru, 19 Januari 2024

Kepala Loka Kawasan Konservasi
Perairan Nasional Pekanbaru,



Dr. Rahmat Irfansyah, S.P, M.Si

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Loka Kawasan Konservasi Perairan Nasional Pekanbaru Triwulan IV/Tahunan 2023 merupakan bentuk pertanggungjawaban dari pelaksanaan rencana strategis LKKPN Pekanbaru dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Pengukuran capaian kinerja LKKPN dilakukan dengan cara membandingkan antara target (rencana) dan realisasi indikator kinerja pada masing-masing perspektif. Pencatatan dan pengukuran kinerja dilakukan dengan bantuan perangkat lunak berbasis *balanced scorecard* dari Kementerian Kelautan Perikanan, yaitu pada Sistem Aplikasi Pengelolaan Kinerja (SAPK) <http://www.kinerjaku.kkp.go.id>. Kinerja LKKPN terdiri atas **6 (enam) Indikator Kinerja Utama (IKU) dan 10 (sepuluh) Indikator Kinerja Manajerial (IKM)**, total 16 indikator. Berdasarkan SAPK, **Nilai Pencapaian Sasaran Strategis / NPSS** atau **Nilai Capaian Kinerja** LKKPN Pekanbaru Triwulan IV/Tahunan 2023 adalah **113,67 (istimewa)** untuk IKU dan IKM.

Adapun **capaian IKU dan IKM yang di laporkan di Triwulan IV 2023** adalah **IKU 1** (target 3 dokumen perizinan Pemanfaatan Ruang Laut tercapai 3 dokumen), **IKU 2** (target rata-rata kenaikan EVIKA 5% tercapai 6,615%), **IKU 3** (target 1 jejaring tercapai 1 jejaring), **IKU 4** (target 1 kemitraan tercapai 2 kemitraan), **IKU 5** (target 2 KOMPAK tercapai 3 Kelompok KOMPAK), **IKU 6** (target Nilai PNBP 13,587 juta tercapai 51,958 juta), **IKU 7** (target IKPA 93,75 tercapai 97,14), **IKU 8** (target NKA 82 tercapai 88,46), **IKU 9** (target WBK 75 tercapai 92,49), **IKU 10** (target IP-ASN 84 tercapai 90,10), **IKU 11** (target Nilai PM SAKIP 75 tercapai 84,15), **IKM 12** (target 4 dokumen SPIP tercapai 4 dokumen), **IKM 13** (target 92% presentase manajemen pengetahuan terstandar tercapai 133,3% presentase MP), **IKM 14** (target 75% rekomendasi hasil pengawasan tercapai 100% persentase tindak lanjut temuan), **IKU 15** (target Penyelesaian Temuan target 100% tercapai 100%), dan **IKU 16** (target Efektivitas Bantuan Pemerintah target 77,5 tercapai 92,5).

Pada penetapan anggaran 2023 terdapat anggaran **Rp13.571.313.000** dan pada Triwulan IV terdapat penambahan anggaran bersumber **PNBP sebanyak Rp774.780.000** sehingga **total pagu LKKPN Pekanbaru Rp14.346.093.000**. Namun, masih terdapat anggaran yang **diblokir** akibat kebijakan **Automatic Adjustment (AA)** dengan total sebesar **Rp1.543.760.000**. Sehingga, Total Pagu yang dapat dilaksanakan sampai dengan Triwulan IV sebesar **Rp12.802.333.000** dan **Realisasi sampai dengan Triwulan IV/Tahunan 2023 adalah Rp. 12.526.034.773**. Presentase realisasi dari pagu yang bisa digunakan adalah **97,84%**.

Berdasarkan capaian kinerja dan anggaran LKKPN Pekanbaru yang sudah tercapai tersebut terdapat beberapa tantangan yang harus dipenuhi di laporan kinerja selanjutnya seputar: (1) Peningkatan kepatuhan atas time schedule kegiatan yang telah disusun agar pelaksanaan kegiatan lebih mencapai target yang telah ditetapkan; (2) Upaya peningkatan penerimaan PNBP dan inventarisasi kegiatan penggunaan PNBP serta percepatan pelaksanaannya.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
RINGKASAN EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI.....	iii
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
1.1. Penjelasan Umum	1
1.2. Tugas dan Fungsi	2
1.3. Permasalahan Utama.....	2
1.4. Sistematika Laporan Kinerja.....	3
BAB II . PERENCANAAN KINERJA	4
2.1. Rencana Strategis 2020-2024	4
2.1.1. Visi dan Misi.....	4
2.1.2. Tujuan	4
2.1.3. Sasaran Strategis	5
2.1.4. Arahan Kebijakan dan Strategi	6
2.2. Perjanjian Kinerja	12
2.2.1. Indikator Kinerja	12
2.2.2. Anggaran	15
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA	17
3.1. Capaian Kinerja Triwulan I.....	17
3.2. Capaian Kinerja Sasaran Kegiatan 1.....	19
3.2.1. IKU 1. Dokumen Operasionalisasi Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut yang disusun di wilayah kerja LKKPN Pekanbaru (Dokumen)	19
3.3. Capaian Kinerja Sasaran Kegiatan 2.....	22
3.3.1. IKU 2. Persentase Peningkatan Nilai Efektivitas Kawasan Konservasi Nasional Wilayah Kerja LKKPN Pekanbaru (%)	22
3.4. Capaian Kinerja Sasaran Kegiatan 3.....	31

3.4.1. IKU 3. Jejaring Konservasi yang Diinisiasi di Wilayah Kerja LKKPN Pekanbaru (Dokumen).....	31
3.4.1. IKU 4. Kemitraan Konservasi yang Diinisiasi dan/atau Dievaluasi di Wilayah Kerja LKKPN Pekanbaru (Dokumen).....	33
3.5. Capaian Kinerja Sasaran Kegiatan 5.....	37
3.5.1. IKU 5. Bantuan pemerintah untuk kelompok masyarakat penggerak konservasi (KOMPAK) di wilayah kerja LKKPN Pekanbaru (Kelompok)37	
3.6. Capaian Kinerja Sasaran Kegiatan 5.....	40
3.6.1. IKU 6. Nilai PNBP LKKPN Pekanbaru (Rp.)	40
3.7. Capaian Kinerja Sasaran Kegiatan 6.....	44
3.7.1. IKU 7. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup LKKPN Pekanbaru (Nilai)	44
3.7.2. IKU 8. Nilai Kinerja Anggaran lingkup LKKPN Pekanbaru (Nilai)	47
3.7.3. IKU 9. Nilai unit kerja berpredikat menuju WBK di wilayah kerja LKKPN Pekanbaru (Nilai)	49
3.7.4. IKU 10. Indeks Profesionalitas ASN lingkup LKKPN Pekanbaru (Indeks)51	
3.7.5. IKU 11. Nilai PM SAKIP Lingkup LKKPN Pekanbaru (Nilai)	54
3.7.6. IKU 12. Laporan SPIP yang disusun Lingkup LKKPN Pekanbaru (Dokumen) 58	
3.7.7. IKU 13. Persentase unit kerja LKKPN Pekanbaru yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar (%).....	60
3.7.8. IKU 14. Presentase Rekomendasi hasil pengawasan lingkup LKKPN Pekanbaru yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan (%)	62
3.7.9. IKU 15. Persentase Penyelesaian Temuan lingkup LKKPN Pekanbaru 64	
3.7.10. IKU 16. Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan Bantuan Pemerintah Lingkup LKKPN Pekanbaru (%).....	66
3.8. Realisasi Anggaran	69
BAB IV. PENUTUP	72
4.1. Kesimpulan	72
4.2. Tindak Lanjut	73
4.3. Rekomendasi	73

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Penjelasan Umum

Loka Kawasan Konservasi Perairan Nasional (LKKPN) Pekanbaru merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) unit eselon I Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Kementerian Kelautan dan Perikanan. LKKPN Pekanbaru memiliki tugas utama untuk melakukan pengelolaan terhadap Kawasan konservasi perairan di wilayah bagian barat Indonesia yang telah ditetapkan oleh pemerintah. sampai dengan tahun 2023 terdapat 2 (dua) Kawasan Konservasi Perairan Nasional (KKPN) yang pengelolaannya berada di bawah Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui LKKPN Pekanbaru sebagai pelaksananya dengan total luas kawasan 1.305.321,5 Ha, terdiri dari Kawasan Konservasi Kepulauan Anambas dan Laut Sekitarnya (KK Kep. Anambas) di Kabupaten Kepulauan Anambas, Provinsi Kepulauan Riau seluas 1.265.401,5 Ha, dan Kawasan Konservasi Pulau Pieh dan Laut di Sekitarnya (KK Pulau Pieh) yang wilayahnya membentang berada di 3 (tiga) kabupaten/kota (Kota Padang, Kota Pariaman, dan Kabupaten Padang Pariaman) dengan luas 39.920 Ha.

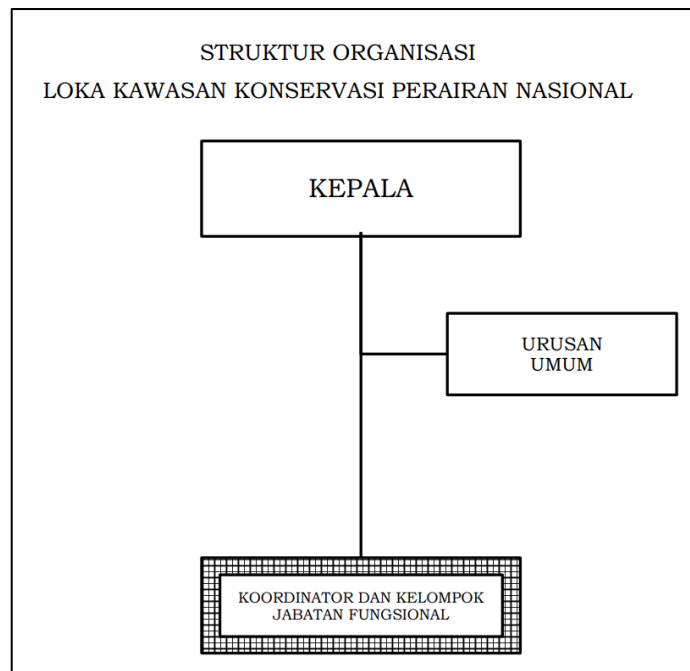
Kawasan konservasi mempunyai peranan penting dalam menjaga kelestarian sumberdaya ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPP NRI) serta menunjang program pariwisata bahari nasional. Pengelolaan kawasan konservasi perairan memiliki peran penting dalam memberikan manfaat bagi kelestarian kawasan perairan, juga bagi kehidupan sosial-ekonomi masyarakat sekitar.

Kawasan konservasi saat ini telah menjadi tuntutan dan kebutuhan yang harus dipenuhi sebagai bagian dari upaya harmonisasi antara pemenuhan kebutuhan ekonomi masyarakat dan keinginan melestarikan sumberdaya yang ada bagi masa depan. Upaya pengelolaan kawasan konservasi dilakukan melalui operasionalisasi dan pemanfaatan Kawasan konservasi.

Prinsip pelaksanaan kegiatan pemanfaatan Kawasan Konservasi adalah tidak terganggunya fungsi utama kawasan konservasi sebagai perlindungan; pelaksanaan pemanfaatan sesuai dengan zonasi kawasan konservasi, daya dukung dan daya tampungnya, dan pelibatan masyarakat sekitar termasuk memastikan akses masyarakat dalam pemanfaatan kawasan konservasi.

LKKPN Pekanbaru dipimpin oleh seorang kepala dengan tingkat eselon IV dan dibantu oleh seorang kepala urusan umum, dan koordinator dan kelompok jabatan fungsional. Urusan umum mempunyai tugas melakukan penyusunan, pemantauan, dan evaluasi rencana, program, dan anggaran, pelaporan, urusan keuangan, hubungan masyarakat, organisasi dan tata laksana, kepegawaian, persuratan, kearsipan, dokumentasi, dan rumah tangga, serta pengelolaan barang milik negara dan perlengkapan. Sementara, kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan LKKPN mempunyai tugas pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Ruang Laut sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilannya seperti melaksanakan pemangkuhan dan pemanfaatan kawasan konservasi yang bertujuan untuk melestarikan sumberdaya

ikan dan lingkungannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



Gambar 1. Struktur Organisasi LKKPN Pekanbaru

1.2. Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 37 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 65/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Ruang Laut. Kawasan Konservasi Perairan Nasional mempunyai tugas melaksanakan pemangkuhan dan pemanfaatan Kawasan konservasi perairan nasional yang bertujuan untuk melestarikan sumber daya ikan dan lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut di atas, LKKPN Pekanbaru menyelenggarakan fungsi:

- penyusunan, pemantauan, dan evaluasi rencana, program, dan anggaran, serta pelaporan;
- pelaksanaan perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan ekosistem, habitat sumber daya ikan, dan/atau situs budaya tradisional;
- pelaksanaan jejaring dan kemitraan di bidang konservasi sumber daya ikan;
- pengelolaan sistem, data, dan informasi; dan
- pelaksanaan urusan ketatausahaan.

1.3. Permasalahan Utama

Melihat capaian pengelolaan serta kondisi saat ini, isu dan permasalahan strategis yang menjadi tantangan untuk mewujudkan pengelolaan kawasan konservasi perairan yang efektif antara lain:

- a. Kesadaran dan dukungan publik yang perlu diberikan
- b. Pemulihan sumberdaya dan lingkungan yang perlu dijaga
- c. Iklim, animo dan lingkungan kepariwisataan yang kualitasnya perlu dikelola dan terorganisir dengan baik
- d. Penerapan usaha perikanan ramah lingkungan dan berbasis zona yang perlu ditingkatkan
- e. Antusiasme dan penerapan kearifan lokal yang kualitasnya perlu dikelola dengan baik sehingga efeknya bagi kawasan lebih signifikan
- f. Keterlibatan dan peran mitra yang perlu terfasilitasi dan terpola dengan baik dan efektif
- g. Pengelolaan kawasan yang perlu terinformasikan dengan baik, rutin dan menyeluruh

1.4. Sistematika Laporan Kinerja

Laporan kinerja Triwulan tahun 2023 ini disusun dengan sistematika penyajian laporan sebagai berikut:

- a. Kata Pengantar, Daftar Isi, Daftar Tabel, Daftar Gambar dan Daftar Lampiran
- b. Bab I Pendahuluan, pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issue*) yang sedang dihadapi oleh organisasi.
- c. Bab II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja, pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja.
- d. Bab III Capaian Kinerja dan Anggaran, pada bab ini berisi pencapaian kinerja dan anggaran sesuai sasaran kegiatan LKKPN Pekanbaru.
- e. Bab IV Penutup, pada bab ini disajikan kesimpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

BAB II . PERENCANAAN KINERJA

2.1. Rencana Strategis 2020-2024

2.1.1. Visi dan Misi

Visi KKP tahun 2020-2024 adalah "Terwujudnya Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang Sejahtera dan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan untuk mewujudkan Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong". Dalam rangka mendukung visi KKP, maka Visi Ditjen PRL 2020-2024 adalah "Pengelolaan Ruang Laut Yang Mensejahterakan dan Berkelanjutan Menuju Terwujudnya Visi KKP".

Untuk mencapai visi Ditjen PRL 2020-2024, maka Loka Kawasan Konservasi Perairan Nasional (LKKPN) Pekanbaru mengusung visi yang *inline* dengan visi Ditjen PRL. **Visi LKKPN Pekanbaru adalah “Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan Nasional di Bawah Kewenangan LKKPN Pekanbaru Yang Mensejahterakan dan Berkelanjutan Menuju Terwujudnya Visi DJPRL”.**

Ditjen PRL mempunyai 3 (tiga) misi untuk mendukung misi KKP yaitu:

1. peningkatan kontribusi ekonomi sub sektor kelautan, pesisir dan pulau pulau kecil;
2. peningkatan kelestarian sumber daya kelautan, pesisir dan pulau pulau kecil; dan
3. peningkatan tata kelola pemerintahan di lingkungan Ditjen PRL.

Misi LKKPN Pekanbaru untuk mewujudkan misi Ditjen PRL adalah sebagai berikut:

1. **peningkatan kontribusi ekonomi dari pengelolaan Kawasan konservasi perairan nasional yang menjadi kewenangan LKKPN Pekanbaru;**
2. **peningkatan kelestarian sumber daya dalam Kawasan konservasi perairan nasional; dan**
3. **peningkatan tata kelola pemerintahan di lingkungan LKKPN Pekanbaru.**

2.1.2. Tujuan

LKKPN Pekanbaru merumuskan tujuan pengelolaan Kawasan konservasi perairan nasional 2020-2024 sebagai berikut:

1. Misi peningkatan kontribusi ekonomi dari pengelolaan Kawasan konservasi perairan nasional yang menjadi kewenangan LKKPN Pekanbaru dengan tujuan sebagai berikut;
 - a. meningkatnya tata kelola ruang laut dalam Kawasan konservasi perairan nasional.

Tujuan ini dapat dicapai dengan tersusunnya review zonasi dan rencana pengelolaan Kawasan konservasi perairan nasional di dua Kawasan yaitu; KK Pieh dan KK Kep. Anambas

- b. Meningkatnya pemanfaatan Kawasan konservasi perairan nasional yang menjadi kewenangan LKKPN Pekanbaru.
Tujuan ini dapat dicapai dengan peningkatan kontribusi pungutan PNBP melalui:
- Karcis masuk Kawasan konservasi untuk kegiatan pariwisata alam perairan.
 - Tanda masuk Kawasan konservasi untuk kegiatan Pendidikan.
 - Tanda masuk Kawasan konservasi untuk kegiatan penelitian.
- c. Meningkatnya pengendalian pemanfaatan Kawasan konservasi perairan nasional yang menjadi kewenangan LKKPN Pekanbaru.
Tujuan ini dapat dicapai dengan penatakelolaan pemanfaatan Kawasan konservasi melalui:
- Pemberian tanda daftar kegiatan penangkapan ikan kecil dalam Kawasan konservasi perairan nasional
 - Pemberian tanda daftar kegiatan pembudidaya ikan kecil dalam Kawasan konservasi perairan nasional.
 - Penataan izin lokasi dan rekomendasi pemanfaatan Kawasan konservasi perairan nasional.
- d. Meningkatnya dayaguna Kawasan konservasi perairan nasional.
Tujuan ini dapat dicapai dengan terbangunnya sarana dan prasaran pengelolaan Kawasan Konservasi perairan nasional di dua lokasi (KK Pieh dan KK Anambas).
2. Misi peningkatan kelestarian sumber daya dalam Kawasan konservasi perairan nasional dengan tujuan meningkatnya pengelolaan kawasan konservasi dan keanekaragaman hayati perairan.
Tujuan ini dapat dicapai dengan meningkatnya efektivitas pengelolaan Kawasan konservasi perairan nasional di dua lokasi (KK Pieh dan KK Anambas).
3. Misi peningkatan tata kelola pemerintahan di lingkungan LKKPN Pekanbaru dengan tujuan meningkatnya Kinerja Reformasi Birokrasi LKKPN Pekanbaru.

Tujuan ini dapat dicapai dengan peningkatan Nilai PMPRB LKKPN Pekanbaru, dari 30 (tiga puluh) pada tahun 2020 menjadi 34 (tiga puluh empat) pada tahun 2024.

2.1.3. Sasaran Strategis

Sasaran pengelolaan Kawasan konservasi perairan nasional di bawah kewenangan LKKPN Pekanbaru merupakan kondisi yang diinginkan dan dicapai oleh LKKPN Pekanbaru sebagai suatu hasil atau dampak dari beberapa program yang dilaksanakan dari pelaksanaan program pengelolaan ruang laut dan program dukungan manajemen. Sasaran Strategis dalam Renstra LKKPN Pekanbaru Tahun 2020-2024 dijabarkan sebagai berikut:

1. Program Pengelolaan Ruang Laut / Program Kualitas Lingkungan Hidup

- a. Sasaran Strategis 1: “Meningkatnya pengelolaan Kawasan konservasi yang berkelanjutan di Wilayah Kerja LKKPN Pekanbaru” dengan indikator kinerja:
Persentase peningkatan nilai efektivitas Kawasan Konservasi Perairan Nasional Wilayah Kerja LKKPN Pekanbaru sebanyak 5 % tiap tahun sampai 2024.
- b. Sasaran Strategis 2: “Meningkatnya jejaring, kemitraan /kerjasama dan konvensi konservasi keanekaragaman hayati laut di wilayah kerja LKKPN Pekanbaru” dengan indikator kinerja: Kelompok Masyarakat yang menerima bantuan konservasi di wilayah kerja LKKPN Pekanbaru sebanyak 4 kelompok tiap tahun sampai 2024 dan Kesepakatan jejaring, kemitraan/kerjasama dan konvensi dalam mendukung konservasi keanekaragaman hayati laut di wilayah kerja LKKPN Pekanbaru sebanyak 2 kesepakatan.

2. Program Dukungan Manajemen

Sasaran Strategis 3: “Tatakelola pemerintahan yang baik lingkup LKKPN Pekanbaru” dengan indikator kinerja : Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan Bantuan Pemerintah LKKPN Pekanbaru sebanyak 72,5%, Indeks professional ASN LKKPN Pekanbaru sebanyak 73 indeks, Nilai WBK LKKPN Pekanbaru 75 poin, Nilai Rekonsiliasi Kinerja LKKPN Pekanbaru 91, Persentase unit kerja yang menerapkan system manajemen pengetahuan yang terstandar LKKPN Pekanbaru 84, Rekomendasi hasil pengawasan lingkup LKKPN Pekanbaru yang dokumen tindaklanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan sebanyak 65%, Nilai IKPA LKKPN Pekanbaru 65%, Nilai Kinerja Anggaran LKKPN Pekanbaru 86, Persentase penyelesaian temuan LHP BPK LKKPN Pekanbaru 100%.

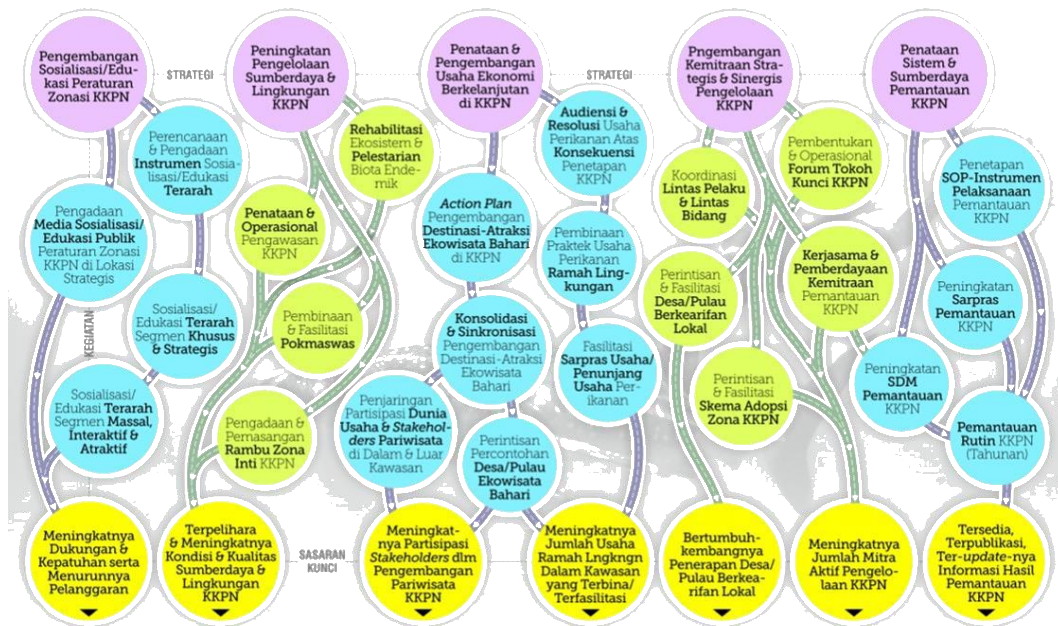
2.1.4. Arahan Kebijakan dan Strategi

Arahan kebijakan Ditjen PRL Tahun 2020-2024 sebagai berikut:

1. Perencanaan ruang laut, pesisir dan pulau-pulau kecil yang partisipatif, serasi dan implementatif;
2. pengelolaan konservasi kawasan dan keanekaragaman hayati perairan yang lestari dan berkelanjutan;
3. Pendayagunaan pesisir dan pulau-pulau kecil yang lestari dan mandiri;
4. pencegahan dan pemulihan kerusakan pesisir dan pulau-pulau kecil;
5. penataan dan Pemanfaatan Jasa Kelautan dalam rangka optimalisasi potensi ekonomi kelautan;
6. pengelolaan perizinan sumberdaya pesisir dan laut yang efektif;
7. peningkatan kemandirian Sentra Kelautan Perikanan Terpadu (SKPT); dan
8. tata kelola pemerintahan yang baik di Lingkungan Ditjen PRL.

Kemudian Arahan Kebijakan LKKPN Pekanbaru Tahun 2020-2024 dalam melakukan pengelolaan Kawasan konservasi perairan nasional di dua Kawasan yang *inline* dengan arah kebijakan Ditjen PRL 2020-2024 di atas adalah sebagai berikut:

1. Pengelolaan kawasan konservasi perairan nasional yang menjadi kewenangan LKKPN Pekanbaru yang lestari dan berkelanjutan;
2. Tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan LKKPN Pekanbaru.



Gambar 2. Strategi pencapaian sasaran

Sesuai dengan arah kebijakan dan strategi nasional, kelautan dan perikanan serta strategi Ditjen PRL di atas, maka dengan mengacu kepada tugas, fungsi dan wewenang LKKPN Pekanbaru sesuai peraturan perundang-undangan, maka strategi pelaksanaan yang akan ditempuh untuk masing-masing arah kebijakan LKKPN Pekanbaru Tahun 2020-2024 di atas adalah sebagai berikut:

1. Pengelolaan kawasan konservasi perairan nasional yang menjadi kewenangan LKKPN Pekanbaru yang lestari dan berkelanjutan;
 - a) Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan Pulau Pieh dan Kep. Anambas

Kawasan konservasi saat ini telah menjadi tuntutan dan kebutuhan yang harus dipenuhi sebagai bagian dari upaya harmonisasi antara pemenuhan kebutuhan ekonomi masyarakat dan keinginan melestarikan sumberdaya yang ada bagi masa depan. Upaya pengelolaan kawasan konservasi dilakukan melalui operasionalisasi dan pemanfaatan kawasan konservasi.

1) Operasionalisasi Kawasan

Dalam mencapai target kawasan konservasi yang operasional, strategi yang akan dilakukan oleh LKKPN Pekanbaru dalam lima tahun ke depan, antara lain:

- Penyediaan sarana dan prasarana kawasan konservasi perairan, pesisir dan pulau-pulau kecil

- Peningkatan Kompetensi Sumberdaya Manusia Pengelola kawasan konservasi perairan, pesisir dan pulau-pulau kecil
- Penyediaan data series kawasan konservasi perairan, pesisir dan pulau-pulau kecil
- Monitoring implementasi zonasi kawasan konservasi perairan, pesisir dan pulau-pulau kecil
- Mitigasi ancaman sumberdaya kawasan konservasi perairan, pesisir dan pulau-pulau kecil
- Peningkatan peran serta masyarakat kawasan konservasi perairan, pesisir dan pulau-pulau kecil

2) Pemanfaatan kawasan konservasi

Prinsip pelaksanaan kegiatan pemanfaatan adalah tidak terganggunya fungsi utama kawasan konservasi sebagai perlindungan, pelaksanaan pemanfaatan sesuai dengan zonasi kawasan konservasi, daya dukung dan daya tampungnya, dan pelibatan masyarakat sekitar termasuk memastikan akses masyarakat dalam pemanfaatan kawasan konservasi. Setiap kegiatan pemanfaatan kawasan konservasi wajib memiliki izin pemanfaatan kawasan konservasi. Perizinan tersebut merupakan salah satu upaya pengendalian pemanfaatan kawasan konservasi dapat memberikan manfaat bagi ekosistem dan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

Upaya pengendalian pemanfaatan kawasan konservasi di KK Pulau Pieh dan KK Kep. Anambas tahun 2020-2024 yang dilakukan oleh LKKPN Pekanbaru melalui berbagai kegiatan antara lain:

- Penyusunan daya dukung dan daya tampung kegiatan pemanfaatan dalam kawasan konservasi
 - Fasilitasi izin akses masyarakat (nelayan kecil, pembudidaya ikan kecil, masyarakat lokal/ adat/ tradisional) dalam pemanfaatan kawasan konservasi, seperti pendataan, fasilitasi perizinan, sosialisasi, dan dukungan pengembangan ekonomi masyarakat (pembinaan, pelatihan/ bimbingan teknis, bantuan konservasi)
 - Pelayanan perizinan pemanfaatan kawasan konservasi
 - Peningkatan peran masyarakat dalam pemanfaatan kawasan konservasi.
- b) Penguatan Jejaring, Kemitraan/Kerjasama, dan Konvensi Konservasi Keanekaragaman Hayati Perairan

Salah satu tantangan dalam mencapai efektivitas pengelolaan kawasan konservasi perairan dan konservasi jenis ikan yang dilindungi dan terancam punah adalah ketersediaan sumberdaya baik dalam bentuk pendanaan, sumberdaya manusia, maupun sarana dan prasarana untuk mendukung tercapainya tujuan efektivitas pengelolaan tersebut. Kondisi tersebut pada akhirnya melahirkan gagasan untuk membangun dan mengembangkan kerjasama dan kemitraan antara pemerintah dengan pihak-pihak

non-pemerintah dalam pengelolaan kawasan konservasi dan konservasi jenis ikan sebagaimana dimandatkan dalam Pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumber Daya Ikan yang kemudian diatur lebih detail melalui Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 21 Tahun 2015 tentang kemitraan dalam pengelolaan kawasan konservasi perairan. Selain itu, dalam mengisi gap sumberdaya pengelolaan kawasan konservasi, dua atau lebih unit organisasi pengelola juga dimungkinkan untuk bekerjasama dengan membentuk jejaring kawasan konservasi perairan yang dimandatkan oleh Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 13/PERMEN-KP/2014 tentang jejaring kawasan konservasi perairan.

Upaya Penguatan Jejaring, Kemitraan/Kerjasama, dan Konvensi Konservasi Keanekaragaman Hayati Perairan di KK Pulau Pieh dan KK Kep. Anambas tahun 2020-2024 yang dilakukan oleh LKKPN Pekanbaru melalui berbagai kegiatan antara lain:

- Inisiasi Jejaring dan Kemitraan
- Pemberian bantuan KOMPAK
- Monitoring dan Evaluasi bantuan KOMPAK

2. Tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan LKKPN Pekanbaru

Tata pemerintahan yang baik (*good governance*) dapat terwujud melalui Reformasi birokrasi. Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 merupakan proses yang menjadi pengungkit yang diharapkan dapat menghasilkan sasaran pemerintah yang bersih dan akuntabel, pemerintahan yang *capable*, serta pelayanan publik yang prima.

Reformasi birokrasi di LKKPN Pekanbaru telah dimulai dengan ditetapkannya LKKPN Pekanbaru sebagai salah satu unit yang dibangun zona integritasnya pada tahun 2019. Pada Tahun 2020, LKKPN Pekanbaru berhasil meraih predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) melalui Kepmen KP nomor 4 Tahun 2023 tentang Unit Kerja Berpredikat WBK. Pembangunan zona integritas di LKKPN Pekanbaru dilakukan melalui berbagai kegiatan yang diwadahi dalam 6 (enam) komponen yaitu: manajemen perubahan; penataan tata laksana; penataan sistem manajemen SDM; penguatan akuntabilitas ; penguatan pengawasan dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Manajemen Perubahan bertujuan untuk mentransformasi sistem dan mekanisme kerja organisasi serta mindset (pola pikir) dan *cultureset* (cara kerja) individu ASN menjadi lebih adaptif, inovatif, responsif, profesional, dan berintegritas sehingga dapat memenuhi tuntutan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat yang semakin meningkat.

Penataan tatalaksana bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi sistem, proses, dan prosedur kerja pada masing-masing kementerian/ lembaga/ pemerintah daerah. Salah satu yang perlu diciptakan adalah dengan menerapkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang akan

menjadi acuan dalam integrasi proses bisnis, data, infrastruktur, aplikasi dan keamanan SPBE untuk menghasilkan keterpaduan secara nasional.

Penataan sistem manajemen SDM Aparatur bertujuan untuk meningkatkan profesionalisme SDM aparatur pada masing-masing kementerian/ lembaga/ pemerintah daerah yang didukung oleh sistem rekrutmen dan promosi aparatur berbasis kompetensi, transparan, serta memperoleh gaji dan bentuk jaminan kesejahteraan yang sepadan.

Penguatan Akuntabilitas Kinerja bertujuan untuk menciptakan kementerian/ lembaga/ pemerintah daerah yang akuntabel dan berkinerja tinggi.

Penguatan pengawasan bertujuan untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN pada masing-masing kementerian / lembaga/ pemerintah daerah.

Peningkatan kualitas pelayanan publik bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik pada masing-masing kementerian/ lembaga/ pemerintah daerah sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat.

Tabel 1. Dokumen Pengelolaan Kawasan Konservasi

No	Jenis Dokumen	Judul
1.	Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2019	Rencana Aksi Nasional Pengelolaan Terpadu Taman Nasional dan Kawasan Konservasi Perairan Nasional
2.	Permen KP No. 37 Tahun 2023	Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 65/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Ruang Laut
3.	Kepmen KP No. 70 Tahun 2009	Tentang Penetapan Kawasan Konservasi Perairan Nasional Taman Wisata Perairan Pulau Pieh dan Laut Sekitarnya
4.	Kepmen KP No. 37/KEPMEN-KP/2014	Tentang Penetapan Kawasan Konservasi Perairan Nasional Kepulauan Anambas dan Laut Sekitarnya di Provinsi Kepulauan Riau
5.	Kepmen KP No 38/KEPMEN-KP/2014	Tentang Rencana Pengelolaan dan Zonasi Taman Wisata Perairan Pulau Pieh dan Laut Sekitarnya di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2014-2034
6.	Kepmen KP No. 53/KEPMEN-KP/2014	Tentang Rencana Pengelolaan Dan Zonasi Taman Wisata Perairan Kepulauan Anambas Dan Laut Sekitarnya

No	Jenis Dokumen	Judul
		Di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2014-2034
7.	Kepmen KP No. 30 tahun 2022	Tentang Kawasan Konservasi Kepulauan Anambas dan Laut Sekitarnya di Provinsi Kepulauan Riau
8.	Kepmen KP No. 31 tahun 2022	Tentang Kawasan Konservasi Pulau Pieh dan Laut Sekitarnya di Provinsi Sumatera Barat
9.	Keputusan Direktur Jenderal PRL Nomor 28/KEP- DJPRL/2020	Tentang Pedoman Teknis Evaluasi Efektifitas Pengelolaan Kawasan Konservasi (EVIKA)
10.	Keputusan Direktur Jenderal PKRL Nomor 56 Tahun 2023	Tentang Rencana Pengelolaan Kawasan Konservasi Pulau Pieh dan Laut Sekitarnya di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022-2042
11.	Keputusan Direktur Jenderal PKRL Nomor 57 Tahun 2023	Tentang Rencana Pengelolaan Kawasan Konservasi Kepulauan Anambas dan Laut Sekitarnya di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022-2042
.	Kajian / Survei	Arahan teknis pemanfaatan kawasan konservasi untuk tujuan perikanan, budidaya dan wisata

Untuk mengukur capaian keberhasilan dari strategi yang dilaksanakan yaitu dengan menggunakan Pedoman Teknis Evaluasi Efektifitas Pengelolaan Kawasan Konservasi berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal PRL Nomor 28/KEP- DJPRL/2020 tentang Pedoman Teknis Evaluasi Efektifitas Pengelolaan Kawasan Konservasi (EVIKA). Adapun peningkatan pengelolaan dapat diketahui dari penilaian EVIKA yang telah menjadi standar dalam melakukan evaluasi Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi. Tingkatan level efektivitas ditunjukkan dengan perbedaan warna yaitu level perunggu, level perak, dan level emas. EVIKA adalah metode evaluasi efektifitas pengelolaan kawasan konservasi yang menunjukkan tingkat/level/peringkat sejauh mana upaya pengelolaan kawasan konservasi memberikan hasil positif terhadap aspek-aspek sumber daya kawasan dan sosial-ekonomi-budaya masyarakat yang berdampak pada peningkatan kinerja pengelolaan kawasan konservasi perairan.

Tabel 2. Kriteria EVIKA

Kriteria	No	Indikator	Penanggung jawab	Bobot
Input	1	Status Kawasan	Unit eselon 2	15
	2	Rencana Zonasi	Unit eselon 2	10
	3	Rencana pengelolaan	Unit eselon 2	20
	4	Sumber daya manusia	Unit eselon 2	25
	5	Anggaran	Unit eselon 2	20
	6	Sarana dan prasarana	Unit eselon 2	10
				100
Proses	1	SOP pengelolaan	Satuan Unit Organisasi Pengelola	10
	2	Pengawasan	Satuan Unit Organisasi Pengelola	15
	3	Penjangkauan	Satuan Unit Organisasi Pengelola	15
	4	Kemitraan	Satuan Unit Organisasi Pengelola	10
	5	Pemantauan sumber daya kawasan	Satuan Unit Organisasi Pengelola	15
	6	Pengelolaan sarana dan prasarana	Satuan Unit Organisasi Pengelola	10
	7	Perizinan	Satuan Unit Organisasi Pengelola	10
	8	Pemberdayaan masyarakat	Satuan Unit Organisasi Pengelola	15
				100
Output	1	Pemanfaatan terkendali	Unit eselon 2	20
	2	Ancaman	Unit eselon 2	15
	3	Tingkat kepatuhan	Unit eselon 2	15
	4	Pengetahuan masyarakat	Unit eselon 2	15
	5	Pemberdayaan masyarakat	Unit eselon 2	20
	6	Data dan informasi	Unit eselon 2	15
				100
Outcome	1	Kondisi target konservasi	Unit eselon 1	30
	2	Kondisi zona inti	Unit eselon 1	25
	3	Kondisi masyarakat penerima manfaat	Unit eselon 1	25
	4	Partisipasi masyarakat	Unit eselon 1	20
				100

2.2. Perjanjian Kinerja

2.2.1. Indikator Kinerja

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel, dan berorientasi kepada hasil, ditetapkan penetapan kinerja Unit Kerja Ditjen PRL dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan yang merupakan ikhtisar dari rencana kinerja yang akan dicapai pada tahun 2023. Perjanjian kinerja ditandatangani antara Kepala UPT dengan Direktur Jenderal PRL. Penetapan kinerja ini merupakan tolak ukur keberhasilan organisasi dan menjadi dasar dalam evaluasi akuntabilitas kinerja Tahun Anggaran 2023.

Perjanjian kinerja (PK) LKKPN Pekanbaru selama tahun 2023 telah ditetapkan 3 kali revisi. PK awal LKKPN Pekanbaru tersebut disahkan pada 9 Januari 2023 dan yang kedua pada 2 Agustus 2023 (terdapat dalam lampiran) akibat ada pengangkatan Kepala LKKPN Pekanbaru yang baru serta terkait tambahan anggaran bersumber PNPB termutakhir sebagaimana pada Lampiran.

Revisi ketiga ditetapkan pada 30 November 2023 akibat terdapat perubahan target nilai IKPA. Berikut rincian perjanjian kinerja termutakhir.

Tabel 3. Perbandingan Perjanjian Kinerja LKKPN Pekanbaru Tahun 2022 dan 2023

No	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	2022		2023	
			TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN
1.	Terselenggaranya pemanfaatan dan pengendalian ruang laut di wilayah laut, pesisir dan pulau-pulau kecil di wilayah kerja LKKPN Pekanbaru	1. • (2022) Rekomendasi kebijakan monitoring dan verifikasi perizinan pemanfaatan ruang laut yang disusun di wilayah kerja LKKPN Pekanbaru (Rekomendasi Kebijakan) • (2023) Dokumen Operasionalisasi Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut yang disusun di wilayah kerja LKKPN Pekanbaru (Dokumen) - IKU	1	1	3	3
2	Meningkatnya efektivitas kawasan konservasi di Wilayah Kerja LKKPN Pekanbaru	2. Persentase peningkatan nilai efektivitas Kawasan Konservasi Perairan Nasional Wilayah Kerja LKKPN Pekanbaru (%) - IKU	5	5,34	5	6,62
3	• (2022) Meningkatnya pelaksanaan konvensi dan kontribusi kerjasama, jejaring, dan kemitraan untuk mendukung konservasi yang efektif di wilayah kerja LKKPN Pekanbaru • (2023) Meningkatnya Jejaring dan Kemitraan untuk Mendukung Konservasi yang Efektif di Wilayah Kerja	3. (2023) IKU Baru Jejaring Konservasi yang Diinisiasi di Wilayah Kerja LKKPN Pekanbaru (Dokumen) - IKU	-	-	1	1
		4. • (2022) Kerjasama, jejaring dan/atau kemitraan konservasi yang diinisiasi di wilayah kerja LKKPN Pekanbaru (Kesepakatan) • (2023) Kemitraan Konservasi yang Diinisiasi dan/atau Dievaluasi di Wilayah Kerja LKKPN	1	2	1	2

No	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		2022		2023	
				TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN
	LKKPN Pekanbaru		Pekanbaru (Dokumen) - IKU				
4.	Meningkatnya partisipasi dan kapasitas masyarakat dalam mendukung konservasi di wilayah kerja LKKPN Pekanbaru	5.	Bantuan pemerintah untuk kelompok masyarakat penggerak konservasi (KOMPAK) di wilayah kerja LKKPN Pekanbaru (Kelompok) - IKU	2	2	2	3
5.	Meningkatnya Nilai PNBPN LKKPN Pekanbaru	6.	Nilai PNBPN LKKPN Pekanbaru (Rp.000) - IKU	8.275	16.100	13.587	51.958,75
6.	Tatakelola pemerintahan yang baik lingkup LKKPN Pekanbaru	7.	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup LKKPN Pekanbaru - IKM	89	93,93	93,75	97,14
		8.	Nilai Kinerja Anggaran lingkup LKKPN Pekanbaru (Nilai) - IKM	81	87,40	82	88,46
		9.	Nilai unit kerja berpredikat menuju WBK di wiayah kerja LKKPN Pekanbaru (Nilai) - IKM	75	92,49	75	92,49
		10.	Indeks Profesionalitas ASN lingkup LKKPN Pekanbaru (Indeks) - IKM	83	84,54	84	90,1
		11.	• (2022) Nilai Rekonsiliasi Kinerja lingkup LKKPN Pekanbaru (Nilai) • (2023) Nilai PM SAKIP lingkup LKKPN Pekanbaru (Nilai) - IKM	92	96,68	75	84,15
		12.	Laporan SPIP yang disusun lingkup LKKPN Pekanbaru (Dokumen) - IKM	4	4	4	4
		13.	Persentase unit kerja lingkup LKKPN Pekanbaru yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar (%) - IKM	86	100	92	133,3
		14.	Presentase Rekomendasi Hasil Pengawasan lingkup LKKPN Pekanbaru yang	70	70	75	100

No	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	2022		2023	
			TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN
		dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan (%) - IKM				
		15. Persentase penyelesaian temuan lingkup LKKPN Pekanbaru (%) - IKM	100	100	100	100
		16. Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan Bantuan Pemerintah lingkup LKKPN Pekanbaru (%) - IKM	75	100	77,5	92,5

Berdasarkan tabel diatas maka jika Sasaran Kegiatan (SK) dan IKU 2023 dibandingkan dengan tahun 2022, LKKPN Pekanbaru mendapatkan satu IKU baru yaitu Jejaring Konservasi yang Diinisiasi di Wilayah Kerja LKKPN Pekanbaru. Pada tahun 2023 Indikator Kinerja terbagi menjadi 2 yaitu IKU (Indikator Kinerja Utama) dan IKM (Indikator Kinerja Manajerial).

2.2.2. Anggaran

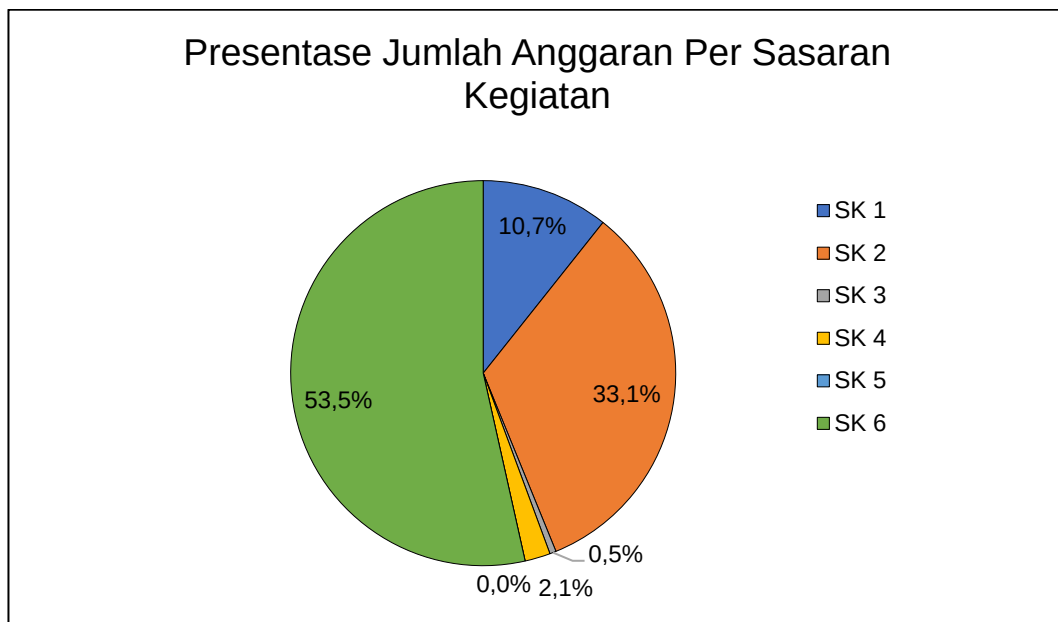
Alokasi anggaran LKKPN Pekanbaru Tahun 2023 Triwulan IV terdapat penambahan anggaran bersumber **PNBP** sebanyak **Rp774.780.000** dari sebelumnya **Rp13.571.313.000** sehingga **total pagu LKKPN Pekanbaru Rp14.346.093.000** namun pada akhir terdapat AA sebesar sebesar **Rp1.350.000.000** sehingga anggaran akhir sebesar **Rp12.996.093.000**.



Gambar 3. Perbandingan Pagu Tahun Anggaran 2019 – 2023

Total anggaran untuk mendukung kinerja Sasaran Kegiatan (**SK1**- Terselenggaranya pemanfaatan dan pengendalian ruang laut di wilayah laut, pesisir dan pulau-pulau kecil di wilayah kerja LKKPN Pekanbaru) Rp2.594.328.000, Sasaran Kegiatan (**SK2**-Meningkatnya efektivitas kawasan

konservasi di Wilayah Kerja LKKPN Pekanbaru) Rp2.555.672.000, Sasaran Kegiatan (**SK3**-Meningkatnya pelaksanaan konservasi dan kontribusi kerjasama, jejaring, dan kemitraan untuk mendukung konservasi yang efektif di wilayah kerja LKKPN Pekanbaru) Rp174.780.000, Sasaran Kegiatan (**SK4**-Meningkatnya partisipasi dan kapasitas masyarakat dalam mendukung konservasi di wilayah kerja LKKPN Pekanbaru) Rp258.000.000, Sasaran Kegiatan (**SK5**-Meningkatnya nilai PNBP LKKPN Pekanbaru) Rp200.000.000 dan anggaran yang mendukung Dukungan Manajemen (**SK6**-Tata kelola pemerintahan yang baik lingkup LKKPN Pekanbaru) Rp8.363.313.000.



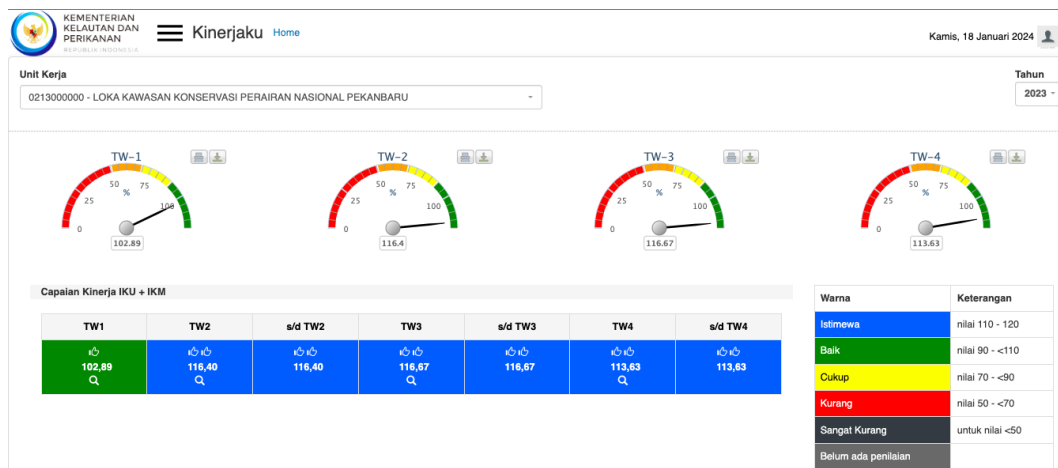
Gambar 4. Persentase Dukungan Anggaran Terhadap Sasaran Kegiatan LKKPN Pekanbaru Tahun 2023

BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Capaian Kinerja

Loka Kawasan Konservasi Perairan Nasional Pekanbaru mendukung untuk mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel, dan berorientasi kepada hasil dengan melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Perjanjian Kinerja yang ditandatangani antara Kepala UPT dengan Direktur Jenderal PKRL. Kegiatan ini dilakukan untuk mengukur keberhasilan organisasi dan menjadi dasar dalam evaluasi akuntabilitas kinerja pada Tahun Anggaran 2023.

Pelaksanaan pengukuran kinerja pada tahun 2023 ini dilakukan dengan melakukan pengimputan data kinerja dalam aplikasi kinerja pada portal <https://kinerjaku.kkp.go.id>. Performa organisasi akan terlihat dari hasil input data kinerja pada aplikasi tersebut dengan Nilai Perolehan Sasaran Kegiatan (NPSS)/ Nilai Pencapaian Sasaran Kegiatan (NPSK). Dari hasil analisis diperoleh nilai kinerja LKKPN Pekanbaru tahun 2023 adalah kategori baik dengan **Nilai NPSK Kinerjaku sebesar 113.63 (Istimewa)**.



Gambar 5 Nilai NPSK Tahun 2023

Tabel 4. Capaian Kinerja LKKPN Pekanbaru Tahun 2023

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	CAPAIAN	KET
1.	Terselenggaranya pemanfaatan dan pengendalian ruang laut di wilayah laut, pesisir dan pulau-pulau kecil di wilayah kerja LKKPN Pekanbaru	1. Dokumen Operasionalisasi Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut yang disusun di wilayah kerja LKKPN Pekanbaru (Dokumen)	3	3	Tahunan

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	CAPAIAN	KET
2.	Meningkatnya efektivitas kawasan konservasi di Wilayah Kerja LKKPN Pekanbaru	2. Persentase peningkatan nilai efektivitas Kawasan Konservasi Perairan Nasional Wilayah Kerja LKKPN Pekanbaru	5	6,62	Tahunan
3.	Meningkatnya Jejaring dan Kemitraan untuk Mendukung Konservasi yang Efektif di Wilayah Kerja LKKPN Pekanbaru	3. Jejaring Konservasi yang Diinisiasi di Wilayah Kerja LKKPN Pekanbaru (Dokumen)	1	1	Tahunan
		4. Kemitraan Konservasi yang Diinisiasi dan/atau Dievaluasi di Wilayah Kerja LKKPN Pekanbaru (Dokumen)	1	2	Tahunan
4.	Meningkatnya partisipasi dan kapasitas masyarakat dalam mendukung konservasi di wilayah kerja LKKPN Pekanbaru	5. Bantuan pemerintah untuk kelompok masyarakat penggerak konservasi (KOMPAK) di wilayah kerja LKKPN Pekanbaru (Kelompok)	2	3	Triwulan
5.	Meningkatnya Nilai PNBP LKKPN Pekanbaru (Rp.)	6. Nilai PNBP LKKPN Pekanbaru (Rp.000)	13.587	51.958,75	Tahunan
6.	Tatakelola pemerintahan yang baik lingkup LKKPN Pekanbaru	7. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup LKKPN Pekanbaru	89	97,14	Semester
		8. Nilai Kinerja Anggaran lingkup LKKPN Pekanbaru (Nilai)	82	88,46	Tahunan
		9. Nilai unit kerja berpredikat menuju WBK di wilayah kerja LKKPN Pekanbaru (Nilai)	75	92,49	Tahunan
		10. Indeks Profesionalitas ASN lingkup LKKPN Pekanbaru (Indeks)	84	90,1	Semester
		11. Nilai PM SAKIP lingkup LKKPN Pekanbaru (Nilai)	75	84,15	Tahunan
		12. Laporan SPIP yang disusun lingkup	4	4	Triwulan

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	CAPAIAN	KET
		LKKPN Pekanbaru (Dokumen)			
13.		Persentase unit kerja LKKPN Pekanbaru yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar (%)	92	133,3	Triwulan
14.		Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan lingkup LKKPN Pekanbaru yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan (%)	75	100	Triwulan
15.		Persentase penyelesaian temuan lingkup LKKPN Pekanbaru (%)	100	100	Tahunan
16.		Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan Bantuan Pemerintah lingkup LKKPN Pekanbaru (%)	77,5	92,5	Tahunan

3.2. Capaian Kinerja Sasaran Kegiatan 1

Sasaran kegiatan 1 LKKPN Pekanbaru adalah terselenggaranya pemanfaatan dan pengendalian ruang laut di wilayah laut, pesisir dan pulau-pulau kecil di wilayah kerja LKKPN Pekanbaru dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai berikut:

3.2.1. IKU 1. Dokumen Operasionalisasi Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut yang disusun di wilayah kerja LKKPN Pekanbaru (Dokumen)

Merupakan IKU perubahan nomenklatur di tahun 2023 adapun penilaian dokumen operasionalisasi perizinan pemanfaatan ruang laut khususnya di Kawasan Konservasi Kepulauan Anambas dan Pulau Pieh berdasar kepada Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 28 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut, mengenai kewajiban mendapatkan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut terhadap kegiatan yang telah dan akan dilakukan secara menetap di Perairan Pesisir, wilayah perairan, dan wilayah yurisdiksi. Penilaian Indikator Kinerja ini **merupakan Target Tahunan dan dari target 3 dokumen sudah tercapai 3 dokumen** sesuai dengan Surat dari KaTimja ke Kepala Loka No. B.121/LKKPN/TU.140/I/2024 tanggal 10 Januari (terlampir), dimana rician target dan capaiannya sebagai berikut

Tabel 5. Capaian Indikator Kinerja Utama 1

SK-1			Terselenggaranya pemanfaatan dan pengendalian ruang laut di wilayah laut, pesisir dan pulau-pulau kecil di wilayah kerja LKKPN Pekanbaru							
IKU-1			Dokumen Operasionalisasi Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut yang disusun di wilayah kerja LKKPN Pekanbaru (Dokumen)							
Realisasi Tahun Sebelumnya			Tahun 2023						Renstra 2020-2024	
2020	2021	2022	Target	Realisasi	% Capaian	Kenaikan dari 2022	Target PK 2023	% Realisasi Thd target PK	Target 2024	% Capaian thd Renstra
-	-	1	3	3	100	3	3	100	3	-

Berdasarkan tabel capaian diatas dapat disimpulkan:

- Capaian IKU 1 dari target 3 dokumen **sudah tercapai 3 dokumen (realisasi 100%) yaitu:**
 1. Dokumen Sosialisasi Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut yang dilaksanakan sebanyak enam kali dengan jumlah peserta 136 orang yang seluruh kegiatan dilaksanakan di Kepulauan Anambas
 2. Dokumen Verifikasi pemanfaatan ruang laut yang dilaksanakan sebanyak tiga kali penilaian teknis, satu kali verifikasi lapangan dan 17 kali menghadiri permohonan PKKPR di Kepulauan Anambas.
 3. Dokumen Monitoring pemanfaatan ruang laut telah dilaksanakan sebanyak 3 (tiga) kali di Kepulauan Anambas
- Capaian IKU ini tidak dapat dibandingkan dengan IKU tahun 2022 karena IKU ini mengalami perubahan nomenklatur pada tahun 2023. Pada tahun 2022 targetnya adalah rekomendasi kebijakan sedangkan pada 2023 targetnya menjadi dokumen.
- IKU ini tidak terdapat di dalam Renstra LKKPN Pekanbaru tahun 2020-2024 sehingga tidak dapat dibandingkan capaiannya dengan target tahun 2023 pada Renstra LKKPN Pekanbaru tahun 2020-2024
- Capaian jika dibandingkan dengan Dokumen Matrik Indikator Kinerja dan Anggaran (dalam Manual IKU) LKKPN Pekanbaru 2020-2024, **dari target 3 dokumen sudah tercapai 3 dokumen (realisasi 100%)**.

Berikut adalah rincian kegiatan yang mendukung IKU 1

Tabel 8. Output dan Outcome Kegiatan Pengelolaan Kawasan Pada IKU 1

No	Kegiatan	Progres Output	Outcome
1.	Sosialisasi Penyelenggaraan Penataan Ruang di KKN	Target 50 Orang Peserta Sosialisasi (Sudah dilaksanakan Sosialisasi Door to Door, dan dikumpulkan dalam 2 kali acara total peserta sudah 70) sehingga target 50 peserta sudah tercapai	Penyadartahuan Masyarakat terkait perizinan ruang laut
2.	Verifikasi Pemanfaatan Ruang Laut	Target dilaksanakannya 1 Laporan Verifikasi (telah dilakukan di Penyali Anambas dan Suriawati Bantuan Verlap BPSPL Padang)	Terbitnya Izin Penggunaan Ruang Laut Masyarakat dengan mudah dan berkelanjutan bagi Kawasan.

No	Kegiatan	Progres Output	Outcome
3.	Pendataan dan Monitoring Pemanfaatan Ruang Laut	Target 2 Laporan Monitoring di Anambas dan Pulau Pieh. Telah dilaksanakan 2 kali di Anambas untuk memperkuat basis data PKKPR.	Penyadartahuan Masyarakat terkait perizinan ruang laut

Realisasi Anggaran dan Fisik Indikator Kinerja

Tabel 6. Realisasi Anggaran Kegiatan Yang Mendukung Capaian IKU 1

No	Kegiatan	Pagu (Rp) yang Bisa Digunakan / Tidak Blokir	Realisasi Anggaran (Rp)	Penyerapan (%)	Fisik (%)
1.	Sosialisasi Penyelenggaraan Penataan Ruang di KKPN	191.376.000	190,528,686	99.56 %	100
2.	Verifikasi Pemanfaatan Ruang Laut	48,520,000	48,425,418	99.81%	100
3.	Monitoring Pemanfaatan Ruang Laut	160,104,000	159,355,837	99.53 %	100

Kegiatan Perencanaan Ruang Laut ini terdapat *Automatic Adjustment* (AA) sebelumnya terdapat blokir Rp.100.000.000, namun pada akhir Triwulan IV blokirnya berhasil terbuka.

Efisiensi Sumber Daya dan Anggaran pada IKU

Pada Tahun 2023, kegiatan pada IKU 1 telah dilakukan efisiensi :

- Aspek Anggaran : Dapat dilihat bahwa 3 kegiatan realisasi fisiknya lebih besar daripada realisasi anggaran terutama kegiatan verifikasi pemanfaatan ruang laut dimungkinkan sudah tercapainya target verifikasi PKKPR di kawasan.
- Aspek SDM (Sumber Daya Manusia) : Pada Triwulan IV 2023 efisiensi penggunaan sumberdaya manusia dilakukan dengan beberapa tim verifikasi dan sosialisasi yang telah meningkat kapasitasnya dengan mengikuti Bimbingan Teknis yang dilaksanakan oleh Direktorat PRL terkait pelaksanaan PRL sehingga SDM lebih efisien dengan mengirimkan yang sudah ahli didalamnya dibandingkan membawa banyak SDM namun kurang dimanfaatkan substansinya, seperti tenaga ahli pilot drone dan pengolahan perpetaan.

Analisis Keberhasilan/Kegagalan IKU

Keberhasilan Pencapaian IKU 1 ini didukung oleh::

- Pada tahun 2023 terdapat kendala pada IKU 1 karena anggaran mengalami *automatic adjustment* sampai dengan Oktober 2023, namun demikian telah dilakukan revisi anggaran dan strategi percepatan pelaksanaan kegiatan sehingga realisasi anggaran yang mendukung IKU ini dapat mencapai 99,58%

Rencana Aksi Tindak Lanjut pada Triwulan Selanjutnya

Tindak Lanjut Rincian Kegiatan pada IKU 1 yang perlu ditindaklanjuti pada Triwulan I 2024 ini adalah:

- Merencanakan pelaksanaan kegiatan terfokus layanan Sosialisasi dan Monitoring Pemanfaatan Ruang Laut dengan maksimalkan anggaran sebelum adanya blokir anggaran.
- Untuk kegiatan Verifikasi sudah dapat dicicil pembuatan laporan akhir kegiatannya.

Analisis Program dan Kegiatan Pendukung Keberhasilan Capaian IKU 1

Pada tahun 2023 telah dilakukan beberapa kegiatan dalam pencapaian IKU 1, yaitu:

1. LKKPN Pekanbaru mengadakan kegiatan sosialisasi secara *Door to Door* yang merupakan rangkaian dari kegiatan sosialisasi Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL) di Kawasan Konservasi Kepulauan Anambas dan Laut di Sekitarnya. Kegiatan ini berlangsung dari tanggal 28-30 Maret 2023 di Pulau Siantan dan Pulau Jemaja.
2. Tarempa (17/05), Loka Kawasan Konservasi Perairan Nasional (LKKPN) Pekanbaru terus tingkatkan pendataan pemanfaatan ruang laut eksisting di Kepulauan Anambas. Pengumpulan data ini merupakan kegiatan lanjutan dari pendataan yang telah dilakukan di tahun 2022.
3. LKKPN Pekanbaru mengadakan kegiatan sosialisasi Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL) di Kawasan Konservasi Kepulauan Anambas dan Laut di Sekitarnya. Kegiatan ini berlangsung dari tanggal 9-10 Agustus 2023 di Pulau Jemaja yang dilaksanakan oleh tim yang terdiri dari pegawai LKKPN Pekanbaru wilker Anambas, perwakilan Satwas PSDKP Anambas, serta perwakilan Dinas PM& PTSP Kabupaten Kepulauan Anambas.
4. (Anambas, 17/10) LKKPN Pekanbaru melakukan identifikasi dan pemetaan pemanfaatan ruang laut yang berada di perairan sekitar Kecamatan Palmatak 17-22 Oktober pada enam desa yaitu, Desa Putik, Desa Ladan, Desa Tebang, Desa Candi, Desa Piabung, dan Desa Langir.
5. (Anambas, 12/10) LKKPN Pekanbaru kembali mengadakan kegiatan sosialisasi Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL) di Kawasan Konservasi Kepulauan Anambas dan Laut Sekitarnya. Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 12 Oktober 2023 di Aula RM.

3.3. Capaian Kinerja Sasaran Kegiatan 2

Sasaran kegiatan 2 LKKPN Pekanbaru adalah Meningkatnya efektivitas kawasan konservasi di Wilayah Kerja LKKPN Pekanbaru dengan indikator kinerja utama sebagai berikut:

3.3.1. IKU 2. Persentase Peningkatan Nilai Efektivitas Kawasan Konservasi Nasional Wilayah Kerja LKKPN Pekanbaru (%)

Penilaian persentase peningkatan nilai efektivitas kawasan konservasi perairan nasional wilayah kerja LKKPN Pekanbaru mengacu pada Keputusan Direktur Jenderal PRL Nomor 28/KEP-DJPRL/2020 tentang Pedoman Teknis Evaluasi Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi (EVIKA). Kawasan konservasi yang menjadi kewenangan pengelolaan LKKPN Pekanbaru adalah Kawasan Konservasi Pulau Pieh di Provinsi Sumatera Barat dan Kawasan

Konservasi Kepulauan Anambas di Provinsi Kepulauan Riau. Evaluasi efektivitas dilakukan pada 4 kriteria yaitu: kriteria input, proses, output dan outcome.

Tabel 7. Capaian Indikator Kinerja Utama 2

SK-2			Meningkatnya efektivitas kawasan konservasi di Wilayah Kerja LKKPN Pekanbaru							
IKU-2			Persentase peningkatan nilai efektivitas Kawasan Konservasi Perairan Nasional Wilayah Kerja LKKPN Pekanbaru (%)							
Realisasi Tahun Sebelumnya			Tahun 2023						Renstra 2020-2024	
2020	2021	2022	Target	Realisasi	% Capaian	Kenaikan dari 2022	Target PK 2023	% Realisasi Thd target PK	Target 2024	% Capaian thd Renstra
1.302,5 86,2 Ha	21,22 %	5,34 %	5	6,62	120%	1,28	5	120	5	120

Berdasarkan tabel capaian diatas dapat disimpulkan:

- Capaian nilai EVIKA tahun 2023 dengan **target 5%, tercapai 6,62% (realisasi 120%)**
- Capaian tahun 2023 jika dibandingkan dengan tahun 2022 **dari 5,34 menjadi 6,62 (mengalami kenaikan 1,28).**
- Capaian jika dibandingkan dengan Dokumen Rencana Strategis LKKPN Pekanbaru 2020-2024 yang memiliki target akhir **5% telah tercapai 6,62% maka realisasinya 120%.**
- **Capaian IKU 2** tahun 2023 mencapai target sesuai dengan Restra LKKPN Pekanbaru tahun 2020-2024.

Untuk mengulas ulang capain EVIKA tahun 2023 sebagai pembelajaran, pengukuran IKU ditargetkan naik 5% pertahun, capaian ini berdasarkan kenaikan rata-rata kedua Kawasan dari perbandingan nilai EVIKA 2022 dan penilaian EVIKA Tahun 2023 terdapat kenaikan 6,62% **sesuai dengan memorandum dari KaTimja ke Kepala LKKPN Pekanbaru Nomor 1/LKKPN/TU.140/II/2024 tanggal 9 Januari 2024 (terlampir).** Adapun jika melihat data tahun 2022 rincian perhitungan Nilai 5,34% tersebut berdasarkan perhitungan pada tabel berikut:

Tabel 8. Tabel Perhitungan Capaian Peningkatan Nilai Evika 2022

No	Kawasan Konservasi	Evika 2021-2022			Peningkatan 2022 – 2023 (%)
		Tahun 2022	Tahun 2023	Pengelolaan 2023	
1	Kep. Anambas	66,86	72,67	Dikelola Optimum	5,81
2	Pulau Pieh	68,15	75,57	Dikelola Optimum	7,42
Jumlah					13,23
Rata-rata					6,62

Nilai Evika 2023 ini dilihat berdasarkan kenaikan data 2022-2023, yang pleno penilaian dilakukan diakhir tahun 2023. Secara teknis capaian indikator kinerja ini didukung oleh kegiatan pengelolaan kawasan yang berorientasi dapat

output dan outcome di kawasan konservasi perairan. Adapun walaupun evika belum dapat dilaporkan namun kegiatan teknis pendukungnya sudah mulai berproses pada IKU 2 adalah sebagai berikut:

Tabel 9. Kegiatan Yang Mendukung Capaian IKU 2

No	Kegiatan	Lokasi		Progres (%)
		KK Pieh	KK Anambas	
1.	Pembuatan dan Pemasangan Papan Informasi Kawasan	√	-	100
2.	Penyediaan Prasarana Kawasan Konservasi	√	-	100
3.	Monitoring Ekosistem Terumbu Karang Kawasan Konservasi Pieh	√	-	100
4.	Monitoring Ekosistem Terumbu Karang Kawasan Konservasi Anambas	-	√	100
5.	Monitoring Ekosistem Lamun di Kawasan Konservasi Kepulauan Anambas	-	√	100
6.	Monitoring Penyu di KK Pulau Pieh dan Kepulauan Anambas	√	√	100
7.	Monitoring Sosial Ekonomi di KK Pulau Pieh dan Anambas	√	√	100
8.	Monitoring Implementasi Zonasi di KK Pieh dan Anambas	√	√	100
9.	Monitoring Mangrove KK Kepulauan Anambas		√	100
10.	Konservasi Goes to School	√	√	100
11.	Kampanye Pengurangan Sampah di Kawasan Konservasi	√	√	100
12.	Sosialisasi Rencana Pengelolaan dan Zonasi KK Pieh dan Anambas	√	√	100
13.	Rehabilitasi Terumbu Karang di Kawasan Konservasi	√	√	0
14.	*)Pembinaan Kelompok Masyarakat di KK Pieh dan KK Anambas	√	√	0
15.	Monitoring Cetacean di KK Pulau Pieh	√	-	100
16.	Bimtek Perawatan Alat dan Perlengkapan Survei Pelayanan Perizinan	√	√	100

No	Kegiatan	Lokasi		Progres (%)
		KK Pieh	KK Anambas	
	Pemanfaatan Kawasan Konservasi			

) Keterangan : Kegiatan yang dalam () atau memiliki progress fisik 0 merupakan kegiatan yang diblokir karena kebijakan *Automatic Adjustment*.

Tabel 10. Output s.d. Triwulan IV dan Outcome Pengelolaan Kawasan pada IKU 2

No	Kegiatan	Progres Output	Outcome
1.	Pembuatan dan Pemasangan Papan Informasi Kawasan	Sudah terpasang 4 pada akhir bulan maret di Kota Padang (2) untuk Kawasan Konservasi Pulau Pieh dan Pemasangan Baru papan informasi di Anambas (2) di area bandara jemaja.	Tersedianya Papan Penanda Kawasan untuk Menyadartahukan Masyarakat
2.	Penyediaan Prasarana Kawasan Konservasi	Sudah terlaksana Monitoring Mooring buoy di Pulau Bando	Tersedianya Mooring Buoy Penanda Zona di Kawasan Konservasi untuk Menyadartahukan Masyarakat
3.	Monitoring Ekosistem Terumbu Karang Kawasan Konservasi Pieh	Telah dilaksanakan pada bulan 22 Mei 2023 di 16 Stasiun	Data series Kawasan
4.	Monitoring Ekosistem Terumbu Karang Kawasan Konservasi Anambas	Telah dilaksanakan pada 5-11 Juni 2023 di 21 Stasiun	Data Series Kawasan
5.	Monitoring Ekosistem Lamun di Kawasan Konservasi Kepulauan Anambas	Telah dilaksanakan pada 8-11 Juni 2023 di 6 Stasiun	Data Series Kawasan
6.	Monitoring Penyu di KK Pulau Pieh dan Kepulauan Anambas	Telah terlaksana 9 bulan dari 12 Bulan. di Pulau Pandan, Pulau Bando dan Pulau Mangkai	Data Series Kawasan
7.	Monitoring Sosial Ekonomi di KK Pulau Pieh dan Anambas	Telah melaksanakan Monitoring Morfometrik Ikan yang terlaksana 8 Bulan yaitu Februari-Sept, dan pelaksanaan Survey Sosek di Pieh dan di Anambas.	Data Series Kawasan
8.	Monitoring Implementasi Zonasi di KK Pieh dan Anambas	Telah terlaksana di Anambas 2 Kali Hari Layar dan 4 Kali di Pieh	Data Series Kawasan
9.	Monitoring Mangrove KK Kepulauan Anambas	Telah terlaksana di 31 Mei 2023 dengan jumlah 12 Stasiun	Data Series Kawasan
10.	Konservasi Goes to School	Telah dilaksanakan di Pieh dan Anambas sudah terlaksana di 5 Sekolah dan 2 Universitas dengan jumlah peserta sudah 521 peserta	Kawasan Konservasi yang Aman dari Pelanggaran

No	Kegiatan	Progres Output	Outcome
11.	Kampanye Pengurangan Sampah di Kawasan Konservasi	Telah terlaksana kegiatan BCL di Dumai, Bersih Pantai di Bando, dan Bekerjasama dengan Anambas Foundation, peserta mencapai 654 peserta	Penyadartahuan Masyarakat Dalam Pemeliharaan Kawasan
12.	Sosialisasi Rencana Pengelolaan dan Zonasi KK Pieh dan Anambas	Sosialisasi di 12 desa (19-23 Juni 2023), Sosialisasi di 3 desa (11 Agustus 2023), Sosialisasi di 3 desa (18 Agustus 2023), dan Sosialisasi di 2 desa (25 Agustus 2023)	Penyadartahuan Masyarakat Dalam Pemeliharaan Kawasan
13.	Rehabilitasi Terumbu Karang di Kawasan Konservasi	<i>Baru terbuka blokir</i> , kegiatan hanya perjalanan dinas koordinasi. Sudah dilaksanakan untuk perjalanan KONAS	Penyadartahuan Masyarakat dan Pengelola Kawasan
14.	*)Pembinaan Kelompok Masyarakat di KK Pieh dan KK Anambas	<i>Automatic Adjustment</i> , belum ada kemajuan kegiatan.	Penyadartahuan Masyarakat
15.	Monitoring Cetacean di KK Pulau Pieh	Sudah terlaksana 5 Hari layar (Periode Januari-Maret-Juni 2023) dan Triwulan IV (2 kali di bulan September) dari target 5 hari layar	Penyadartahuan Masyarakat dan Pengelola Kawasan
16.	Bimtek Perawatan Alat dan Perlengkapan Survei Pelayanan Perizinan Pemanfaatan Kawasan Konservasi	Telah terlaksana Bimtek di Padang untuk penggunaan WQC dan perawatan alat selam.	Penyadartahuan Masyarakat

Berikut adalah ringkasan capaian kegiatan pendukung IKU 2 :

Realisasi Anggaran dan Fisik Indikator Kinerja

Tabel 11. Realisasi Anggaran Kegiatan Yang Mendukung Capaian IKU 2

No	Kegiatan	Pagu (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Penyerapan (%)	Fisik (%)
1.	Pembuatan dan Pemasangan Papan Informasi Kawasan	287,912,000	287,066,847	99,71 %	100
2.	Penyediaan Prasarana Kawasan Konservasi	102,800,000	102,606,028	99.81%	100
3.	Monitoring Ekosistem Terumbu Karang Kawasan Konservasi Pieh	300,182,000	299,946,955	99.92 %	100
4.	Monitoring Ekosistem Terumbu Karang Kawasan Konservasi Anambas	189,070,000	188,615,079	99.76 %	100
5.	Monitoring Ekosistem Lamun di Kawasan Konservasi Kepulauan Anambas	78,290,000	77,259,741	98.68 %	100
6.	Monitoring Penyusut di KK Pulau Pieh dan Kepulauan Anambas	544,537,000	543,813,397	99.87 %	100
7.	Monitoring Sosial Ekonomi di KK Pulau Pieh dan Anambas	168,108,000	167,532,124	99.66 %	100

No	Kegiatan	Pagu (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Penyerapan (%)	Fisik (%)
8.	Monitoring Implementasi Zonasi di KK Pieh dan Anambas	292,770,000	292,253,638	99.82 %	100
9.	Monitoring Mangrove KK Kepulauan Anambas	90,005,000	89,676,463	99.63 %	100
10.	Konservasi Goes to School	234,555,000	234,148,503	99.83 %	100
11.	Kampanye Pengurangan Sampah di Kawasan Konservasi	182,246,000	181,917,338	99.82 %	100
12.	Sosialisasi Rencana Pengelolaan dan Zonasi KK Pieh dan Anambas	128,003,000	125,524,094	98.06 %	100
13.	Rehabilitasi Terumbu Karang di Kawasan Konservasi	7,762,000	7,495,092	96.56 %	100
14.	*)Pembinaan Kelompok Masyarakat di KK Pieh dan KK Anambas	193,760,000	0	0 %	100
15.	Monitoring Cetacean di KK Pulau Pieh	100,000,000	99,859,778	99.86 %	100
16.	Bimtek Perawatan Alat dan Perlengkapan Survei Pelayanan Perizinan Pemanfaatan Kawasan Konservasi (PNBP)	67,050,000	66,998,420	99.92 %	100

) Keterangan : Kegiatan yang dalam () atau memiliki progress fisik 0 merupakan kegiatan yang di blokir karena kebijakan *Automatic Adjustment*.

Efisiensi Sumber Daya dan Anggaran pada IKU

Efisiensi kegiatan pada IKU 2 berupa :

- Aspek Anggaran : Mayoritas kegiatan realisasi fisiknya lebih besar dari realisasi anggaran. Untuk Triwulan IV ini kegiatan realisasi anggarannya sudah melebihi 96%, dan mayoritas 99% laporan akhir juga telah diselesaikan .
- Aspek SDM (Sumber Daya Manusia) : Efisiensi SDM dilakukan dengan menggabungkan Tim Monitoring beberapa kegiatan biofisik, termasuk belanja modal digabungkan dengan Tim PBJ untuk pembelian lebih efektif dngan menggunakan kartu kredit pemerintah.

Analisis Keberhasilan/Kegagalan IKU

Evaluasi rincian kegiatan pada IKU 2 yang telah dilakukan adalah:

- Keberhasilan yang terlihat dimana untuk kegiatan Monitoring Biofisik, Lamun, Mangrove, Sosek, Penyu dan Cetacean sebelum akhir kegiatan sudah terlaksana 99% lebih laporan akhir sudah selesai sehingga fisik 100%.
- Penyerapan anggaran dan fisik kegiatan dalam Triwulan IV ini sudah cukup maksimal semua kegiatan telah tercapai hanya kegiatan yang diblokir saja yang tidak terlaksana

Rencana Aksi Tindak Lanjut pada Triwulan Selanjutnya

Tindak Lanjut Rincian Kegiatan pada IKU 2 yang perlu ditindaklanjuti pada Triwulan I 2024 adalah:

- Merencanakan dan mempercepat pelaksanaan kegiatan teknis di Triwulan IV karena masih ada 4 kegiatan yang dibawah 80% baik serapan anggarannya dan serapan fisik.
- Memanajemen anggaran Kegiatan Pembinaan Kelompok yang terblokir untuk ditanyakan apakah bisa dikembalikan ke negara agar tidak mempengaruhi penyerapan anggaran organisasi.

Analisis Program dan Kegiatan Pendukung Keberhasilan Capaian IKU 2

a. Kegiatan pendukung IKU 2 adalah:

No	Dokumentasi	Kegiatan
1.		1. Padang Pariaman (22/9), LKKPN Pekanbaru wilker Pulau Pieh Melibatkan Nelayan, Perangkat Nagari, Masyarakat dan untuk pelaksanaan Sosialisasi Rencana Zonasi Kawasan Konservasi Pulau Pieh dan Laut Sekitarnya di Provinsi Sumatera Barat Kegiatan ini dihadiri 20 nelayan, bertujuan untuk memberikan pemahaman masyarakat terkait dengan zonasi dan aturan terkini yang berlaku dikawasan konversasi Pulau Pieh dan Laut Sekitarnya di Provinsi Sumatera Barat 2. Tarempa (24/11), Kegiatan yang dilaksanakan malam hari pada tanggal 23 November 2023 ini merupakan hari layar ke 9 dalam rangkaian Monitoring Implementasi Zonasi Kawasan Konservasi Kepulauan Anambas Tahun 2023. Pemantauan dan pencatatan kesesuaian kegiatan dengan zonasi Kawasan Konservasi, kegiatan yang merusak/tidak diperbolehkan (destructive fishing) di Kawasan Konservasi dan kegiatan pemanfaatan lainnya di Kawasan Konservasi yang belum terdata, menjadi target dalam monitoring ini.

No	Dokumentasi	Kegiatan
2.		1. Padang (27/3) LKKPN Pekanbaru melakukan pemasangan papan informasi di Kota Padang dan Kota Pariaman Provinsi Sumatera Barat sebagai upaya dalam memperluas jangkauan informasi kawasan konservasi Pulau Pieh. 2. Anambas (30/11), LKKPN Pekanbaru melaksanakan kegiatan monitoring pasca pembuatan dan pemasangan papan informasi di Kawasan Konservasi Kepulauan Anambas tahun 2023. Kegiatan monitoring ini merupakan rangkaian tindak lanjut dari kegiatan pembuatan dan pemasangan papan informasi kawasan dengan meninjau langsung lokasi pemasangan papan informasi yang telah direalisasikan pada tahun 2023
3.		Anambas (28/06) LKKPN Pekanbaru berkolaborasi dengan USAID Kolektif dalam melakukan monitoring ekosistem terumbu karang di Kawasan Konservasi Kepulauan Anambas. Pada kegiatan tersebut, LKKPN Pekanbaru juga mengikutsertakan Pavona Dive selaku kelompok masyarakat penggerak konservasi. Monitoring ekosistem terumbu karang dilakukan pada 17-27 Juni 2023 di 21 titik stasiun permanen.
4.		Padang (21/10) LKKPN Pekanbaru melaksanakan kegiatan Bimbingan Teknis Perawatan Alat dan Perlengkapan Survei Pelayanan Perizinan Pemanfaatan Kawasan Konservasi yang dilaksanakan pada hari Jum'at dan Sabtu, tanggal 20-21 Oktober 2023 di Hotel Kawana, Kota Padang
5.		Padang dan Padang Pariaman (28/12) Tim LKKPN Pekanbaru melalui pengelola Wilker Kawasan Konservasi Pulau Pieh dan Laut Sekitarnya melaksanakan pendataan ikan target yang berada di kawasan konservasi. Pendataan Ikan target konservasi dilakukan dalam rangka Monitoring Sosial Ekonomi di dalam Kawasan Konservasi Pulau Pieh dan laut sekitarnya. Tujuan dari kegiatan pendataan ini adalah untuk mendata kondisi perikanan di dalam kawasan konservasi dan untuk mengetahui hasil tangkapan nelayan,

No	Dokumentasi	Kegiatan
		dimana salah satu sumber datanya adalah dengan mengukur morfometrik dan tingkat kematangan gonad ikan.
6.		Padang (6/10), LKKPN Pekanbaru melaksanakan kegiatan Konservasi Goes to Campus di Universitas Bung Hatta dengan melibatkan 88 orang peserta yang berasal dari civitas akademika Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Bung Hatta, mahasiswa Universitas Riau, mahasiswa Politeknik Ahli Usaha Perikanan Jakarta, dan anggota Yayasan Minang Bahari. Kegiatan ini dilaksanakan melalui penyampaian materi dan diskusi interaktif antara peserta dan narasumber.
7.		(Batam, 17/11) Kepala LKKPN Pekanbaru, Dr. Rahmat Irfansyah, M.Si dan tim melakukan kunjungan ke Pangkalan SDKP Batam untuk melakukan koordinasi terkait aktivitas pemanfaatan dalam kawasan konservasi. Kepala Pangkalan SDKP Batam, Turman Hardianto Maha, S.P., MMP dan jajarannya menyambut hangat kunjungan LKKPN Pekanbaru ini di kantor mereka di Batam.
8.		Letung (23/9) LKKPN Pekanbaru melalui wilayah kerja Kawasan Konservasi Kepulauan Anambas lakukan supervisi kegiatan monitoring penyu di Pulau Mangkai Kawasan Konservasi Kepulauan Anambas. Kegiatan ini dilakukan pada tanggal 23 - 24 September 2023. Monitoring Penyu di Pulau Mangkai yang juga merupakan pulau terluar Indonesia ini telah dilaksanakan sejak tahun 2022. Adapun di pulau ini terdapat 4 (empat) pantai yang rutin didata oleh enumerator diantaranya Pantai Sekanji, Pantai Suit, Teluk Kado, dan Pantai Empung.

3.4. Capaian Kinerja Sasaran Kegiatan 3

Sasaran kegiatan 3 LKKPN Pekanbaru adalah Meningkatnya Jejaring dan Kemitraan untuk Mendukung Konservasi yang Efektif di Wilayah Kerja LKKPN Pekanbaru dengan indikator kinerja utama sebagai berikut:

3.4.1. IKU 3. Jejaring Konservasi yang Diinisiasi di Wilayah Kerja LKKPN Pekanbaru (Dokumen)

Penilaian IKU 3 merupakan **IKU Baru di Tahun 2023**, ini dilakukan dengan menjumlahkan seluruh draft dokumen jejaring yang berhasil disusun dan diajukan ke Dirjen PRL untuk dilakukan pembahasan lebih lanjut. Capaian pada IKU ini merupakan **Target Tahunan, dari target 1 dokumen jejaring kesepakatan tercapai 1 dokumen**, sesuai dengan Surat Prakarsa Jejaring dari Kepala LKKPN Pekanbaru ke Dirjen PKRL No B.1821/LKKPN/PRL.440/X/2023 tanggal 31 Oktober 2023 (terlampir).

Tabel 12. Capaian Indikator Kinerja Utama 3

SK-3			(2022) Meningkatnya pelaksanaan konvensi dan kontribusi kerjasama, jejaring, dan kemitraan untuk mendukung konservasi yang efektif di wilayah kerja LKKPN Pekanbaru (2023) Meningkatnya Jejaring dan Kemitraan untuk Mendukung Konservasi yang Efektif di Wilayah Kerja LKKPN Pekanbaru							
IKU-3			(2023) IKU Baru Jejaring Konservasi yang Diinisiasi di Wilayah Kerja LKKPN Pekanbaru (Dokumen)							
Realisasi Tahun Sebelumnya			Tahun 2023						Renstra 2020-2024	
2020	2021	2022	Target	Realisasi	% Capaian	Kenaikan dari 2022	Target PK 2023	% Realisasi Thd target PK	Target 2024	% Capaian thd Renstra
-	-	-	1	1	100%	1	1	100	-	-

Berdasarkan tabel capaian diatas dapat disimpulkan:

- Capaian IKU 3 adalah **dari target 1 dokumen kesepakatan, tercapai 1 dokumen (realisasi 100%)**.
- Capaian tahun 2023 jika dibandingkan dengan **tahun 2022 mengalami kenaikannya 100%**, karena pada tahun 2022 belum terdapat IKU tersebut (IKU Baru).
- IKU 3 tidak terdapat di dalam Renstra LKKPN Pekanbaru tahun 2020-2024 sehingga tidak dapat dibandingkan capaiannya dengan target tahun 2024 pada Renstra LKKPN Pekanbaru tahun 2020-2024

Kemitraan dan Perwujudan Jejaring dalam pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan (KKP) merupakan hubungan kerja sama antara dua pihak atau lebih unit organisasi pengelola Kawasan Konservasi Perairan, berdasarkan kesetaraan, keterbukaan, dan saling menguntungkan. Tujuan membangun kemitraan ini untuk mengoptimalkan peran stakeholders terkait dalam pencapaian efektivitas kawasan konservasi. Kemitraan dalam pengelolaan KKP tertuang sebagai amanat dari Peraturan Pemerintah (PP) No 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumberdaya Ikan. Sebagai tindak lanjut dari amanat PP No. 60 Tahun 2007 tersebut, pada tahun 2015 Menteri Kelautan dan Perikanan menerbitkan Peraturan Menteri No. 21 Tahun 2015 tentang Kemitraan Dalam Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan Nasional.

Tabel 13. Kegiatan Yang Mendukung Capaian Indikator Kinerja IKU 3

No	Kegiatan	Lokasi		Progres (%)
		KK Pieh	KK Anambas	
1.	Inisiasi Jejaring Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan	—	√	100%

Tabel 14. Output dan Outcome Kegiatan Pengelolaan Kawasan Pada IKU 3

No	Kegiatan	Progres Output	Outcome
1.	Inisiasi Jejaring Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan	Target terdapat 1 Jejaring dan 1 Kemitraan. Progress saat ini sudah mulai dibentuk jejaring dengan Provinsi Kepulauan Riau	Dokumen Jejaringnya berjudul "Sinergitas Perencanaan Dan Pelaksanaan Pembangunan Jejaring Pengelolaan Kawasan Konservasi Di Provinsi Kepulauan Riau"

Analisis keberhasilan IKU 3 ini adalah dengan menjumlahkan dokumen (draft/final) kesepakatan atau perjanjian jejaring, kemitraan, kerjasama dan/atau konvensi antara pengelola KKPN dengan mitra untuk mendukung kegiatan perlindungan, pelestarian dan pemanfaatan Kawasan dan jenis ikan. Adapun detail kesepakatannya pada tahun sebelumnya di 2022 sebagai berikut:

Capaian IKU 3 adalah tersusunnya draft nota kesepakatan jejaring Kawasan Konservasi Kepulauan Riau

Realisasi Anggaran dan Fisik Indikator Kinerja

Anggaran yang digunakan sama dengan anggaran yang digunakan pada IKU 4 tentang Kemitraan.

Tabel 16. Realisasi Anggaran Kegiatan Yang Mendukung Capaian IKU 3

Kegiatan	Pagu (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Penyerapan (%)	Fisik (%)
Inisiasi Kemitraan Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan	100,000,000	99,426,052	99.43 %	100%

Efisiensi Sumber Daya dan Anggaran pada IKU

Kegiatan pada IKU 3 telah dilaksanakan efisiensi:

- Aspek Anggaran : Capaian target fisik dan anggaran sudah maksimal sudah melebihi target capaian anggaran sampai dengan Triwulan (lebih dari 99%). Kemudian, dari anggaran yang sebelumnya dialokasikan hanya untuk 1 kesepakatan, kami LKKPN Pekanbaru telah mencapai tambahan 2 kesepakatan dan 1 jejaring. Kemudian pada tahun 2023, memiliki Target

Capaian Jejaring dan Kemitraan sehingga cakupan keterlibatan pengelolaan lebih luas.

- Aspek SDM (Sumber Daya Manusia) : Efisiensi SDM dilakukan dengan pelibatan menggabungkan tim pelaksana kegiatan jejaring dan kemitraan, dan Bantuan KOMPAK sehingga efisien dari segi efektifitas pelaksana.

Analisis Keberhasilan/Kegagalan IKU

- Keberhasilan pencapaian IKU 3 karena peran aktif LKKPN Pekanbaru dan Provinsi Kepulauan Riau demi tercapainya pengelolaan Kawasan Konservasi yang efektif

Rencana Aksi Tindak Lanjut pada Triwulan Selanjutnya

Tindak Lanjut Rincian Kegiatan pada IKU 3 yang perlu ditindaklanjuti pada Triwulan I 2024 adalah:

- Mengawal dan mengawasi terus *time schedule* keberjalanan Perjanjian Kemitraan setelah ditandatangani agar kegiatan yang sudah disepakati pada kesepakatan dijalankan dan pada proses Monitoring dan Evaluasi
- Kemitraan pada tahun selanjutnya dapat mendapatkan penilaian yang positif.

Analisis Program dan Kegiatan Pendukung Keberhasilan Capaian IKU 3

No	Dokumentasi	Kegiatan
1.		(Pekanbaru, 29/8) Guna mengetahui sejauh mana tingkat efektivitas pengelolaan yang telah dilakukan di kawasan konservasi Kepulauan Anambas selama periode Januari-Desember Tahun 2022, LKKPN Pekanbaru bersama Tim Penilai Kelompok IV mengikuti kegiatan Penilaian EVIKA Kawasan Konservasi Kepulauan Anambas, dan merumuskan Jejaring Mitra dengan USAID KOLEKTIF.

3.4.1. IKU 4. Kemitraan Konservasi yang Diinisiasi dan/atau Dievaluasi di Wilayah Kerja LKKPN Pekanbaru (Dokumen)

Penilaian IKU 4 ini dilakukan dengan menjumlahkan seluruh draft dokumen kemitraan yang berhasil disusun dan diajukan ke Dirjen PRL untuk dilakukan pembahasan lebih lanjut. Capaian pada IKU ini merupakan **Target Tahunan yang sudah tercapai 2 Kemitraan.**

Tabel 13. Capaian Indikator Kinerja Utama 4

SK-3	(2022) Meningkatnya pelaksanaan konservasi dan kontribusi kerjasama, jejaring, dan kemitraan untuk mendukung konservasi yang efektif di wilayah kerja LKKPN Pekanbaru (2023) Meningkatnya Jejaring dan Kemitraan untuk Mendukung Konservasi yang Efektif di Wilayah Kerja LKKPN Pekanbaru									
IKU-4	(2022) Kerjasama, jejaring dan/atau kemitraan konservasi yang diinisiasi di wilayah kerja LKKPN Pekanbaru (Kesepakatan) (2023) Kemitraan Konservasi yang Diinisiasi dan/atau Dievaluasi di Wilayah Kerja LKKPN Pekanbaru (Dokumen)									
Realisasi Tahun Sebelumnya			Tahun 2023					Renstra 2020-2024		
2020	2021	2022	Target	Realisasi	% Capaian	Kenaikan dari 2022	Target PK 2023	% Realisasi Thd target PK	Target 2024	% Capaian thd Renstra
3	2	2	1	2	120%	0 (tetap)	1	120	2	120

Berdasarkan tabel capaian diatas dapat disimpulkan:

- Capaian IKU 4 pada tahun 2023 adalah dari target 1 dokumen kemitraan tercapai 2 dokumen kemitraan (realisasi 120% sesuai dengan capaian maksimal pada aplikasi kinerjaku)
- Capaian tahun 2023 jika dibandingkan dengan tahun capaiannya tetap 2 kesepakatan dokumen (kenaikan 0% / tetap).
- Capaian IKU 4 tahun 2023 mencapai target sesuai dengan Restra LKKPN Pekanbaru tahun 2020-2024.

Kemitraan dalam pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan (KKP) merupakan hubungan kerja sama antara dua pihak atau lebih unit organisasi pengelola Kawasan Konservasi Perairan, berdasarkan kesetaraan, keterbukaan, dan saling menguntungkan. Tujuan membangun kemitraan ini untuk mengoptimalkan peran stakeholders terkait dalam pencapaian efektivitas kawasan konservasi. Kemitraan dalam pengelolaan KKP tertuang sebagai amanat dari Peraturan Pemerintah (PP) No 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumberdaya Ikan. Sebagai tindak lanjut dari amanat PP No. 60 Tahun 2007 tersebut, pada tahun 2015 Menteri Kelautan dan Perikanan menerbitkan Peraturan Menteri No. 21 Tahun 2015 tentang Kemitraan Dalam Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan Nasional.

Tabel 13. Kegiatan Yang Mendukung Capaian Indikator Kinerja IKU 3

No	Kegiatan	Lokasi		Progres (%)
		KK Pieh	KK Anambas	
1.	Inisiasi Kemitraan Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan	√	√	100%

Tabel 14. Output dan Outcome Kegiatan Pengelolaan Kawasan Pada IKU 3

No	Kegiatan	Progres Output	Outcome
1.	Inisiasi Kemitraan Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan	Target terdapat 1 Jejaring dan 1 Kemitraan. Kemitraan sudah tercapai 2 yaitu kelompok KOMPAK Anambas dan Pertamina DPPU Sumbagut Padang.	Terdapat Mitra dan Jejaring yang dapat membantu dan besinergis mengelola Kawasan Konservasi Pulau Pieh dan Kepulauan Anambas

Analisis keberhasilan IKU 3 ini adalah dengan menjumlahkan dokumen (draft/final) kesepakatan atau perjanjian jejaring, kemitraan, kerjasama dan/atau konvensi antara pengelola KKPN dengan mitra untuk mendukung kegiatan perlindungan, pelestarian dan pemanfaatan Kawasan dan jenis ikan. Adapun detail kesepakatannya sebagai berikut:

Tabel 15. Rincian Dokumen Kegiatan Pengelolaan Kawasan Pada IKU 3 pada Tahun 2023

No	Nama Kelompok	Judul Kemitraan	Dokumen
1.	PT. Pertamina Patra Niaga DPPU Sumbagut	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Laut di Kawasan Konservasi Pulau Pieh dan Laut Sekitarnya	Nomor Kesepakatan Perjanjian Kemitraan No.B.1640/LKKPN/PRL.4 40/X/2023 dan No.680/PND425000/2-23-S5 pada Hari Rabu (4-10-2023)
2.	Universitas Diponegoro	Pengelolaan Ekowisata Penyu dan Mangrove di Pulau Pahat dan Sanggalong Kawasan Konservasi Kepulauan Anambas	No Kesepakatan masih dalam Draft.

Realisasi Anggaran dan Fisik Indikator Kinerja

Anggaran yang digunakan sama dengan anggaran yang digunakan pada IKU 3 tentang Jejaring.

Tabel 17. Realisasi Anggaran Kegiatan Yang Mendukung Capaian IKU 4

Kegiatan	Pagu (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Penyerapan (%)	Fisik (%)
Inisiasi Kemitraan Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan	100,000,000	99,426,052	99.43 %	100%

Efisiensi Sumber Daya dan Anggaran pada IKU

Kegiatan pada IKU 4 telah dilaksanakan efisiensi:

- Aspek Anggaran : Capaian target fisik terlaporkan 75% akhir tahun akan ada calon mitra di Pieh atau Anambas.
- Aspek SDM (Sumber Daya Manusia) : Efisiensi SDM dilakukan dengan pelibatan menggabungkan tim pelaksana kegiatan jejaring dan kemitraan, dan Bantuan KOMPAK.

Analisis Keberhasilan/Kegagalan IKU

Evaluasi Rincian Kegiatan pada IKU 4 yang telah dilakukan adalah:

- Telah berhasil menginisiasi memulai perbincangan kemitraan dengan perusahaan energi di Anambas, dimana akan mempermudah pendanaan

pembiayaan pengelolaan Kawasan Konservasi dari dana CSR perusahaan tersebut.

Rencana Aksi Tindak Lanjut pada Triwulan Selanjutnya

Tindak Lanjut Rincian Kegiatan pada IKU 3 yang perlu ditindaklanjuti pada Triwulan I 2024 adalah:

- Mengawal dan mengawasi terus *time schedule* keberjalanan Perjanjian Kemitraan setelah ditandatangani agar kegiatan yang sudah disepakati pada kesepakatan dijalankan dan pada proses Monitoring dan Evaluasi.
- Mengontrol pelaporan MonevWAK khususnya pada kegiatan Inisiasi Kemitraan agar capaian realisasi fisik bisa terpantau dan tidak memiliki jarak yang cukup jauh dari capaian realisasi anggaran.

Analisis Program dan Kegiatan Pendukung Keberhasilan Capaian IKU 4

No	Dokumentasi	Kegiatan
1.		(Anambas, 12/12) LKKPN Pekanbaru menandatangani perjanjian kemitraan dengan Komunitas Konservasi Mangrove Penyu Alam dan Karang (KOMPAK) sebagai bentuk komitmen untuk memperkuat efektivitas pengelolaan Kawasan Konservasi Kepulauan Anambas melalui kolaborasi dan pelibatan berbagai stakeholder dan kelompok peduli lingkungan. Kegiatan penandatanganan ini dilakukan secara desk to desk via zoom meeting di dua lokasi yaitu di Kantor UPT LKKPN Pekanbaru di Kota Pekanbaru dan di Kantor Wilker Kawasan Konservasi Kepulauan Anambas di Tarempa.
2.		Padang (4/10) Loka Kawasan Konservasi Perairan Nasional (LKKPN) Pekanbaru melaksanakan penandatanganan dokumen perjanjian kemitraan dengan PT. Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut DPPU Minangkabau sebagai salah satu upaya dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan kawasan konservasi melalui pelibatan dan peran serta para stakeholder di sekitar Kawasan Konservasi Pulau Pieh. Kegiatan ini juga dihadiri secara daring maupun luring oleh perwakilan dari Direktorat KKHL, instansi Provinsi Sumatera Barat, Kota Pariaman, Kabupaten Padang Pariaman, dan KOMPAK Raja Samudera.

3.		(Anambas, 16/09) Memperingati Hari Bersih Dunia (<i>World Cleanup Day</i>) dan upaya melanjutkan komitmen Yayasan Anambas dalam pengelolaan sampah. LKKPN Pekanbaru Bersama Yayasan Anambas melakukan edukasi kepada masyarakat terkait pemilahan sampah dari Rumah Tangga
----	---	--

3.5. Capaian Kinerja Sasaran Kegiatan 5

Sasaran kegiatan 5 LKKPN Pekanbaru adalah Meningkatnya partisipasi dan kapasitas masyarakat dalam mendukung konservasi di wilayah kerja LKKPN Pekanbaru dengan indikator kinerja utama sebagai berikut:

3.5.1. IKU 5. Bantuan pemerintah untuk kelompok masyarakat penggerak konservasi (KOMPAK) di wilayah kerja LKKPN Pekanbaru (Kelompok)

Penilaian IKU 5 dilakukan dengan menjumlahkan seluruh kelompok masyarakat yang diberikan bantuan konservasi selama periode Tahun 2023. Capaian pada IKU ini merupakan **Target Triwulan**, rencana tercapai di semester 1 sebanyak 1 KOMPAK dan semester 2 sebanyak 1 KOMPAK. Keberhasilan untuk mencapai IKU 5 ini adalah dengan menghitung jumlah bantuan KOMPAK (Kelompok Masyarakat Penggerak Konservasi) yang berhasil didistribusikan Dalam melakukan distribusi bantuan KOMPAK selama periode Tahun 2023.

Tabel 17. Target dan Capaian IKU 5 Tahun 2023

SK-4			• Meningkatnya partisipasi dan kapasitas masyarakat dalam mendukung konservasi di wilayah kerja LKKPN Pekanbaru							
IKU-5			• Bantuan pemerintah untuk kelompok masyarakat penggerak konservasi (KOMPAK) di wilayah kerja LKKPN Pekanbaru (Kelompok)							
Realisasi Tahun Sebelumnya			Tahun 2023						Renstra 2020-2024	
2020	2021	2022	Target	Realisasi	% Capaian	Kenaikan dari 2022	Target PK 2023	% Realisasi Thd target PK	Target 2024	% Capaian thd Renstra
2	4	2	2	3	120%	1	2	120	4	75

Berdasarkan tabel capaian diatas dapat disimpulkan:

- Capaian IKU 5 di Tahun 2023 **sudah tercapai yaitu 3 Kelompok Penerima Bantuan Pemerintah KOMPAK dari Target 2 Kelompok penerima bantuan (Presentase capaian 120%)**
- Capaian tahun 2023 jika dibandingkan dengan tahun 2022 **mengalami kenaikan karena sebelumnya tercapai 2 kelompok sementara di tahun 2023 ini tercapai 3 kelompok (Kenaikan 50%).**
- Capaian IKU 5 pada tahun ini lebih kecil dibandingkan dengan target renstra LKKPN Pekanbaru 2024 karena target pada PK hanya 2 kelompok.

Adapun kegiatan pendukung tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 18. Kegiatan Yang Mendukung Capaian Indikator Kinerja IKU 5

No	Kegiatan	Lokasi		Progres (%)
		KK Pieh	KK Anambas	
1.	Bantuan Kepada KOMPAK	√	√	100
2.	Monitoring dan Evaluasi Bantuan KOMPAK 2020-2022	√	√	100

Tabel 14. Output dan Outcame Kegiatan Pengelolaan Kawasan Pada IKU 5

No	Kegiatan	Output	Outcame
1.	Bantuan Kepada Kelompok Masyarakat Penggerak Konservasi	Mendapatkan 3 kelompok penerima (2 Anambas, 1 Pieh)	Memberikan stimulan peningkatan ekonomi masyarakat melalui bantuan 2 KOMPAK di Kawasan Konservasi Pieh dan Anambas
2.	Monitoring dan Evaluasi Bantuan KOMPAK	Telah dilaksanakan Monev Kompak 2021 dan 2022 di Anambas pada bulan Mei dan Pieh Monev KOMPAK pada bulan Juni 2023	Mendorong peran aktif kelompok masyarakat (KOMPAK) untuk memanfaatkan bantuan KOMPAK untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat

Dalam melakukan distribusi bantuan KOMPAK tahun 2023, LKKPN Pekanbaru mengacu pada Acuan KepDirJen PRL No 8 tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Konservasi Tahun 2021. Untuk penerima bantuan kompak 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 19. Daftar Penerima Bantuan KOMPAK Tahun 2023

No	Kelompok	Lokasi	BAST	Jenis Bantuan	Pagu
1	Tabuik Diving Club	Pariaman Utara, Kota Pariaman, Sumatera Barat	B.778/LKKPN/PL.450/V/2023	Set Alat Selam	49.998.500
2	KOMPAK (Komunitas Konservasi Mangrove, Penyu Alam dan Karang)	Tarempa Barat, Kab. Kepulauan Anambas, Kep. Riau	B.1035/LKKPN/P.L.450/VI/2023	Set Alat Selam dan Fotografi Bawah Laut	76.394.400

2	KUB Anggoli	Siantan, Kab. Kepulauan Anambas, Kep. Riau	B.1036/LKKPN/P L.450/VI/2023	Set GPS Perikanan	73.600.000
---	-------------	--	---------------------------------	----------------------	------------

(BAST terlampir dalam lampiran)

Realisasi Anggaran dan Fisik Indikator Kinerja

Tabel 20. Realisasi Anggaran Kegiatan Yang Mendukung Capaian IKU 5

Kegiatan	Pagu (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Penyerapan (%)	Fisik (%)
Bantuan Kepada Kelompok Masyarakat Penggerak Konservasi	252,000,000	251,977,918	99.99 %	100%

Efisiensi Sumber Daya dan Anggaran pada IKU

Kegiatan pada IKU 5 telah dilaksanakan efisiensi :

- Aspek Anggaran dan Waktu : penggunaan anggaran dimana untuk target dari Tahun 2023 sudah sesuai mencapai target dan melebihi 50%, mencapai 100% dan dapat dilihat juga penyerahan bantuan di anambas dan pieh sudah dilaksanakan
- Aspek SDM : Tim yang diberangkatkan untuk pencarian kandidat penerima Bantuan KOMPAK dan Monitoring KOMPAK jumlahnya jauh lebih sedikit dengan penyesuaian pengalaman dan kompetensi pelaksana tidak banyak melibatkan SKPD setempat yang tidak memberikan kontribusi yang maksimal.

Analisis Keberhasilan/Kegagalan IKU

Evaluasi Rincian Kegiatan pada IKU 5 yang telah dilakukan adalah:

- Pelaksanaan kegiatan pada Tahun 2023 sangat baik (kegiatan sudah 100% terlaksana),
- Pelaksanaan kegiatan KOMPAK perlu tetap diperhatikan kembali terkait keberlanjutan barang bantuan tersebut dengan melihatnya dalam komponen kegiatan monitoring dan evaluasi bantuan KOMPAK.

Rencana Aksi Tindak Lanjut pada Triwulan Selanjutnya

Tindak Lanjut Rincian Kegiatan pada IKU 5 yang perlu ditindaklanjuti pada Triwulan I 2024 ini adalah:

- Fokus pada pemberian barang bantuan KOMPAK di Tahun 2023 setelah dilakukan dengan menjaga kegiatan dan penggunaan barangnya untuk pengelolaan kawasan konservasi bermanfaat dengan baik.
- Pemberian Bantuan KOMPAK harus lebih fokus pada monitoring pemberian KOMPAK yang pernah diberikan, karena BP (Bantuan Pemerintah) merupakan Kegiatan Prioritas Nasional.

- Tetap Mengikuti Pedoman Pemberian Bantuan Pemerintah KOMPAK terbaru dengan mengintegrasikannya dengan kegiatan Monev Bantuan KOMPAK.

Analisis Program dan Kegiatan Pendukung Keberhasilan Capaian IKU 4

No	Dokumentasi	Kegiatan
1		Temburun (13/09) Ekosistem Mangrove termasuk 3 ekosistem penting di wilayah pesisir dan pulau pulau kecil, maka usaha untuk melakukan kegiatan perlindungan dan konservasi mangrove sangat didorong dengan serius oleh pemerintah. Di Kepulauan Anambas sendiri, LKKPN Pekanbaru telah melakukan kegiatan pendataan dan monitoring mangrove sejak tahun 2016. Pada kegiatan ini LKKPN Pekanbaru juga mengundang Komunitas Konservasi Penyu, Alam dan Karang "KOMPAK", penerima bantuan pemerintah bidang konservasi tahun 2023. Kelompok KOMPAK ini adalah kelompok masyarakat yang akan dilibatkan oleh Harbour Energy untuk memperkuat pelaksanaan kegiatan pelestarian, perlindungan dan pemanfaatan konservasi mangrove di Pantai Senggalong.

3.6. Capaian Kinerja Sasaran Kegiatan 5

Sasaran kegiatan 5 LKKPN Pekanbaru adalah Meningkatnya nilai PNBP LKKPN Pekanbaru dengan indikator kinerja utama sebagai berikut:

3.6.1. IKU 6. Nilai PNBP LKKPN Pekanbaru (Rp.)

Indikator Kinerja Utama Nilai PNBP LKKPN Pekanbaru ini merupakan IKU baru di tahun 2022 yang dilanjutkan di 2022 yang berlandaskan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak dan Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2022 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan, Penerimaan Negara Bukan Pajak LKKPN Pekanbaru berasal dari tanda masuk kawasan konservasi untuk kegiatan Pendidikan, tanda masuk kawasan konservasi untuk kegiatan penelitian, dan karcis masuk kawasan konservasi untuk kegiatan pariwisata alam perairan.

Realisasi capaian ini merupakan **Target Tahunan**, capaian bersumber dari memorandum KaTimja ke Sesditjen PKRL Nomor: 107/DJPRL.1/TU.220/II/2024 tanggal 11 Januari 2024 (terlampir). dengan Menjumlahkan Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari tanda masuk kawasan konservasi untuk kegiatan

Pendidikan, tanda masuk kawasan konservasi untuk kegiatan penelitian, dan karcis masuk kawasan konservasi untuk kegiatan pariwisata alam perairan di Wilayah Kerja LKKPN Pekanbaru selama satu tahun.

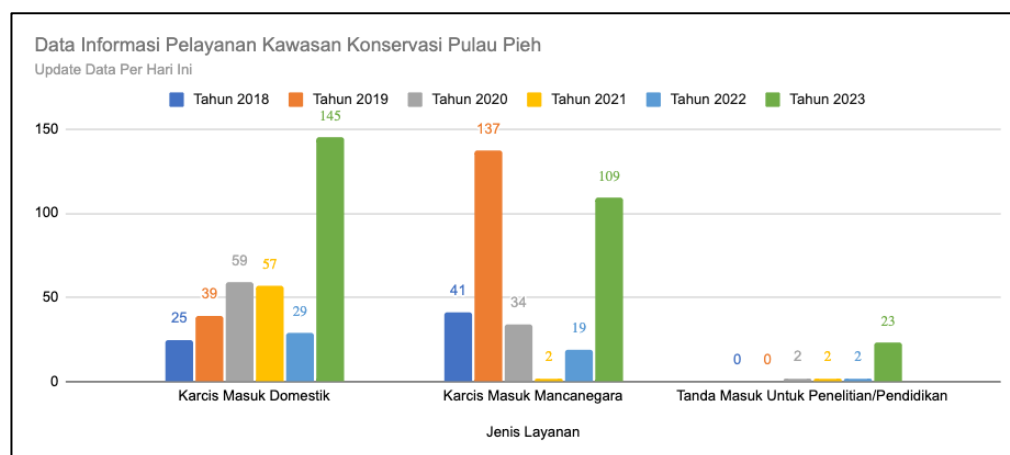
Tabel 21. Capaian Indikator Kinerja Utama 6

SK-5			Meningkatnya nilai PNPB LKKPN Pekanbaru							
IKU-6			Nilai PNPB LKKPN Pekanbaru (000 Rp.)							
Realisasi Tahun Sebelumnya			Tahun 2023						Renstra 2020-2024	
2020	2021	2022	Target	Realisasi	% Capaian	Kenaikan dari 2022	Target PK 2023	% Realisasi Thd target PK	Target 2024	% Capaian thd Renstra
-	-	16.200	13.587	51.958	120	35.858,750	13.587	120	-	-

Berdasarkan tabel capaian diatas dapat disimpulkan:

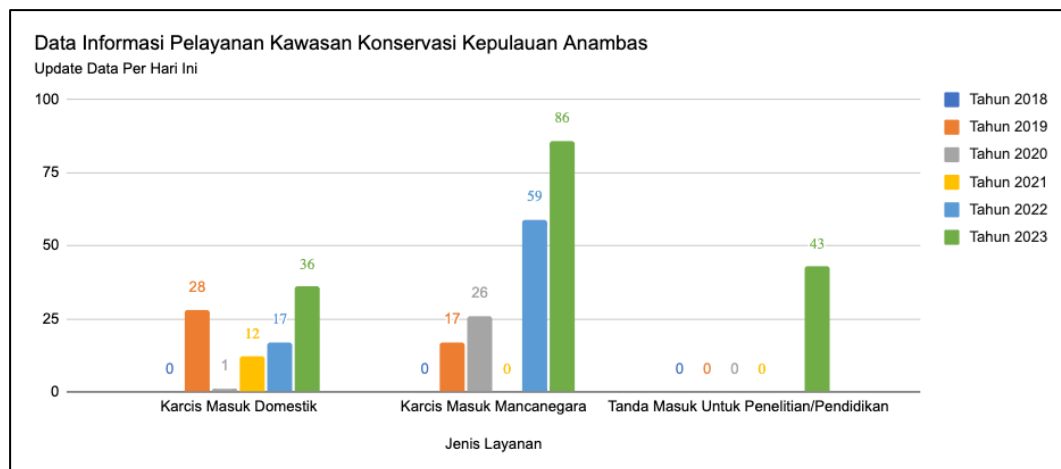
- Capaian IKU 6 jika dilihat dari targetnya **Rp13.587.000 namun berhasil mencapai realisasi Rp51.958.750 (realisasi 120%)**.
- Capaian tahun 2023 jika dibandingkan dengan tahun 2022 **dari Rp16.100.000 tercapai Rp51.958.750 yaitu mengalami kenaikan 35.858.750 (222,7%)**.
- IKU ini tidak terdapat di dalam Renstra LKKPN Pekanbaru tahun 2020-2024 sehingga tidak dapat dibandingkan capaiannya dengan target tahun 2024 pada Renstra LKKPN Pekanbaru tahun 2020-2024

Pemanfaatan kawasan konservasi Pulau Pieh didominasi oleh kegiatan kepariwisataan, semenjak tahun 2020 wisatawan dominan mancanegara semakin berkurang namun wisatawan domestik meningkat, sedangkan untuk kegiatan pemanfaatan lainnya belum begitu terlihat bila dibandingkan dengan kegiatan wisata. Untuk informasi jelasnya terkait kegiatan pemanfaatan Kawasan konservasi di Pulau Pieh dapat dilihat pada Gambar berikut ini.



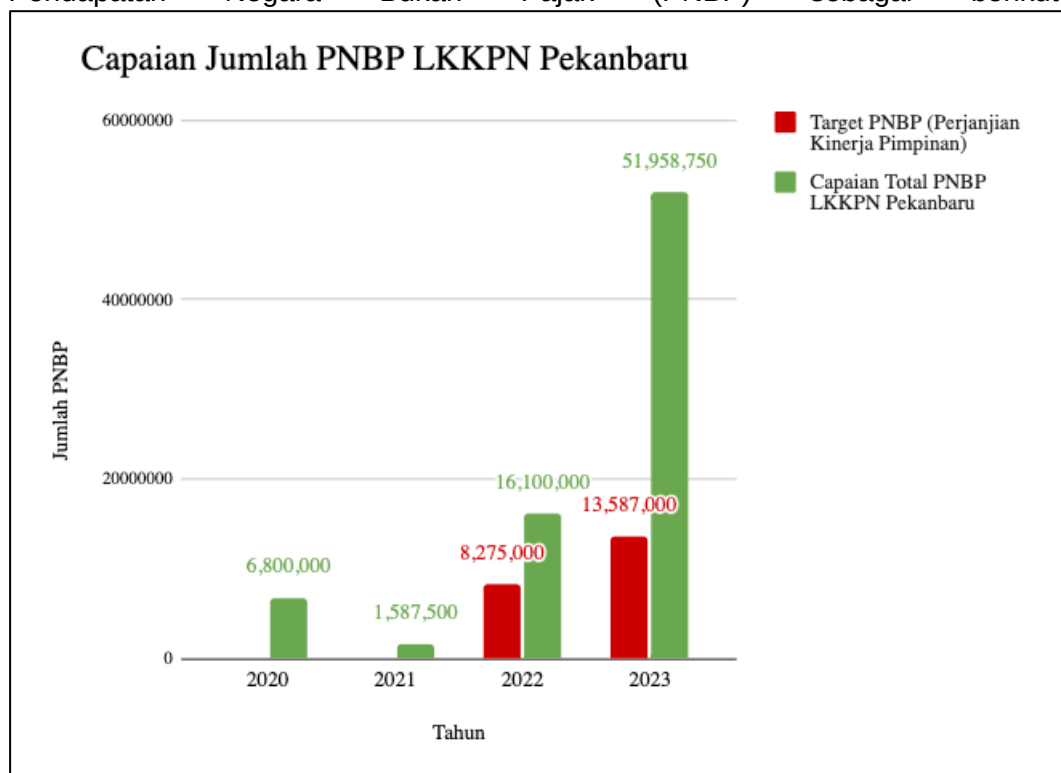
Gambar 7. Tabulasi Jumlah Dokumen Pemanfaatan Kawasan Koonservasi di KK Pieh Tahun 2018 – 2023

Begitu juga dengan Kawasan Konservasi Kepulauan Anambas ada tahun 2022 sd 2023 ini mulai bergerak penerimaan pengguna layanannya dari kegiatan pariwisata.



Gambar 8. Tabulasi Jumlah Dokumen Pemanfaatan Kawasan Konservasi Kepulauan Anambas Tahun 2018 – 2023

Dari upaya pengelolaan tersebut, sampai dengan akhir 2023 mendapatkan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebagai berikut:



Gambar 9. Jumlah Penerimaan PNBP Tahun 2020 s.d 2023

Adapun, berdasarkan tabel realisasi PNBP LKKPN Pekanbaru yang diterima sebesar Rp51.958.750 maka dengan target sebesar Rp13.587.000 maka sudah **mencapai target** (382,42%) per Triwulan IV terjadi peningkatan yang sangat drastis.

Realisasi Anggaran dan Fisik Indikator Kinerja

Tabel 22. Realisasi Anggaran Kegiatan Yang Mendukung Capaian IKU 6

No	Kegiatan	Pagu (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Penyerapan (%)	Fisik (%)
1.	Layanan Perizinan Kawasan Konservasi	200,000,000	199,026,009	99.51 %	100%
2.	Bimtek Peningkatan Mutu Pelayanan Pemanfaatan Kawasan Konservasi dan Sertifikasi ISO 9001:2015 (PNBP)	160,000,000	157,756,215	98.60 %	100%

Efisiensi Sumber Daya dan Anggaran pada IKU

Efisiensi yang dilakukan berkaitan dengan:

- Aspek Anggaran : Capaian fisik kegiatan pelayanan merupakan rutinitas bulanan, telah melampaui diatas 98% adapun anggaran juga telah dimaksimalkan terserap digunakan secara efektif untuk pengembangan Layanan Perizinan di LKKPN Pekanbaru. Kegiatan layanan perizinan dengan memaksimalkan promosi kawasan dengan media video dan media sosial tanpa kegiatan pertemuan yang menggunakan banyak anggaran.
- Aspek SDM : Dengan penggunaan Video dan Media Sosial sehingga SDM yang biasa turun kelapangan secara langsung untuk menjemput pelayanan di Kawasan menjadi berkurang, hanya membutuhkan Tim Humas dan Konsultan Tenaga Ahli pembuat animasi dan video

Analisis Keberhasilan/Kegagalan IKU

Evaluasi Rincian Kegiatan pada IKU 6 yang telah dilakukan adalah:

- Keberhasilan perolehan Total PNBP sampai akhir 2023 sebesar Rp51.958.750 atau sebesar 382,42% dari target yang ditetapkan yaitu sebesar Rp13.587.000.
- Kendala dalam pelaksanaan kegiatan penggunaan anggaran PNBP 2023 antara lain:
 - Adanya kebijakan *automatic adjustment* sehingga kegiatan baru dapat dilaksanakan pada akhir tahun.

Rencana Aksi Tindak Lanjut pada Triwulan Selanjutnya

Tindak Lanjut Rincian Kegiatan pada IKU 6 yang perlu ditindaklanjuti pada Triwulan I 2024 adalah :

- Memaksimalkan kembali sosialisasi dan komunikasi dengan pengguna layanan seperti operator wisata dan institusi penelitian/pendidikan untuk

mempromosikan wisata, penelitian dan pendidikan di Kawasan Konservasi Perairan Nasional Pulau Pieh dan Kepulauan Anambas.

- Melakukan perencanaan Proposal Target dan Penggunaan PNBPN yang lebih realistis dan berdasarkan Data.
- Menyiapkan kegiatan-kegiatan sejak Triwulan I untuk penggunaan dana PNBPN.

Analisis Program dan Kegiatan Pendukung Keberhasilan Capaian IKU 6

No	Dokumentasi	Kegiatan
1.		Denpasar (9/12), Dalam rangka penetapan target penerimaan PNBPN LKKPN Pekangaru 2025-2028 dan Pagu Penggunaannya di tahun 2025, Sekretariat DJPRL memfasilitasi kegiatan Finalisasi Dokumen Proposal Target PNBPN dan Pagu Penggunaannya tersebut di akhir tahun 2023 lingkup Ditjen PKRL. Kegiatan ini dilaksanakan pada 6-8 Desember 2023, di Hotel Garden Inn Ngurah Rai Airport, Provinsi Bali.

3.7. Capaian Kinerja Sasaran Kegiatan 6

Sasaran kegiatan 6 LKKPN Pekanbaru adalah Tatakelola pemerintahan yang baik lingkup LKKPN Pekanbaru dengan indikator kinerja utama sebagai berikut:

3.7.1. IKU 7. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup LKKPN Pekanbaru (Nilai)

Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran pada tahun 2023 merupakan capaian yang diukur **Target Semester**, sehingga penilaiannya terlihat setiap pelaksanaan kegiatan 6 bulan sekali pada Triwulan II dan Triwulan IV. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran LKKPN Pekanbaru mengacu pada Aplikasi Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OMSPAN). Basis data (database) yang digunakan dalam Aplikasi OM-SPAN diambil dari Aplikasi SPAN utama (core SPAN). Berikut target dan capaian IKU 6 LKKPN Pekanbaru. Sebelumnya, target PK 89 namun pada tanggal 6 November 2023 melalui nota dinas Kabiro Keuangan ke Sesditjen PKRL No.1903/SJ.2/TU.210/XI/2023 mengalami perubahan menjadi 93,75 (terlampir).

Tabel 23. Capaian Indikator Kinerja Utama 7

SK-6			Tatakelola pemerintahan yang baik lingkup LKKPN Pekanbaru							
IKU-7			Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) LKKPN Pekanbaru (Nilai)							
Realisasi Tahun Sebelumnya			Tahun 2023						Renstra 2020-2024	
2020	2021	2022	Target	Realisasi	% Capaian	Kenaikan dari 2022	Target PK 2023	% Realisasi Thd target PK	Target 2024	% Capaian thd Renstra
98,28	94,35	93,63	93,75	97,14	103,62	3,21	93,75	103,62	90	107,93

Berdasarkan tabel capaian diatas dapat disimpulkan:

- Capaian nilai IKPA tahun 2023 **dari target 93,75 tercapai 97,14 (realisasi 103,62%)**
- Capaian nilai IKPA 2023 dibandingkan dengan IKPA 2022 **mengalami kenaikan nilai 3,51, dari 93,63 menjadi 97,14.**
- Capaian IKU 7 tahun ini sudah melebihi target tahun 2024 pada Renstra LKKPN Pekanbaru tahun 2020-2024.

Terdapat 4 komponen dalam penilaian meliputi: Kesesuaian Perencanaan dengan Pelaksanaan, Kepatuhan terhadap regulasi, efektifitas pelaksanaan kegiatan dan efisiensi pelaksanaan kegiatan. Empat komponen penilaian tersebut dijabarkan kedalam 8 indikator penilaian dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 24. Tabulasi Nilai Indikator Pelaksanaan Anggaran (IKPA)

No	Indikator	Bobot Penilaian (%)
1	Revisi DIPA	10
2	Deviasi Halaman III DIPA	10
3	Data Kontrak	10
4	Penyelesaian Tagihan	10
5	Pengelolaan UP dan TUP	10
6	Dispensasi SPM	5
7	Penyerapan Anggaran	20
8	Capaian Output	25
Total Nilai		100

Capaian IKPA pada tahun 2023 sebagai berikut:

LOKA KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN NASIONAL PEKANBARU	Nilai	100.00	80.63	100.00	91.00	100.00	99.79	100.00	100.00	97.14	100%	97.14
	Bobot	10	10	20	10	10	10	5	25			
	Nilai Akhir	10.00	8.06	20.00	9.10	10.00	9.98	5.00	25.00			
	Nilai Aspek	90.32		98.16				100.00				

Berdasarkan aplikasi Om-SPAN (<https://spanint.kemenkeu.go.id/>) sampai dengan akhir 2023. Begitu juga sesuai dengan Memorandum semester II sebagai berikut No.100/SJ.2/TU.210/I/2024 tanggal 10 Januari 2024 (terlampir dalam Lampiran) yang menyatakan Nilai IKPA LKKPN Pekanbaru bernilai 97,14.

Realisasi Anggaran dan Fisik Indikator Kinerja

Tabel 25. Realisasi Anggaran Kegiatan Yang Mendukung Capaian IKU 7

No	Kegiatan	Pagu (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Penyerapan (%)	Fisik (%)
1.	Pembayaran gaji dan tunjangan	5,115,913,000	4,868,461,451	95.16 %	100 %
2.	Operasional dan Pemeliharaan Kantor	2,405,400,000	2,394,029,256	99.53 %	100 %

Efisiensi Sumber Daya dan Anggaran pada IKU

Kegiatan pada IKU 7 telah tercapai di Triwulan IV. Dalam data dukung pemenuhan laporan keuangan akan dibukukan di tengah dan akhir tahun. Efisiensi Anggaran yang terlihat kegiatan pendukung IKU memiliki capaian fisik lebih tinggi realisasinya dibandingkan dengan capaian realisasi anggaran.

Adapun akan lebih tinggi lagi efisiensi anggaran jika *Automatic Adjustment* yang sudah direncanakan terlaksana sesuai dengan prediksi.

Analisis Keberhasilan/Kegagalan IKU

Evaluasi Rincian Kegiatan pada IKU 7 yang telah dilakukan adalah:

- Perlu tetap meningkatkan performa pertanggungjawaban anggaran dan kontrak-kontrak agar nilai IKPA maksimal sampai dengan akhir triwulan IV 2023.

Rencana Aksi Tindak Lanjut pada Triwulan Selanjutnya

Tindak Lanjut Rincian Kegiatan pada IKU 7 yang perlu ditindaklanjuti pada Triwulan I 2024 ini adalah:.

- Pada TA 2023 tetap harus meminimalisir terjadinya kesalahan dalam pelaksanaan pencairan anggaran sehingga perlu terus monitor kelengkapan dokumen SPJ, lelang dan kontrak dari mulai substansi dan pelaksana yang akan dilaporkan ke KPPN.
- Membuat rencana penarikan berkala tiap triwulan agar kondisi UP (Uang Persediaan) tidak menghambat keberjalanan kegiatan.

Analisis Program dan Kegiatan Pendukung Keberhasilan Capaian IKU 7

Program dan Kegiatan pada tahun 2023 yang berkaitan dengan Nilai IKPA 2023:

- Memantau aplikasi Omspan (spanint.kemenkeu.go.id)
- Memaksimalkan pelatihan bendahara dan pengelola anggaran di LKKPN Pekanbaru.
- Melakukan pemeriksaan dan dokumen keuangan (Kontrak, TUP, SPM) dan perencanaan anggaran (Kertas Kerja RKAKL) baik sebelum pengajuan revisi atau permohonan pencairan dana.
- Memastikan ketepatan waktu jadwal pengajuan dan pencairan.

3.7.2. IKU 8. Nilai Kinerja Anggaran lingkup LKKPN Pekanbaru (Nilai)

Capaian pada IKU ini merupakan **Target Tahunan sehingga pada Triwulan IV 2023 dilaporkan dimana dari target 82 sudah tercapai 88,46** sesuai nota dinas nomor 84/SJ.2/RC.610/II/2024 tanggal 10 Januari 2024, dimana pengukuran didapatkan dari nilai Aplikasi SMART DJA. Nilai Kinerja anggaran adalah proses menghasilkan suatu nilai capaian kinerja untuk setiap indikator yang dilakukan dengan membandingkan data realisasi dengan target yang telah direncanakan sebelumnya.

Tabel 26. Capaian Indikator Kinerja Utama 8

SK-6			Tatakelola pemerintahan yang baik lingkup LKKPN Pekanbaru							
IKU-8			Nilai Kinerja Anggaran LKKPN Pekanbaru							
Realisasi Tahun Sebelumnya			Tahun 2023						Renstra 2020-2024	
2020	2021	2022	Target	Realisasi	% Capaian	Kenaikan dari 2022	Target PK 2023	% Realisasi Thd target PK	Target 2024	% Capaian thd Renstra
87,41	86,01	87,4	82	88,46	107,88	1,06	82	107,88	89	99,39

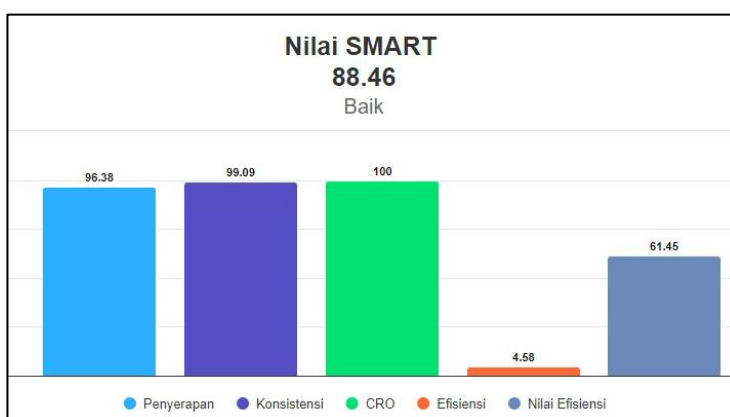
Berdasarkan tabel capaian diatas dapat disimpulkan:

- Capaian IKU ini pada tahun 2023 **dari target 82 tercapai 88,46 (realisasi 107,88%)**.
- Capaian tahun 2023 jika dibandingkan dengan tahun 2022 **dari 87,4 menjadi 88,46 (mengalami kenaikan 1,06)**.
- Capaian tahun 2023 jika dibandingkan dengan Dokumen Rencana Strategis LKKPN Pekanbaru 2020-2024, dengan **target 89 sudah tercapai realisasi 88,46 (persentase realisasi renstranya sebesar 99,39%)**.

Perhitungan Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran didasarkan pada indikator dan bobot sebagai berikut : (1). Capaian Keluaran Kegiatan 43,5%; (2). Efisiensi 28,6%; (3). Konsistensi penyerapan anggaran terhadap perencanaan 18,2%; (4). Penyerapan anggaran 9,7%.

Tabel 27. Perbandingan Target dan Capaian IKU 8 Tahun 2020 - 2023

	Tahun	Target	Realisasi	%
IKU 8	2020	85	87,41	102,8
	2021	86	86,01	100,01
	2022	81	87,40	109,62
	2023	82	88,46	107,88



Adapun pada tahun 2023 Nilai SMART-DJA Triwulan IV adalah 88,46 jika dilihat perkembangannya dalam aplikasi SMART - DJA Kemenkeu sampai dengan Triwulan IV 2023 tersebut, saat ini LKKPN Pekanbaru

juga memiliki nilai efisiensi 61,45 dan efisiensi 4,58 (nilai ini menandakan capaian output anggaran sering melebihi target). Pada Triwulan IV memang secara postur anggaran kebanyakan memiliki target di tahunan sehingga akan terlihat efisiensinya (terlihat banyaknya anggaran yang keluar tanpa menghasilkan output).

Realisasi Anggaran dan Fisik Indikator Kinerja

Tidak ada kegiatan yang berkaitan dengan IKU 8.

Efisiensi Sumber Daya dan Anggaran pada IKU

Kegiatan pada IKU 8 merupakan perhitungan evaluasi anggaran dan capaiannya sampai dengan Triwulan IV 2023 masih berupa progres 88,46 dari 100. Adapun nilai efisiensi sudah cukup baik. Kemudian, efisiensi anggaran akan lebih terlihat kembali jika *Automatic Adjustment* yang sudah direncanakan terlaksana sesuai dengan prediksi.

Analisis Keberhasilan/Kegagalan IKU

Evaluasi Rincian Kegiatan pada IKU 8 yang telah dilakukan adalah:

- Nilai Kinerja Anggaran LKKPN Pekanbaru tahun 2023 senilai 88,46 masih perlu ditingkatkan kembali, karena jika dibandingkan dengan satker DJPKRL nilai NKA masih kurang signifikan dari targetnya.
- Nilai NKA LKKPN tidak masuk dalam 3 besar satker terbaik, sehingga masih perlu ditingkatkan kembali di tahun depan mengenai strategi pelaporan SmartDJA yang dapat menghasilkan nilai NKA maksimal.

Rencana Aksi Tindak Lanjut pada Triwulan Selanjutnya

Tindak Lanjut Rincian Kegiatan pada IKU 8 yang perlu ditindaklanjuti pada adalah melakukan peningkatan performa penyerapan dan pembaharuan perencanaan proses pelaksanaan kegiatan berbasis anggaran dengan memperhatikan *Automatic Adjustment*.

Analisis Program dan Kegiatan Pendukung Keberhasilan Capaian IKU 8

Program dan Kegiatan pada tahun 2023 yang berkaitan dengan Nilai Kinerja Anggaran 2023:

- Memantau aplikasi SmartDJA.
- Memastikan nilai efisiensi setiap kegiatan dimana output diharapkan lebih banyak dibandingkan targetnya atau anggarannya.

3.7.3. IKU 9. Nilai unit kerja berpredikat menuju WBK di wilayah kerja LKKPN Pekanbaru (Nilai)

Capaian pada IKU ini merupakan **Target Tahunan dari target 75 capaiannya 92,49 (masih sama dengan tahun lalu)**. Adapun karena di tahun 2023 tidak ada audit atau monev WBK oleh inspektorat di satker maka nilai yang dilaporkan sesuai dengan nilai akhir yang diberikan oleh TPI (akhir 2022) saat penilaian WBK sebelumnya. Capaian WBK ini sesuai dengan memorandum 02/DJPKRL.1.4/TU.210/20224 tanggal 4 Januari 2024 (terlampir) Wilayah Bebas Korupsi (WBK) adalah sebutan atau predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tata laksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, dan penguatan akuntabilitas kinerja. Penilaian WBK mengacu kepada Pedoman dalam PermenKP Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembangunan dan Penetapan ZI menuju WBK dan WBBM di lingkungan KKP memperoleh hasil penilaian indikator proses dan memenuhi syarat indikator hasil WBK ≥ 75 . Proses pembangunan Zona Integritas LKKPN Pekanbaru telah dimulai pada tahun 2019.

Tabel 29. Capaian Indikator Kinerja Utama 9

SK-6			Tatakelola pemerintahan yang baik lingkup LKKPN Pekanbaru							
IKU-9			Nilai unit kerja berpredikat menuju WBK di wilayah kerja LKKPN Pekanbaru (Nilai)							
Realisasi Tahun Sebelumnya			Tahun 2023						Renstra 2020-2024	
2020	2021	2022	Target	Realisasi	% Capaian	Kenaikan dari 2022	Target PK 2023	% Realisasi Thd target PK	Target 2024	% Capaian thd Renstra
-	94,74	92,49	75	92,49	120	0 (tetap)	75	120	85	120

Berdasarkan tabel capaian diatas dapat disimpulkan:

- Capaian IKU 9 **dari target 75 tercapai 92,49 (realisasi 120%)**.
- Capaian tahun 2023 jika dibandingkan dengan tahun 2022 **tidak mengalami kenaikan karena nilai pemantauan masih dengan penilaian akhir 2022**.

- Capaian IKU 9 jika dibandingkan dengan Dokumen Rencana Strategis LKKPN Pekanbaru 2020-2024 disimpulkan mencapai target. **Targetnya 85 namun dapat tercapai 92,49 (realisasi 120%)**.

Realisasi Anggaran dan Fisik Indikator Kinerja

Adapun rincian pagu dan realisasi anggaran IKU 9 sampai Triwulan IV ini adalah sebagai berikut:

Tabel 30. Realisasi Anggaran Kegiatan Yang Mendukung Capaian IKU 9

Kegiatan	Pagu (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Penyerapan (%)	Fisik (%)
Layanan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan KKP	35,880,000	35,113,668	97.86 %	100

Efisiensi Sumber Daya dan Anggaran pada IKU

Kegiatan pada IKU 9 efisiensi sudah terlihat dimana realisasi fisik penilaian WBK WBBM dari proses penyusunan administrasi hingga penilaian sudah terlaksana 100% dilihat dari selesainya penilaian TPI KKP/Inspektorat V kepada LKKPN Pekanbaru dengan realisasi anggaran kurang dari realisasi fisik.

Ditambah lagi pada 26 September 2022, LKKPN Pekanbaru telah dilaksanakan penilaian WBK WBBM dari KemenPAN RB, dengan metode daring sehingga terdapat efisiensi anggaran dan SDM yang semakin efektif.

Analisis Keberhasilan/Kegagalan IKU

Evaluasi Rincian Kegiatan pada IKU 9 yang telah dilakukan adalah:

- Pemenuhan dokumen WBK/WBBM sudah baik, namun berdasarkan penilaian TPI tahun lalu, perlunya konsistensi pemenuhan dokumenya.

Rencana Aksi Tindak Lanjut pada Triwulan Selanjutnya

Tindak Lanjut Rincian Kegiatan pada IKU 9 yang perlu ditindaklanjuti pada Triwulan I 2024 ini adalah:

- Pada Tahun depan harus menyiapkan pengusulan WBBM Tahun, pasca telah ditetapkan WBK di LKKPN Pekanbaru oleh MenPAN RB.
- Melakukan pengecekan berkala pemenuhan dokumen dan pembaharuan perencanaan proses pemenuhan dokumen WBK/WBBM pelaksanaan

Analisis Program dan Kegiatan Pendukung Keberhasilan Capaian IKU 8

No	Dokumentasi	Kegiatan
1.	  	(Pekanbaru, Padang dan Tarempa 30/09) LKKPN Pekanbaru melakukan lembur untuk menginventarisasi dokumen WBK WBBM guna, memperkenalkan progres WBK WBBM kepada Pak Kepala LKKPN yang baru dan Pegawai LKKPN Pekanbaru yang baru. Setelah rapat pemenuhan tersebut dilanjutkan kegiatan penandatanganan Pakta Integritas simbolik oleh Pak Kepala LKKPN Pekanbaru.

3.7.4. IKU 10. Indeks Profesionalitas ASN lingkup LKKPN Pekanbaru (Indeks)

Capaian pada IKU ini merupakan **Target Semester** pada Triwulan IV/ Semester II ini Nilai IP ASN LKKPN Pekanbaru sudah ada yaitu 90,1 dari target 84. IKU ini merupakan suatu instrumen yang digunakan untuk mengukur secara kuantitatif tingkat profesionalitas pegawai ASN yang hasilnya digunakan untuk penilaian dan evaluasi guna kepentingan pengembangan profesionalitas profesi ASN.

Tabel 31. Capaian Indikator Kinerja Utama 10

SK-6			Tatakelola pemerintahan yang baik lingkup LKKPN Pekanbaru							
IKU-10			Indeks Profesionalitas ASN LKKPN Pekanbaru							
Realisasi Tahun Sebelumnya			Tahun 2023						Renstra 2020-2024	
2020	2021	2022	Target	Realisasi	% Capaian	Kenaikan dari 2022	Target PK 2023	% Realisasi Thd target PK	Target 2024	% Capaian thd Renstra
84,9	84,71	84,54	84	90,1	107,26	5,56	84	107,26	76	118,55

Berdasarkan tabel capaian diatas dapat disimpulkan:

- Capaian IKU 10 pada tahun 2023 **dari target 84 tercapai 90,1 (realisasi 107,26%)**
- Capaian tahun 2023 jika dibandingkan dengan tahun 2022 **terdapat kenaikan 5,56 dari 84,54 menjadi 90,1.**
- Capaian IKU 10 tahun ini sudah melebihi target tahun 2024 pada Renstra LKKPN Pekanbaru tahun 2020-2024.
- Capaian tahun 2023 jika dibandingkan dengan Rencana Strategis LKKPN Pekanbaru 2020-2024 **dari target 76 tercapai 90,1 (realisasi 118,55%).**

Adapun Standar profesionalitas ASN meliputi : (1). Kualifikasi; (2). Kompetensi; (3). Disiplin, dan Kinerja dengan penjelasan sebagai berikut :

1. **Kualifikasi.** Dimensi yang menggambarkan tingkat atau jenjang pendidikan yang dicapai seseorang untuk memperoleh suatu pengetahuan dan atau/keahlian khusus (*body of expert knowledge and skills atau mastery of theoretical knowledge*), sehingga seseorang mengetahui, memahami dan dapat menjalankan pekerjaan tertentu sesuai bidang profesi atau tugas jabatannya.
2. **Kompetensi.** Dimensi yang menggambarkan kemampuan seseorang yang merupakan kombinasi antara pengetahuan (knowledge), keterampilan (skill), dan sikap (attitude) serta didukung dengan program pengembangan kompetensi berkesinambungan (continuiting competence) yang tercermin melalui perilaku kinerja (job behavior) yang dapat diamati, diukur dan dievaluasi.
3. **Kinerja.** Dimensi yang menggambarkan pencapaian sasaran kerja pegawai yang didasarkan perencanaan kinerja pada tingkat individu dan tingkat unit atau organisasi dengan memperhatikan target, capaian, hasil dan manfaat yang dicapai serta perilaku PNS.
4. **Disiplin.** Dimensi yang menggambarkan kesanggupan seorang pegawai untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan kedisiplinan apabila tidak ditaati atau dilanggar, dijatuhi hukuman disiplin langsung maupun tidak langsung berpengaruh terhadap pelaksanaan tugas jabatan.

Berdasarkan penilaian Indeks Profesionalitas ASN, dilakukan pengkategorian tingkat Profesionalitas ASN sebagai berikut:

1. Sangat Tinggi (sangat professional) nilai 91-100
2. Tinggi (cenderung professional) nilai 81-90
3. Sedang (rentan tidak professional) nilai 71-80
4. Rendah (cenderung tidak professional) nilai 61-70
5. Sangat Rendah (sangat tidak professional) nilai <60

Pengolahan atas hasil penilaian IKU akan di lakukan oleh Biro SDM Aparatur melalui aplikasi Dashboard Indeks Profesionalitas ASN pada website <http://ropeg.kkp.go.id:4080/?#/ip-asn/eselon>.

Namun, walaupun IP ASN ini merupakan target semesteran, capaiannya di Triwulan IV sudah dapat dilihat dimana Nilai IP ASN LKKPN Pekanbaru cukup baik

85,16 (tinggi). berikut detail perbandingannya dengan UPT dan Direktorat lingkup DJPRL lain.

Sebelumnya di Triwulan II atau Semester I terdapat surat peenyampaiannya dari eselon I **B.272/DJPKRL.1/KP.720/II/2024 tanggal 12 Januari 2024** (terlampir) terkait Capaian IP ASN Semester I tahun 2023 (terlampir dalam lampiran) dimana nilai LKKPN Pekanbaru 90,1.

Namun jika dipantau dalam aplikasi ropeg.kkp capaian IPASN Triwulan IV berupa:

No	Unit Kerja	Jumlah Pegawai Yang Dihitung	Kualifikasi (bobot 25)		Kompetensi (bobot 40)		Kinerja (bobot 30)		Disiplin (bobot 5)		TOTAL	Keterangan
			IP	Prosentase	IP	Prosentase	IP	Prosentase	IP	Prosentase		
1	SEKRETARIAT DITJEN PENGELOLAAN RUANG LAUT	83	21.71	86.84 %	37.54	93.85 %	24.7	82.33 %	5	100 %	88.95	TINGGI
2	DIREKTORAT PERENCANAAN RUANG LAUT	65	22.03	88.12 %	33.69	84.22 %	26	86.67 %	5	100 %	86.72	TINGGI
3	DIREKTORAT PENDAYAGUNAAN PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	61	22.1	88.4 %	36.15	90.38 %	25.41	84.7 %	5	100 %	88.66	TINGGI
4	DIREKTORAT JASA KELAUTAN	61	21.77	87.08 %	37.31	93.28 %	25.9	86.33 %	5	100 %	89.99	TINGGI
5	DIREKTORAT KONSERVASI DAN KEANEKARAGAMAN HAYATI LAUT	60	21.88	87.52 %	39.03	97.58 %	25	83.33 %	5	100 %	90.91	TINGGI
6	BALAI PENGELOLAAN SD PESISIR & LAUT PADANG	50	20.72	82.88 %	40	100 %	25.1	83.67 %	5	100 %	90.82	TINGGI
7	BALAI PENGELOLAAN SD PESISIR & LAUT PONTIANAK	44	20.84	83.36 %	40	100 %	25	83.33 %	5	100 %	90.84	TINGGI
8	BALAI PENGELOLAAN SD PESISIR & LAUT MAKASSAR	46	21.09	84.36 %	39.8	99.5 %	25	83.33 %	5	100 %	90.89	TINGGI
9	BALAI PENGELOLAAN SD PESISIR & LAUT DENPASAR	48	20.83	83.32 %	39.59	98.98 %	25	83.33 %	5	100 %	90.43	TINGGI
10	LOKA PENGELOLAAN SD PESISIR & LAUT SORONG	30	20.67	82.68 %	38.5	96.25 %	25	83.33 %	5	100 %	89.17	TINGGI
11	BALAI KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN NASIONAL KUPANG	51	20.75	83 %	40	100 %	25.78	85.93 %	5	100 %	91.53	SANGAT TINGGI
12	LOKA KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN NASIONAL PEKANBARU	39	21.13	84.52 %	39.62	99.05 %	24.36	81.2 %	5	100 %	90.1	TINGGI
13	LOKA PENGELOLAAN SD PESISIR & LAUT SERANG	49	20.84	83.36 %	40	100 %	24.49	81.63 %	5	100 %	90.33	TINGGI

Gambar 16. Capaian IP ASN LKKPN Pekanbaru tahun 2023 berdasarkan ropeg.kkp

Realisasi Anggaran dan Fisik Indikator Kinerja

Tabel 32. Realisasi Anggaran Kegiatan Mendukung Capaian IKU 10 IP ASN

No	Kegiatan	Pagu (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Penyerapan (%)	Fisik (%)
1.	Layanan Evaluasi dan Penataan Organisasi di Lingkungan KKP	60,320,000	59,799,342	99.14 %	100 %
2.	Layanan Ketatalaksanaan	390,000,000	389,606,461	99.90 %	100 %

Efisiensi Sumber Daya dan Anggaran pada IKU

Kegiatan pada IKU 9 memiliki:

- Aspek Anggaran : Efisien yang cukup baik karena telah memiliki progres penyerapan lebih dari 99%.
- Aspek SDM : Dalam hal SDM efisiensi yang sudah dilakukan pada kegiatan IKU 2 Terkait EVIKA, yaitu kegiatan In-House Peningkatan SDM Pengelola Kawasan SDM nya beririsan dengan peningkatan IP ASN.

Analisis Keberhasilan/Kegagalan IKU

Evaluasi Rincian Kegiatan pada IKU 10 yang telah dilakukan adalah:

- Terdapat aplikasi, skema dan perhitungan SKP yang baru dari BKN, serta membutuhkan waktu dalam mengukur capaian kinerja.
- Masih kurang maksimalnya nilai IPASN sehingga perlu mendorong pegawai untuk upload sertifikat dalam e-pegawai dan turut mendorong

mengikuti bimtek dan pelatihan, dan terdapat beberapa migrasi perhitungan IP ASN pegawai akibat adanya perputaran Kepala LKKPN Pekanbaru dan mutasi pindahan pegawai LKKPN Pekanbaru dari Pemerintah Daerah Bukittinggi yang nilai SKPnya tidak dapat terkonversi dalam sistem.

Rencana Aksi Tindak Lanjut pada Triwulan Selanjutnya

Tindak Lanjut Rincian Kegiatan pada IKU 10 yang perlu ditindaklanjuti pada Triwulan I 2024 adalah:

- Melakukan monitoring SKP Bulanan dengan menggunakan aplikasi BKN Kinerja yang terbaru. Melakukan monitoring SKP Bulanan dengan menggunakan aplikasi BKN Kinerja yang terbaru.
- Mengawal dan melakukan reminder nilai IP ASN sebelum Semester I dan II 2024 agar target tetap tercapai.
- Melakukan pembaharuan perencanaan pelaksanaan kegiatan dengan memperhatikan manajemen risiko.

Analisis Program dan Kegiatan Pendukung Keberhasilan Capaian IKU 10

No	Dokumentasi	Kegiatan
1.		Pekanbaru (24/07), Dalam rangka penyampaian data target/proyeksi output belanja K/L sebagai bagian dari penyempurnaan proses bisnis berkelanjutan atas mekanisme monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran dan penilaian IKPA, Loka KKPn Pekanbaru mengikuti Bimbingan Teknis Sistem Proyeksi Target Capaian Output Belanja K/L Tahun 2023 Pada Aplikasi Sakti.
2.		Pekanbaru(14/7), untuk mendukung salah satu core values ASN "Berakhlak" yaitu Akuntabel, pada hari Rabu s.d Jumat Tanggal 12-14 Juli 2023 LKKPN Pekanbaru mengikuti kegiatan Workshop dan Verifikasi Pelaporan e-monev Bappenas dan SMART DJA Triwulan II Tahun 2023 melalui daring.

3.7.5. IKU 11. Nilai PM SAKIP Lingkup LKKPN Pekanbaru (Nilai)

Capaian pada IKU ini merupakan **Target Tahunan dimana target 75 sudah tercapai 84,15** sesuai Surat dari Sesditjen PRL kepada Kepala LKKPN No B. 7124/DJPKRL.1/RC.610/XII/2023 tanggal 15 Desember 2023 (terlampir). PM SAKIP lingkup LKKPN merupakan IKM (Indikator Kinerja Manajerial) pengganti dari yang sebelumnya menggunakan penilaian rekonsiliasi kinerja. Nilai PM SAKIP lingkup LKKPN Pekanbaru dihitung berdasarkan PermenPAN dan RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi SAKIP. Terdapat 4 aspek penilaian di dalam evaluasi atas implementasi SAKIP, yakni:

1. Perencanaan kinerja (30%)
2. Pengukuran kinerja (30%)
3. Pelaporan kinerja (15%), dan
4. Evaluasi kinerja (25%).

Pada tahun 2023 ini Nilai PM SAKIP lembar kinerja nya sudah tersedia juga dalam aplikasi (*kinerjaku.kkp.go.id*) sehingga nilai dapat terintegrasi langsung dengan perhitungan NPSS.

Tabel 33. Capaian Indikator Kinerja Utama 11

SK-6			Tatakelola pemerintahan yang baik lingkup LKKPN Pekanbaru							
IKU-11			• (2022) Nilai Rekonsiliasi Kinerja lingkup LKKPN Pekanbaru (Nilai) • (2023) Nilai PM SAKIP lingkup LKKPN Pekanbaru (Nilai)							
Realisasi Tahun Sebelumnya			Tahun 2023						Renstra 2020-2024	
2020	2021	2022	Target	Realisasi	% Capaian	Kenaikan dari 2022	Target PK 2023	% Realisasi Thd target PK	Target 2024	% Capaian thd Renstra
96,14	98,32	96,68	75	84,15	112,20	-12,53	75	112,20	95	88,56

Berdasarkan tabel capaian diatas dapat disimpulkan:

- Capaian IKU 11 **dari target 75 tercapai 84,15 (realisasi 112,2%)**.
- Capaian tahun 2023 jika dibandingkan dengan tahun 2022 **mengalami penurunan 12,53 dimana sebelumnya 96,68 menjadi 84,15**. Hal ini karena 2022 masih menggunakan indikator penilaian Rekonsiliasi Kinerja, sedangkan pada tahun 2023 telah menggunakan indikator penilaian PM SAKIP.
- Pada Rencana Strategis LKKPN Pekanbaru 2020-2024 yang menjadi indikator adalah Nilai Rekonsiliasi Kinerja.
- Pada tahun 2020-2022 Indikatornya adalah Nilai Rekonsiliasi Kinerja namun pada tahun 2023 yang menjadi Indikator adalah Nilai PM SAKIP.

Adapun terdapat cara penilaian PM SAKIP, yang sesuai dengan peraturan terbaru PERMENPAN No.88 Tahun 2021 dan yang diacu oleh Inspektorat Jenderal KKP adalah sebagai berikut:

1. Nilai PM SAKIP lingkup LKKPN Pekanbaru adalah nilai yang dikeluarkan dari hasil Penilaian Mandiri Tim Sekretariat Ditjen PRL.
2. Kategori nilai PM SAKIP yaitu:

Predikat	Nilai	Interpretasi
AA	>90-100	Sangat Memuaskan Telah terwujud <i>Good Governance</i>. Seluruh kinerja dikelola dengan sangat memuaskan di seluruh unit kerja. Telah terbentuk pemerintah yang dinamis, adaptif, dan efisien (<i>Reform</i>). Pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level individu.

Predikat	Nilai	Interpretasi
A	>80-90	Memuaskan Terdapat gambaran bahwa instansi pemerintah/unit kerja dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan berorientasi hasil, karena pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 4/Pengawas/Subkoordinator.
BB	>70-80	Sangat Baik Terdapat gambaran bahwa AKIP sangat baik pada 2/3 unit kerja, baik itu unit kerja utama, maupun unit kerja pendukung. Akuntabilitas yang sangat baik ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi, serta pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 3/koordinator.
B	>60-70	Baik Terdapat gambaran bahwa AKIP sudah baik pada 1/3 unit kerja, khususnya pada unit kerja utama. Terlihat masih perlu adanya sedikit perbaikan pada unit kerja, serta komitmen dalam manajemen kinerja. Pengukuran kinerja baru dilaksanakan sampai dengan level eselon 2/unit kerja.
CC	>50-60	Cukup Terdapat gambaran bahwa AKIP cukup baik. Namun demikian, masih perlu banyak perbaikan walaupun tidak mendasar khususnya akuntabilitas kinerja pada unit kerja.
C	>30-50	Kurang Sistem dan tatanan dalam AKIP kurang dapat diandalkan. Belum terimplementasi sistem manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan mendasar di level pusat.
D	0-30	Sangat Kurang Sistem dan tatanan dalam AKIP sama sekali tidak dapat diandalkan. Sama sekali belum terdapat penerapan manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan/perubahan yang sifatnya sangat mendasar, khususnya dalam implementasi SAKIP.

Realisasi Anggaran dan Fisik Indikator Kinerja

Tabel 34. Realisasi Anggaran Kegiatan Yang Mendukung Capaian IKU 11

No	Kegiatan	Pagu (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Penyerapan (%)	Fisik (%)
1.	Layanan Perencanaan Program dan Anggaran	99,500,000	99,087,602	99.59 %	100 %
2.	Layanan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	83,500,000	83,387,524	99.87 %	100 %

Efisiensi Sumber Daya dan Anggaran pada IKU

Kegiatan pada IKU 11 merupakan Nilai PM SAKIP (terlihat lebih efisien dibandingkan dengan penyerapan anggarannya). Hal tersebut Proses Perencanaan hingga Evaluasi SAKIP dalam organisasi apakah sudah memiliki kesesuaian berdasarkan hukum/aturan yang berlaku. Efisiensi terlihat dimana capaian fisik tinggi 100% dan anggarannya pun sudah cukup tinggi dimana kedua kegiatan diatas 99%.

Analisis Keberhasilan/Kegagalan IKU

Evaluasi Rincian Kegiatan pada IKU 11 yang telah dilakukan adalah pemenuhan dokumen SAKIP perencanaan awal tahun yang sampai dengan saat ini masih berlangsung dan cukup lengkap, hanya saja kedalaman substansi perlu diperinci kembali.

Rencana Aksi Tindak Lanjut pada Triwulan Selanjutnya

Tindak Lanjut Rincian Kegiatan pada IKU 11 yang perlu ditindaklanjuti pada Triwulan I 2024 adalah:

- Perlu memperhatikan pembuatan dokumen SAKIP tepat waktu dan berkualitas agar penyerapan anggaran dan fisik maksimal.
- Antisipasi akan dilaksanakannya Audit SAKIP yang belum dilaksanakan kembali sejak tahun 2020.

Analisis Program dan Kegiatan Pendukung Keberhasilan Capaian IKU 11

Dokumentasi	Kegiatan
	Jakarta (16/06), Penilaian Mandiri SAKIP lingkup Ditjen Pengelolaan Ruang Laut (PRL) dilaksanakan pada tanggal 12 – 15 Juni 2023 di Hotel Yuan Garden Pasar Baru, DKI Jakarta yang diikuti oleh perwakilan tim Biro Perencanaan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, perwakilan Biro Perencanaan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), perwakilan tim Sekretaris Inspektorat Jenderal KKP, perwakilan tim Inspektorat Jenderal III KKP, tim pemantauan, evaluasi dan pelaporan unit pelaksana teknis dan direktorat lingkup Ditjen PRL KKP

3.7.6. IKU 12. Laporan SPIP yang disusun Lingkup LKKPN Pekanbaru (Dokumen)

SPIP merupakan IKU Baru di tahun 2022 yang dilanjutkan di 2023, IKU ini yang sebelumnya pernah ada di tahun 2019 dan 2020. SPIP sendiri adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Dasar hukum Permen KP No.10/tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

Ada pun perhitungan ini dilihat dari ketercapaian UPT dalam menyelesaikan laporan SPIP yang dilaksanakan setiap 1 Triwulan Sekali. Capaiannya adalah sebagai berikut:

Tabel 35. Capaian Indikator Kinerja Utama 12

SK-6			Tatakelola pemerintahan yang baik lingkup LKKPN Pekanbaru							
IKU-12			Laporan SPIP yang disusun Lingkup LKKPN Pekanbaru (Dokumen)							
Realisasi Tahun Sebelumnya			Tahun 2023						Renstra 2020-2024	
2020	2021	2022	Target	Realisasi	% Capaian	Kenaikan dari 2022	Target PK 2023	% Realisasi Thd target PK	Target 2024	% Capaian thd Renstra
-	-	4	4	4	100	0 (tetap)	4	100	-	-

Berdasarkan tabel capaian diatas dapat disimpulkan:

- Capaian IKU 12 adalah **4 dokumen** sesuai dengan target 2023, sehingga presentase capaiannya **100%**.
- Capaian tahun 2023 jika dibandingkan dengan tahun 2022 **adalah 0%(tetap)** karena di tahun 2022 dan 2023 SPIP sama-sama memiliki target dan capaian 4 di akhir tahun.
- IKU ini tidak terdapat pada Dokumen Rencana Strategis LKKPN Pekanbaru 2020-2024 pada target tahun 2024 sehingga tidak dapat dibandingkan capaiannya.

Dalam Laporan SPIP Triwulan I s.d IV sesuai dengan format Permen KP No.10/PERMEN-KP/Tahun 2016 terdapat komponen minimal yang melampirkan: (1) Form Pengendalian Rutin, (2) Form Pengendalian Berkala, (3) Form Monitoring Manajemen Risiko. Adapun, dokumen final SPIP LKKPN Pekanbaru Triwulan IV sebagai data dukung IKU 2023 telah berisikan komponen tersebut dan telah diunggah dalam laman aplikasi Kinerjaku.

Realisasi Anggaran dan Fisik Indikator Kinerja

Tidak ada kegiatan khusus pendukung capaian IKU terpenuhinya Dokumen SPIP LKKPN Pekanbaru sehingga tidak dapat ditunjukkan penyerapan anggarannya. Namun, SPIP ini berkaitan erat dengan Kegiatan pada IKU 10 mengenai Layanan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan.

Efisiensi Sumber Daya dan Anggaran pada IKU

Kegiatan pada IKU 12 sudah melakukan efisiensi karena tidak menggunakan komponen anggaran dalam penyelesaian capaian IKU nya.

Analisis Keberhasilan/Kegagalan IKU

Analisis Keberhasilan dan Kegagalan IKU 12:

- SPIP merupakan perhitungan evaluasi triwulan dengan capaian pada Triwulan IV sudah tercapai dengan klaim Dokumen SPIP Triwulan IV LKKPN Pekanbaru 2022, Triwulan I 2023 dan Triwulan II 2023 dan Triwulan III sd. IV telah diselesaikan tepat waktu sebelum 10 Januari 2024.

Rencana Aksi Tindak Lanjut pada Triwulan Selanjutnya

Tindak Lanjut Rincian Kegiatan pada IKU 12 yang perlu ditindaklanjuti pada selanjutnya adalah:

- Mempertahankan penyelesaian Laporan SPIP triwulan dari periode Triwulan I sampai dengan Triwulan IV 2024.
- Menyelaraskan dokumen SPIP dengan Laporan LKJ agar sejalan dan data yang disajikan lebih akurat

Analisis Program dan Kegiatan Pendukung Keberhasilan Capaian IKU 11

Dokumentasi	Kegiatan
	Jakarta (28/07), Dalam rangka penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun Anggaran 2024, maka perlu dilakukan pengendalian dengan pendekatan Manajemen Risiko (MR) dan Pengendalian Penyusunan Anggaran yang mengacu pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 10 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

3.7.7. IKU 13. Persentase unit kerja LKKPN Pekanbaru yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar (%)

Sistem manajemen pengetahuan terstandar merupakan capaian yang diukur **Target Triwulan dengan capaian Triwulan IV nya berupa 133,33%**, sehingga penilaiannya terlihat setiap pelaksanaan kegiatan 3 bulan sekali. Adapun sampai dengan Triwulan IV capaian IKU ini sudah maksimal 100% dari target 92%. Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur sasaran strategis tersedianya manajemen pengetahuan Ditjen PRL yang handal dan mudah diakses, yaitu: Persentase unit kerja Ditjen PRL yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar. Sistem manajemen pengetahuan adalah suatu rangkaian yang memanfaatkan teknologi informasi yang digunakan oleh instansi pemerintah ataupun swasta untuk mengidentifikasi, menciptakan, menjelaskan, dan mendistribusikan pengetahuan untuk digunakan kembali, diketahui dan dipelajari. Di lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan, teknologi informasi yang digunakan dalam mendukung capaian kinerja tersebut adalah dengan menggunakan aplikasi Portal.kkp yang adapat diakses melalui website maupun smartphone.

Tabel 36. Capaian Indikator Kinerja Utama 13

SK-6			Tatakkelola pemerintahan yang baik lingkup LKKPN Pekanbaru							
IKU-13			Persentase unit kerja LKKPN Pekanbaru yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar (%)							
Realisasi Tahun Sebelumnya			Tahun 2023						Renstra 2020-2024	
2020	2021	2022	Target	Realisasi	% Capaian	Kenaikan dari 2022	Target PK 2023	% Realisasi Thd target PK	Target 2024	% Capaian thd Renstra
100	98,8	100	92	133,33	120	33,33	92	120	90	120

Berdasarkan tabel capaian diatas dapat disimpulkan:

- Capaian IKU 13 tahun adalah **133,33%** dari target tahun ini yaitu **92%**, sehingga presentase capaiannya sebesar **120%**.

- Capaian tahun 2023 jika dibandingkan dengan tahun 2022 **dari 100% menjadi 133,33%**, sehingga mengalami nilai kenaikan **nilai 33,33%**.
- Capaian sebesar **133,33%** jika dibandingkan dengan Dokumen Rencana Strategis LKKPN Pekanbaru 2020-2024 yang memiliki target akhir **90 pada Tahun 2024**, maka presentase capaiannya **120% (sesuai nilai maksimal pada kinerjaku)**.

Indikator penilaian tersebut meliputi (1). ketersediaan dokumen penunjang yang terdiri dari: dokumen manual IKU, dokumen perjanjian kinerja, dokumen laporan kinerja, dan dokumen capaian road map reformasi birokrasi; (2). Keikutsertaan; dan (3). Keaktifan. Adapun perbandingan capaian dengan tahun sebelumnya cenderung meningkat. Realisasi kinerja pada IKU Persentase unit kerja LKKPN Pekanbaru yang menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan Yang Terstandar adalah sebagai berikut:

LKKPN Pekanbaru	
LKKPN Pekanbaru	Keaktifan
Target	3
Realisasi	4
Skor	133,3%
Nilai MP	133,3%
Nilai MP TW I	100,0%
Nilai MP TW II	100,0%
Nilai MP TW III	133,3%
Nilai MP TW IV	133,3%
Rata-Rata Nilai MP	116,7%

Gambar 17. Nilai Pada Masing-Masing Indikator Kinerja Penerapan Manajemen Pengetahuan Yang Terstandar

Sumber perhitungan tersebut merupakan standardisasi penilaian dari bagian Humas Seditjen PRL dari keaktifan tiap-tiap satker, hal ini berdasarkan **Surat Seditjen B.59/DJPKRL.1/TU.210/II/2024 tanggal 4 Januari 2024** (terlampir dalam lampiran).

Realisasi Anggaran dan Fisik Indikator Kinerja

Tidak ada kegiatan khusus pendukung capaian IKU terpenuhinya Manajemen Pengetahuan Terstandar LKKPN Pekanbaru sehingga tidak dapat ditunjukkan penyerapan anggarannya.

Efisiensi Sumber Daya dan Anggaran pada IKU

Kegiatan pada IKU 13 merupakan perhitungan evaluasi triwulan, namun dalam perhitungan efisiensi Sumber Daya tidak terlihat dikarenakan penilaian bersumber dari assesment eselon I. Adapun sampai dengan Triwulan IV 2023 mencapai performa tetap baik (133,33%), indikator ini menggambarkan efektifitas manajemen pengetahuan yang sudah maksimal. Sementara dari tingkat efisiensi anggaran dapat dilihat dari tidak adanya penggunaan anggaran khusus tetapi

dapat memberikan capaian realisasi keberhasilan IKU. Kemudian, aplikasi Portal.kkp juga merupakan aplikasi berbasis web yang tidak berbayar.

Analisis Keberhasilan/Kegagalan IKU

Evaluasi Rincian Kegiatan pada IKU 13 yang telah dilakukan adalah penyebarluasan Informasi Internal dan Eksternal LKKPN Pekanbaru. Hal ini sudah baik dapat dilihat dari tingkat meratanya komponen Bitrix LKKPN Pekanbaru berbagai Subkoordinator memberikan andil penyebarluasan informasi.

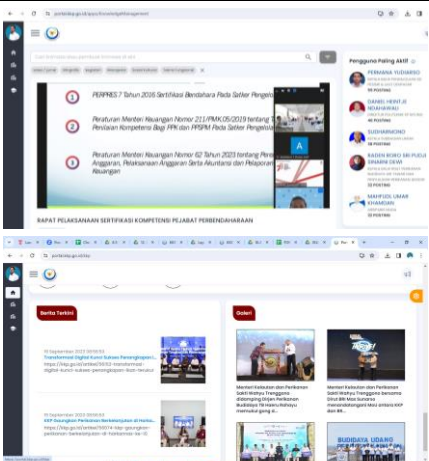
Rencana Aksi Tindak Lanjut pada Triwulan Selanjutnya

Tindak Lanjut Rincian Kegiatan pada IKU 13 yang perlu ditindaklanjuti pada adalah mempertahankan performa baik (133.33%) sampai dengan Triwulan IV .

Analisis Program dan Kegiatan Pendukung Keberhasilan Capaian IKU 12

Program dan Kegiatan pada tahun 2023 yang berkaitan dengan Manajemen Pengetahuan Terstandar adalah:

- Melakukan updating rutin kegiatan Institusi LKKPN Pekanbaru pada laman Portal.kkp khususnya untuk para pejabat struktural dan Ketua Tim Kerja.
- Melakukan koordinasi dengan pihak humas terkait isu-isu kehumasan Menteri, KKP Pusat, DJPRL dan Kebijakannya sampai dengan UPT
- Melakukan pemutakhiran rutin data tahunan untuk informasi PPID dalam website dan kegiatan kehumasan.

Dokumentasi	Kegiatan
	(Pekanbaru 30/09), Pengenalan Aplikasi Portal.kkp yang terintegrasi dengan Colaboration Office tercantum dalam akun e-layar dan email KKP.

3.7.8. IKU 14. Presentase Rekomendasi hasil pengawasan lingkup LKKPN Pekanbaru yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan (%)

IKU ini merupakan capaian yang diukur **Target Triwulan** dan pada Triwulan IV 2023 sudah terdapat capaiannya **yaitu 100% capaian ini tercantum dalam Surat Sesditjen PRL No. B.317/DJPKRL.1/HP.470/II/2024** tanggal 15

Januari 2024 (terlampir dalam lampiran), sehingga penilaiannya terlihat setiap pelaksanaan kegiatan 3 bulan sekali.

Tabel 38. Capaian Indikator Kinerja Utama 14

SK-6			Tatakelola pemerintahan yang baik lingkup LKKPN Pekanbaru							
IKU-14			Presentase Rekomendasi hasil pengawasan lingkup LKKPN Pekanbaru yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan (%)							
Realisasi Tahun Sebelumnya			Tahun 2023						Renstra 2020-2024	
2020	2021	2022	Target	Realisasi	% Capaian	Kenaikan dari 2022	Target PK 2023	% Realisasi Thd target PK	Target 2024	% Capaian thd Renstra
-	100	70	75	100	120	30	75	120	80	120

Berdasarkan tabel capaian diatas dapat disimpulkan:

- Capaian IKU 14 adalah **100%** dari targetnya **75%**, sehingga presentase capaiannya presentasinya yaitu **120%**.
- Capaian tahun 2023 jika dibandingkan dengan tahun 2022 **mengalami kenaikan dari 70% menjadi 100%**.
- Capaian IKU ini sudah mencapai target tahun 2024 pada Rencana Strategis LKKPN Pekanbaru 2020-2024
- Capaian sebesar **100%**, jika dibandingkan dengan Dokumen Rencana Strategis LKKPN Pekanbaru 2020-2024 yang memiliki target akhir 80% **pada Tahun 2024**, maka presentase capaiannya sebesar 120% (sesuai dengan capaian maksimal pada Kinerjaku).

Rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat Jenderal kepada LKKPN Pekanbaru berdasarkan LHP (terbatas pada LHP Audit, Reviu dan Evaluasi) yang telah ditindaklanjuti (berstatus proses dan/atau tuntas) oleh LKKPN Pekanbaru yang menjadi objek pengawasan.

Realisasi Anggaran dan Fisik Indikator Kinerja

Tidak ada kegiatan khusus pendukung capaian IKU presentase hasil pengawasan baru, sehingga tidak dapat ditunjukkan penyerapan anggarannya.

Efisiensi Sumber Daya dan Anggaran pada IKU

Kegiatan pada IKU 14 merupakan perhitungan yang dilakukan penilaian oleh Es I terkait temuan rekomendasi yang belum ditindaklanjuti. Nilai 75% menggambarkan tidak adanya pemeriksaan sehingga nilainya diisikan sesuai target IKU dalam Perjanjian Kinerja..

Analisis Keberhasilan/Kegagalan IKU

Evaluasi Rincian Kegiatan pada IKU 14 beberapa temuan berkaitan dengan aplikasi seapark yang dikaitkan dengan pengembangan aplikasi Dit. KKHL, namun segala rekomendasi temuannya sudah 100% ditindaklanjuti sesuai dengan saran dari Auditor.

Rencana Aksi Tindak Lanjut pada Triwulan Selanjutnya

Tindak Lanjut Rincian Kegiatan pada IKU 14 yang perlu ditindaklanjuti pada adalah:

Perlu tetap mempertahankan performa baik, dengan menanggulangi segala rekomendasi temuan yang ada pada triwulan berikutnya.

Analisis Program dan Kegiatan Pendukung Keberhasilan Capaian IKU 13

Program dan Kegiatan pada tahun 2023 yang berkaitan dengan rekomendasi hasil pengawasan di LKKPN Pekanbaru yang telah dilaksanakan seperti:

No	Dokumentasi	Kegiatan																																																																																				
1.	Lampiran 1 Surat Nomor : B.317/DJPKRL.1/HP.470/I/2024 Tanggal : 15 Januari 2024 Data Rekapitulasi Capaian IKU "Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja Lingkup Kantor UPT Ditjen PKRL." Triwulan IV Tahun 2023 <table><tr><th rowspan="2">No</th><th rowspan="2">Satker</th><th rowspan="2">Rekomendasi (Jumlah)</th><th colspan="2">Tindak Lanjut</th><th colspan="2">Sisa Rekomendasi</th><th rowspan="2">% Capaian IKU</th></tr><tr><th>Jumlah</th><th>(%)</th><th>Jumlah</th><th>(%)</th></tr><tr><td>1</td><td>BKKPN Kupang</td><td>23</td><td>23</td><td>100</td><td>0</td><td>0</td><td>100</td></tr><tr><td>2</td><td>BPSPL Makassar</td><td>50</td><td>50</td><td>100</td><td>0</td><td>0</td><td>100</td></tr><tr><td>3</td><td>BPSPL Padang</td><td>30</td><td>30</td><td>100</td><td>0</td><td>0</td><td>100</td></tr><tr><td>4</td><td>LPSPL Sorong</td><td>23</td><td>23</td><td>100</td><td>0</td><td>0</td><td>100</td></tr><tr><td>5</td><td>LPSPL Serang</td><td>36</td><td>36</td><td>100</td><td>0</td><td>0</td><td>100</td></tr><tr><td>6</td><td>LKKPN Pekanbaru</td><td>19</td><td>19</td><td>100</td><td>0</td><td>0</td><td>100</td></tr><tr><td>7</td><td>BPSPL Denpasar</td><td>32</td><td>32</td><td>100</td><td>0</td><td>0</td><td>100</td></tr><tr><td>8</td><td>BPSPL Pontianak</td><td>23</td><td>23</td><td>100</td><td>0</td><td>0</td><td>100</td></tr><tr><td></td><td></td><td>236</td><td>236</td><td>100</td><td>0</td><td>0</td><td>100</td></tr></table> a.n. Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut, Sekretaris Direktorat Jenderal,  Ditandatangani Secara Elektronik Kusdiantoro	No	Satker	Rekomendasi (Jumlah)	Tindak Lanjut		Sisa Rekomendasi		% Capaian IKU	Jumlah	(%)	Jumlah	(%)	1	BKKPN Kupang	23	23	100	0	0	100	2	BPSPL Makassar	50	50	100	0	0	100	3	BPSPL Padang	30	30	100	0	0	100	4	LPSPL Sorong	23	23	100	0	0	100	5	LPSPL Serang	36	36	100	0	0	100	6	LKKPN Pekanbaru	19	19	100	0	0	100	7	BPSPL Denpasar	32	32	100	0	0	100	8	BPSPL Pontianak	23	23	100	0	0	100			236	236	100	0	0	100	(Pekanbaru, 15/01) telah diterima Nilai Hasil Pengawasan yang diselesaikan Rekomendasinya. LKKPN Pekanbaru Triwulan IV sudah menindaklanjuti rekomendasi yang perlu diselesaikan. Oleh karena itu, capaiannya bernilai diatas target 75% yaitu 100%.
No	Satker				Rekomendasi (Jumlah)	Tindak Lanjut		Sisa Rekomendasi		% Capaian IKU																																																																												
		Jumlah	(%)	Jumlah		(%)																																																																																
1	BKKPN Kupang	23	23	100	0	0	100																																																																															
2	BPSPL Makassar	50	50	100	0	0	100																																																																															
3	BPSPL Padang	30	30	100	0	0	100																																																																															
4	LPSPL Sorong	23	23	100	0	0	100																																																																															
5	LPSPL Serang	36	36	100	0	0	100																																																																															
6	LKKPN Pekanbaru	19	19	100	0	0	100																																																																															
7	BPSPL Denpasar	32	32	100	0	0	100																																																																															
8	BPSPL Pontianak	23	23	100	0	0	100																																																																															
		236	236	100	0	0	100																																																																															

3.7.9. IKU 15. Persentase Penyelesaian Temuan lingkup LKKPN Pekanbaru

Capaian pada IKU ini merupakan **Target Tahunan dimana dari target 100% sudah tercapai 100%** dimana pengukuran tiap triwulannya tidak dilaporkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) merupakan dokumen pemeriksaan yang dikeluarkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang disusun untuk memenuhi Pasal 18 UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Penyusunan laporan keuangan LKKPN Pekanbaru mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Tabel 39. Capaian Indikator Kinerja Utama 15

SK-6			Tatakelola pemerintahan yang baik lingkup LKKPN Pekanbaru							
IKU-15			Persentase penyelesaian temuan lingkup LKKPN Pekanbaru (%)							
Realisasi Tahun Sebelumnya			Tahun 2023						Renstra 2020-2024	
2020	2021	2022	Target	Realisasi	% Capaian	Kenaikan dari 2022	Target PK 2023	% Realisasi Thd target PK	Target 2024	% Capaian thd Renstra
100	100	100	100	100	100	0 (tetap)	100	100	100	100

Berdasarkan tabel capaian diatas dapat disimpulkan:

- Capaian IKU 15 **targetnya 100% dan sudah tercapai 100% (realisasi 100%) karena tidak adanya temuan BPK dan telah membantu data dukung permintaan BPK di level Direktorat.**
- Capaian tahun 2023 jika dibandingkan dengan tahun 2022 **kenaikannya tetap, karena dari 100 dan pada akhir 2023 tetap 100.**
- Capaian IKU 15 jika dibandingkan dengan Dokumen Rencana Strategis LKKPN Pekanbaru 2020-2024 disimpulkan mencapai target. Dengan **target 100%, dapat tercapai 100% (realisasi 100%).**

Sampai Triwulan IV tahun 2023 di LKKPN Pekanbaru tidak ada audit keuangan dari BPK RI.

Realisasi Anggaran dan Fisik Indikator Kinerja

Kegiatan pendukung capaian IKU presentase penyelesaian temuan LKKPN Pekanbaru adalah sebagai berikut:

Tabel 40. Kegiatan Pendukung IKU 15

No	Kegiatan	Pagu (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Penyerapan (%)	Fisik (%)
1.	Penyusunan Laporan SABMN dan Penghapusan Aset	65,900,000	65,292,196	99.08 %	100 %
2.	Penyusunan Laporan SAK	64,900,000	64,605,532	99.55 %	100 %

Efisiensi Sumber Daya dan Anggaran pada IKU

Kegiatan pada IKU 15 merupakan penyelesaian LHP BPK dan Audit lainnya. Sehingga keberlangsungan sampai saat ini masih baik dan efisien karena tidak adanya temuan audit.

Analisis Keberhasilan/Kegagalan IKU

Evaluasi Rincian Kegiatan pada IKU 15 yang telah dilakukan adalah:

- LHP BPK dan Audit lainnya pada Triwulan IV2023 masih belum ada, sehingga evaluasi lebih kepada persiapan penyelesaian jika terdapat temuan audit.

Rencana Aksi Tindak Lanjut pada Triwulan Selanjutnya

Tindak Lanjut Rincian Kegiatan pada IKU 15 yang perlu ditindaklanjuti pada Triwulan I 2024 adalah:

- Perlu tetap menyiapkan dokumen keuangan yang baik dan sesuai serta dukungan WBK WBBM dari Pokja 1-6 secara rutin, pembuatan laporan keuangan rutin, dan BMN untuk mengantisipasi jika ada audit BPK dan Inspektorat kembali.

Analisis Program dan Kegiatan Pendukung Keberhasilan Capaian IKU 14

Program dan Kegiatan pada tahun 2023 yang berkaitan dengan Nilai Temuan LHP BPK dan Temuan Audit lainnya:

- Melakukan updating info Laporan Keuangan dan BMN Kantor LKKPN Pekanbaru sampai dengan Triwulan IV.
- Melakukan koordinasi secara berkala dengan Sesditjen PRL terkait isu rencana audit pemeriksaan BPK.

3.7.10. IKU 16. Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan Bantuan Pemerintah Lingkup LKKPN Pekanbaru (%)

Capaian pada IKU ini merupakan **Target Tahunan dari target 77,5 tercapai 92,5** sesuai dengan Memorandum nomor 3027/DJPKRL.1/HP.410/XII/2023 tanggal 19 Desember 2023 (terlampir). Adapun nilai ini merupakan suatu ukuran atas kesesuaian antara rencana (kebutuhan) dan realisasi kegiatan prioritas/strategis dalam bentuk bantuan dari KKP kepada masyarakat kelautan dan perikanan dan/atau kegiatan yang bersifat strategis berdasarkan kriteria-kriteria yang telah ditetapkan.

Kriteria kegiatan prioritas/strategis antara lain:

- a) memiliki dampak langsung dan besar kepada masyarakat;
- b) memiliki anggaran besar;
- c) mendukung secara langsung pencapaian agenda pembangunan nasional;
- d) mendukung pencapaian prioritas nasional;
- e) merupakan arahan direktif presiden; dan/atau
- f) pertimbangan lainnya.

Evaluasi tingkat efektivitas pelaksanaan kegiatan prioritas/strategis terhadap pelaksanaan kegiatan prioritas/strategis yang dilaksanakan pada satu tahun sebelum periode pengukuran (T-1).

Tabel 41. Capaian Indikator Kinerja Utama 16

SK-6			Tatakelola pemerintahan yang baik lingkup LKKPN Pekanbaru							
IKU-16			Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan Bantuan Pemerintah lingkup LKKPN Pekanbaru (%)							
Realisasi Tahun Sebelumnya			Tahun 2023						Renstra 2020-2024	
2020	2021	2022	Target	Realisasi	% Capaian	Kenaikan dari 2022	Target PK 2023	% Realisasi Thd target PK	Target 2024	% Capaian thd Renstra
-	100	100	77,5	92,5	119,35	-7,5	77,5	119,35	75,5	120

Berdasarkan tabel capaian diatas dapat disimpulkan:

- Capaian IKU 16 **dari target 77,5 tercapai 92,5 (realisasi 119,35).**
- Capaian tahun 2023 jika dibandingkan dengan tahun 2022 **mengalami penurunan 7,5 karena dari yang sebelumnya 100 menjadi 92,5.**
- Capaian IKU 15 tahun ini sudah mencapai target tahun 2024 pada Renstra LKKPN Pekanbaru tahun 2020-2024.
- Capaian IKU 16 jika dibandingkan dengan Dokumen Rencana Strategis LKKPN Pekanbaru 2020-2024 disimpulkan mencapai target. **Targetnya 75,5 namun dapat tercapai 92,5.**

Ruang lingkup evaluasi adalah kegiatan prioritas atau bantuan pemerintah yang dilaksanakan pada tahun 2023 dengan focus pengukuran pemanfaatannya, yaitu: bantuan konservasi. Metode Evaluasi yang dilaksanakan adalah:

1. Desk Evaluation, yaitu penelaahan dokumen yang terdiri dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berbagai dokumen yang berkaitan dengan persiapan pelaksanaan kegiatan untuk mengidentifikasi kelemahan sistem pengendalian intern yang dilaksanakan oleh pengelola program/kegiatan.
2. Field Evaluation dan Physical Check (pemeriksaan fisik dan uji substansi), yaitu melakukan pengecekan lapangan terhadap kriteria kesesuaian bantuan pemerintah. Pengambilan uji petik pengecekan lapangan harus mempertimbangkan:
 - a. Keterwakilan setiap jenis bantuan pemerintah yang ada di lokasi provinsi/kabupaten/kota.
 - b) Jumlah sampel memperhatikan keragaman karakter kelompok.
 - c) Melakukan penghitungan dengan rumus yang sudah ditentukan.

Realisasi Anggaran dan Fisik Indikator Kinerja

Tabel 42. Realisasi Anggaran Kegiatan Yang Mendukung Capaian IKU 16

Kegiatan	Pagu (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Penyerapan (%)	Fisik (%)
Monitoring dan Evaluasi Bantuan KOMPAK	48,000,000	47,774,109	99.53 %	80%

Efisiensi Sumber Daya dan Anggaran pada IKU

Kegiatan pada IKU 16 menggunakan kriteria penilaian dari Inspektorat KKP dan dilakukan penilaian internal lingkup PRL oleh Sesditjen. Adapun hasilnya cukup baik dan efektif efisien pemberian bantuan KOMPAK lingkup LKKPN Pekanbaru, output harga barang bantuan rata-rata kurang dari pagu atas bantuan namun memiliki dampak yang baik untuk masyarakat.

Efisiensi SDM juga dilaksanakan karena SDM Personil IKU ini berkaitan juga dengan IKU 4 terkait Pemberian Bantuan KOMPAK, sehingga personil jauh lebih sedikit dan efisien.

Analisis Keberhasilan/Kegagalan IKU

- Evaluasi Rincian Kegiatan pada IKU 16 yang telah dilakukan adalah: Penilaian Mandiri telah dilaksanakan bagi penerima KOMPAK di LKKPN Pekanbaru baik Kawasan Konservasi Pulau Pieh dan Kepulauan Anambas memiliki nilai maksimal yaitu 100, namun belum ada tindak lanjut lagi dari Inspektorat.

Rencana Aksi Tindak Lanjut pada Triwulan Selanjutnya

Tindak Lanjut Rincian Kegiatan pada IKU 16 yang perlu ditindaklanjuti pada Triwulan I 2024 adalah:

- Berkoordinasi dengan pihak inspektorat dan sesditjen PRL untuk mendapatkan saran dan masukan terkait penilaian Efektivitas Bantuan Pemerintah.
- Tetap melaksanakan kegiatan monev KOMPAK rutin setiap tahunnya untuk memastikan capaian IKU berikut.

Analisis Program dan Kegiatan Pendukung Keberhasilan Capaian IKU 15

Kegiatan turun lapangan untuk penilaian bantuan KOMPAK dan kegiatan bersama yang berkaitan dengan peningkatan keberlanjutan barang bantuan kompak adalah sebagai berikut:

No	Dokumentasi	Kegiatan
1.		Padang (7/12), LKKPN Pekanbaru melakukan pendampingan kepada KOMPAK Raja Samudera untuk menangani sampah yang berasal dari Pulau Bando, Kawasan Konservasi Pulau Pieh. Sampah seberat 32 kilogram yang dikumpulkan pada bulan Oktober-Desember oleh enumerator penyu didominasi dari sampah botol plastik.

3.8. Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran tahun 2023 berdasarkan data Aplikasi SAKTI dan OmSPAN dari anggaran yang bisa digunakan Keuangan sebesar **97,84%** atau **Rp12.526.034.773** dari total pagu sebesar **Rp12.802.333.000**. Kemudian, ada anggaran yang sebelumnya diblokir (**terkena Automatic Adjustment**) sebesar **Rp1.543.760.000** namun sudah dihapuskan dan tidak mempengaruhi penyerapan.

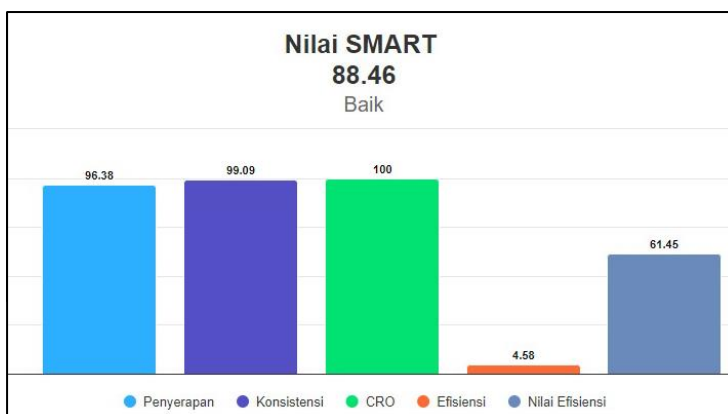
Tabel 41. Rincian Realisasi dan Efisiensi Anggaran dari OMSPAN TA 2023

Uraian	Kegiatan Teknis Perlindungan dan Pemanfaatan Kawasan	Kegiatan Teknis Perencanaan Ruang Laut	Program Dukungan Manajemen	Total
Pagu	4,081,020,000	400,000,000	8,321,313,000	12,802,333,000
Realisasi	4,068,341,800	398,309,941	8,059,382,032	12,526,034,773
Sisa / Efisiensi	12,678,200	1,690,059	261,929,968	276,298,227
% Realisasi	99.69%	99.58%	96.85%	97,84%

Akuntabilitas Keuangan

Secara keseluruhan realisasi dari anggaran yang bisa dipakai sudah cukup baik karena jika dilihat capaiannya dalam persen **97,84% (lebih dari 95%)**

Berdasarkan tabel rincian realisasi dan efisiensi anggaran di atas dapat dilihat presentase penyerapan Kegiatan Teknis Perlindungan dan **Pemanfaatan Kawasan** sudah sangat **baik perlu dipertahankan (99.69%)** dan **Kegiatan Teknis Perencanaan Ruang Laut** juga dalam kategori **sangat baik (99.58%)** perlu ditingkatkan kembali di Triwulan I-IV Tahun 2023, sementara **Dukungan Manajemen** masih **perlu ditingkatkan (96.85%)** walau **sudah sangat baik di Triwulan IV 2023**.



Namun, berdasarkan output Nilai Kinerja Anggaran dalam Aplikasi SMART-DJA Kemenkeu sampai dengan Triwulan IV 2023 di LKKPN Pekanbaru sudah maksimal (**cukup baik**) nilai **88,46** dari 100, dengan **Efisiensi (61,45)** dan Nilai

Efisiensi (4,58) karena banyak dari **Realisasi Volume Output LKKPN Pekanbaru** yang tercapai dan terlihat efisiensinya pada akhir tahun sehingga kenaikan NKA ini terjadi cukup drastic di Triwulan IV.

Jika dibandingkan dengan NPSS akhir tahun 2023 dengan unit kerja sejenis yaitu dengan BKKPN Kupang dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 42. Perbandingan Capaian IKU dengan Unit Kerja Sejenis

No	Indikator Kinerja	NKO (%)		Selisih	Keterangan
		BKKPN Kupang	LKKPN Pekanbaru		
1	Dokumen Operasionalisasi Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut yang disusun di wilayah kerja (Dokumen)	100	100	0	Sama
2	Persentase Peningkatan Nilai Efektivitas Kawasan Konservasi Nasional Wilayah Kerja (%)	120	120	0	Sama
3	Jejaring Konservasi yang Diinisiasi di Wilayah Kerja (Dokumen)	100	100	0	Sama
4	Kemitraan Konservasi yang Diinisiasi di Wilayah Kerja (Dokumen)	120	120	0	Sama
5	Bantuan Pemerintah Untuk Kelompok Masyarakat Penggerak Konservasi (KOMPAK) di Wilayah Kerja (Kelompok)	120	120	0	Sama
6	Nilai PNBP (Rp.000)	120	120	0	Sama
7	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) (Nilai)	106,05	103,62	2,43	BKKPN Kupang Lebih Tinggi
8	Nilai Kinerja Anggaran (Nilai)	115,22	107,88	7,34	BKKPN Kupang Lebih Tinggi
9	Nilai Unit Kerja Berpredikat Menuju WBK di Wilayah Kerja (Nilai)	120	120	0	Sama
10	Indeks Profesionalitas ASN (Indeks)	108,96	107,26	1,64	BKKPN Kupang Lebih Tinggi
11	Nilai PM SAKIP (Nilai)	117,60	112,20	5,40	BKKPN Kupang Lebih Tinggi
12	Laporan SPIP yang Disusun Lingkup (Dokumen)	100	100	0	Sama
13	Persentase Unit Kerja yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar (%)	120	120	0	Sama
14	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dokumen Tindak Lanjutnya telah Dilengkapi dan Disampaikan (%)	120	120	0	Sama
15	Persentase Penyelesaian Temuan LHP BPK (%)	100	100	0	Sama
16	Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan Bantuan Pemerintah (%)	120	119,35	1,29	BKKPN Kupang Lebih Tinggi

No	Indikator Kinerja	NKO (%)		Selisih	Keterangan
		BKKPN Kupang	LKKPN Pekanbaru		
	Nilai Kinerja Organisasi	113,95	113,63	0,32	BKKPN Kupang Lebih Tinggi

Berdasarkan tabel diatas secara keseluruhan NKO LKKPN Pekanbaru lebih rendah dari BKKPN Kupang hanya selisih 0,32. NKO dibandingkan dengan BKKPN karena unit kerja dengan IKU sejenis

BAB IV. PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Laporan Kinerja LKKPN Pekanbaru Tahun 2023 merupakan bentuk pertanggungjawaban dari pelaksanaan rencana strategis LKKPN Pekanbaru 2020-2024 dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Pengukuran capaian kinerja LKKPN Pekanbaru dilakukan dengan cara membandingkan antara target (rencana) dan realisasi indikator kinerja utama pada masing-masing perspektif. Pencatatan dan pengukuran kinerja dilakukan dengan bantuan perangkat lunak berbasis *balance scorecard* dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, yaitu pada <http://kinerjaku.kkp.go.id>. Kinerja LKKPN Pekanbaru terdiri atas 16 IKU.

Pelaksanaan program kegiatan tahun anggaran 2023 telah berjalan dengan baik meskipun terdapat hambatan dan kekurangan, namun hal tersebut tidak mengurangi semangat dan konsistensi dalam pengelolaan kawasan konservasi perairan nasional khususnya di KKPN KK Pulau Pieh dan KKPN KK Kepulauan Anambas. Dua hal penting yang menjadi kesimpulan dalam LKJ LKKPN Pekanbaru Tahun 2023 Triwulan IV adalah sebagai berikut:

1. Seluruh target jika dibandingkan capaian **IKU dan IKM** pada tahun **2023** adalah **IKU 1** (target 3 dokumen perizinan Pemanfaatan Ruang Laut tercapai 3 dokumen), **IKU 2** (target rata-rata kenaikan EVIKA 5% tercapai 6,615%), **IKU 3** (target 1 jejaring tercapai 1 jejaring), **IKU 4** (target 1 kemitraan tercapai 2 kemitraan), **IKU 5** (target 2 KOMPAK tercapai 3 Kelompok KOMPAK), **IKU 6** (target Nilai PNPB 13,587 juta tercapai 51,958 juta), **IKU 7** (target IKPA 93,75 tercapai 97,14), **IKU 8** (target NKA 82 tercapai 88,46), **IKU 9** (target WBK 75 tercapai 92,49), **IKU 10** (target IP-ASN 84 tercapai 90,10), **IKU 11** (target Nilai PM SAKIP 75 tercapai 84,15), **IKM 12** (target 4 dokumen SPIP tercapai 4 dokumen), **IKM 13** (target 92% presentase manajemen pengetahuan terstandar tercapai 133,3% pesentase MP), **IKM 14** (target 75% rekomendasi hasil pengawasan tercapai 100% persentase tindak lanjut temuan), **IKU 15** (target Penyelesaian Temuan target 100% tercapai 100%), dan **IKU 16** (target Efektivitas Bantuan Pemerintah target 77,5 tercapai 92,5). NPSK (Nilai Pencapaian Sasaran Kegiatan) **Kinerjaku Loka KKPN Pekanbaru tahun 2023 menjadi : 113,63% (Istimewa)**.
2. **Anggaran tahun 2023** LKKPN Pekanbaru dari pagu sebesar **Rp13.571.313.000**. Kemudian, terdapat penambahan anggaran bersumber **PNBP sebanyak Rp774.780.000** sehingga **total pagu LKKPN Pekanbaru Rp14.346.093.000**. Dari total pagu tersebut, terdapat sejumlah anggaran yang masih **diblokir** akibat kebijakan **Automatic Adjustment (AA)** sebesar **Rp1.543.760.000**. Total Pagu yang dapat dilaksanakan pada tahun 2023 sebesar **Rp12.802.333.000**. Realisasi dari pagu **DIPA total sampai akhir tahun 2023 sebesar Rp12.526.034.773 atau sebesar (97,84%)**.

Berdasarkan capaian kinerja LKKPN Pekanbaru tersebut **beberapa tantangan** yang perlu diperhatikan adalah:

1. Peningkatan kepatuhan atas *time schedule* kegiatan yang telah disusun agar pelaksanaan kegiatan tidak menumpuk di Triwulan IV, namun dapat didistribusikan pada Triwulan I sd. III.
2. Kapasitas dan kompetensi SDM secara periodik perlu terpantau dan ditingkatkan untuk menunjang kinerja kegiatan bisa juga berdampak pada IP ASN LKKPN Pekanbaru yang tergolong rendah, karena saat ini masih terdapat pegawai yang memiliki IP-ASN rendah.
3. Sinkronisasi perencanaan target PNBPN 2024 dan TOR/RAB Penggunaan PNBPN dari kegiatan yang masih kurang maksimal pelaksanaannya di 2024 atau masih belum terlaksana akibat kebijakan *Automatic Adjustment*.

4.2. Tindak Lanjut

Berdasarkan rekomendasi LKj 2022 lalu terdapat beberapa poin yang perlu ditindaklanjuti diantaranya:

No	Rekomendasi LKj periode sebelumnya	Tindak Lanjut yang dilaksanakan di Triwulan IV 2023
1.	Peningkatan kepatuhan Time Schedule kegiatan yang telah disusun agar pelaksanaan kegiatan sesuai dengan target.	Telah dilaksanakannya Rapat Internal peningkatan RPD Penyerapan Akhir 2023 dan Capaian Kinerja sesuai surat Kepala LKKPN Pekanbaru kepada seluruh pegawai No. B.2101 /LKKPN/TU.330/XII/2023 tanggal 18 Desember 2023.
2.	Upaya peningkatan penerimaan PNBPN dan inventarisasi kegiatan percepatan pelaksanaannya.	Telah rutin mengikuti rapat koordinasi monev PNBPN dari Keuangan PRL dan KKHL untuk aplikasi SEAPARK di Bulan November sesuai surat B.6639 /DJPRL.1/TU.210/XI/2023 tanggal 27 November 2023 dan Desember 2023 sesuai surat Sesditjen PRL B. 7335/DJPRL.1/TU.330/XII/ 2023 tanggal 28 Desember 2023

4.3. Rekomendasi

Sementara, dari capaian kinerja yang telah dilaksanakan, beberapa hal yang dapat menjawab tantangan tersebut dan/atau dilaksanakan pada laporan kinerja mendatang, yaitu:

1. Peningkatan kepatuhan atas *Time Schedule* Kegiatan yang telah disusun agar pelaksanaan kegiatan sesuai dengan target yang telah ditetapkan
2. Upaya peningkatan penerimaan PNBPN dan invetarisasi kegiatan penggunaan PNBPN dan percepatan pelaksanaannya.

LAMPIRAN I

1. PK LKKPN Pekanbaru (9 Januari 2023)



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL
PENGELOLAAN RUANG LAUT**

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3520357
LAMAM www.kkp.go.id SUREL sespridinjenprl@kkp.go.id

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
LOKA KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN NASIONAL (LKKPN)
PEKANBARU**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fajar Kurniawan

Jabatan : Kepala Loka Kawasan Konservasi Perairan Nasional Pekanbaru

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Victor Gustaaf Manoppo

Jabatan : Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 9 Januari 2023

Pihak Kedua
Direktur Jenderal
Pengelolaan Ruang Laut

Victor Gustaaf Manoppo

Pihak Pertama
Kepala Loka Kawasan Konservasi
Perairan Nasional Pekanbaru

Fajar Kurniawan

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
LOKA KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN NASIONAL (LKKPN)
PEKANBARU**

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET
1.	Terselenggaranya Pemanfaatan dan Pengendalian Ruang Laut di Wilayah Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil di Wilayah Kerja LKKPN Pekanbaru	1.	Dokumen Operasionalisasi Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut yang disusun di wilayah kerja LKKPN Pekanbaru (Dokumen)	3
2.	Meningkatnya Efektivitas Kawasan Konservasi di Wilayah Kerja LKKPN Pekanbaru	2.	Persentase Peningkatan Nilai Efektivitas Kawasan Konservasi Nasional Wilayah Kerja LKKPN Pekanbaru (%)	5
3.	Meningkatnya Jejaring dan Kemitraan untuk Mendukung Konservasi yang Efektif di Wilayah Kerja LKKPN Pekanbaru	3.	Jejaring Konservasi yang Diinisiasi di Wilayah Kerja LKKPN Pekanbaru (Dokumen)	1
		4.	Kemitraan Konservasi yang Diinisiasi dan/atau Dievaluasi di Wilayah Kerja LKKPN Pekanbaru (Dokumen)	1
4.	Meningkatnya Partisipasi dan Kapasitas Masyarakat dalam Mendukung Konservasi di Wilayah Kerja LKKPN Pekanbaru	5.	Bantuan Pemerintah Untuk Kelompok Masyarakat Penggerak Konservasi (KOMPAK) yang diserahkan di Wilayah Kerja LKKPN Pekanbaru (Kelompok)	2
5.	Meningkatnya Nilai PNBPN LKKPN Pekanbaru	6.	Nilai PNBPN LKKPN Pekanbaru (Rp.000)	13.587
6.	Tata Kelola Pemerintahan yang baik lingkup LKKPN Pekanbaru	7.	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Lingkup LKKPN Pekanbaru (Nilai)	89
		8.	Nilai Kinerja Anggaran Lingkup LKKPN Pekanbaru (Nilai)	82

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
		9. Nilai Unit Kerja Berpredikat Menuju WBK LKKPN Pekanbaru (Nilai)	75
		10. Indeks Profesionalitas ASN Lingkup LKKPN Pekanbaru (Indeks)	84
		11. Nilai PM SAKIP lingkup LKKPN Pekanbaru (Nilai)	75
		12. Laporan SPIP yang Disusun Lingkup LKKPN Pekanbaru (Dokumen)	4
		13. Persentase Unit Kerja Lingkup LKKPN Pekanbaru yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar (%)	92
		14. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Lingkup LKKPN Pekanbaru yang Dokumen Tindak Lanjutnya Telah Dilengkapi dan Disampaikan (%)	75
		15. Persentase Penyelesaian Temuan LHP BPK Lingkup LKKPN Pekanbaru (%)	100
		16. Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan Bantuan Pemerintah lingkup LKKPN Pekanbaru (%)	77,5

Data Anggaran

NO.	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)
1.	Perencanaan Ruang Laut	500.000.000
2.	Perlindungan dan Pemanfaatan Kawasan Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut	4.750.000.000
3.	Dukungan Manajemen Internal Lingkup LKKPN Pekanbaru	8.321.313.000
Total Anggaran Loka Kawasan Konservasi Perairan Nasional (LKKPN) Pekanbaru Tahun 2023		13.571.313.000

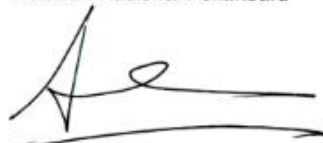
Jakarta, 9 Januari 2023

Pihak Kedua
Direktur Jenderal
Pengelolaan Ruang Laut



Victor Gustaaf Manoppo

Pihak Pertama
Kepala Loka Kawasan Konservasi
Perairan Nasional Pekanbaru



Fajar Kurniawan

2. LKKPN Pekanbaru (2 Agustus 2023)



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL
PENGELOLAAN KELAUTAN DAN RUANG LAUT**

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3520357
LAMAR www.kkp.go.id SUREL sespridirjenprl@kkp.go.id

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
LOKA KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN NASIONAL (LKKPN)
PEKANBARU**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rahmat Irfansyah

Jabatan : Kepala Loka Kawasan Konservasi Perairan Nasional Pekanbaru

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Victor Gustaaf Manoppo

Jabatan : Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 2 Agustus 2023

Pihak Kedua
Direktur Jenderal
Pengelolaan Ruang Laut

Victor Gustaaf Manoppo

Pihak Pertama
Kepala Loka Kawasan Konservasi
Perairan Nasional Pekanbaru

Rahmat Irfansyah

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
LOKA KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN NASIONAL (LKKPN)
PEKANBARU

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
1. Terselenggaranya Pemanfaatan dan Pengendalian Ruang Laut di Wilayah Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil di Wilayah Kerja LKKPN Pekanbaru	1. Dokumen Operasionalisasi Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut yang disusun di wilayah kerja LKKPN Pekanbaru (Dokumen)	3
2. Meningkatnya Efektivitas Kawasan Konservasi di Wilayah Kerja LKKPN Pekanbaru	2. Persentase Peningkatan Nilai Efektivitas Kawasan Konservasi Nasional Wilayah Kerja LKKPN Pekanbaru (%)	5
3. Meningkatnya Jejaring dan Kemitraan untuk Mendukung Konservasi yang Efektif di Wilayah Kerja LKKPN Pekanbaru	3. Jejaring Konservasi yang Diinisiasi di Wilayah Kerja LKKPN Pekanbaru (Dokumen)	1
	4. Kemitraan Konservasi yang Diinisiasi dan/atau Dievaluasi di Wilayah Kerja LKKPN Pekanbaru (Dokumen)	1
4. Meningkatnya Partisipasi dan Kapasitas Masyarakat dalam Mendukung Konservasi di Wilayah Kerja LKKPN Pekanbaru	5. Bantuan Pemerintah Untuk Kelompok Masyarakat Penggerak Konservasi (KOMPAK) yang diserahkan di Wilayah Kerja LKKPN Pekanbaru (Kelompok)	2
5. Meningkatnya Nilai PNBPN LKKPN Pekanbaru	6. Nilai PNBPN LKKPN Pekanbaru (Rp.000)	13.587
6. Tata Kelola Pemerintahan yang baik lingkup LKKPN Pekanbaru	7. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Lingkup LKKPN Pekanbaru (Nilai)	89
	8. Nilai Kinerja Anggaran Lingkup LKKPN Pekanbaru (Nilai)	82

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
	9. Nilai Unit Kerja Berpredikat Menuju WBK LKKPN Pekanbaru (Nilai)	75
	10. Indeks Profesionalitas ASN Lingkup LKKPN Pekanbaru (Indeks)	84
	11. Nilai PM SAKIP lingkup LKKPN Pekanbaru (Nilai)	75
	12. Laporan SPIP yang Disusun Lingkup LKKPN Pekanbaru (Dokumen)	4
	13. Persentase Unit Kerja Lingkup LKKPN Pekanbaru yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar (%)	92
	14. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Lingkup LKKPN Pekanbaru yang Dokumen Tindak Lanjutnya Telah Dilengkapi dan Disampaikan (%)	75
	15. Persentase Penyelesaian Temuan LHP BPK Lingkup LKKPN Pekanbaru (%)	100
	16. Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan Bantuan Pemerintah lingkup LKKPN Pekanbaru (%)	77,5

Data Anggaran

NO.	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)
1.	Perencanaan Ruang Laut	500.000.000
2.	Perlindungan dan Pemanfaatan Kawasan Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut	4.750.000.000
3.	Dukungan Manajemen Internal Lingkup LKKPN Pekanbaru	8.321.313.000
Total Anggaran Loka Kawasan Konservasi Perairan Nasional (LKKPN) Pekanbaru Tahun 2023		13.571.313.000

Jakarta,² Agustus 2023

Pihak Kedua
Direktur Jenderal
Pengelolaan Ruang Laut



Victor Gustaaf Manoppo

Pihak Pertama
Kepala Loka Kawasan Konservasi
Perairan Nasional Pekanbaru



Rahmat Irfansyah

3. LKKPN Pekanbaru (30 November 2023)



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL
PENGELOLAAN KELAUTAN DAN RUANG LAUT**

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3520357
LAMAR www.kkp.go.id SUREL sespridirenprf@kkp.go.id

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
LOKA KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN NASIONAL (LKKPN)
PEKANBARU**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rahmat Irfansyah
Jabatan : Kepala Loka Kawasan Konservasi Perairan Nasional Pekanbaru
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Victor Gustaaf Manoppo
Jabatan : Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 30 November 2023

Pihak Kedua
Direktur Jenderal
Pengelolaan Ruang Laut

Victor Gustaaf Manoppo

Pihak Pertama
Kepala Loka Kawasan Konservasi
Perairan Nasional Pekanbaru

Rahmat Irfansyah

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
LOKA KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN NASIONAL (LKKPN)
PEKANBARU

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
1.	Terselenggaranya Pemanfaatan dan Pengendalian Ruang Laut di Wilayah Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil di Wilayah Kerja LKKPN Pekanbaru	1. Dokumen Operasionalisasi Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut yang disusun di wilayah kerja LKKPN Pekanbaru (Dokumen)	3
2.	Meningkatnya Efektivitas Kawasan Konservasi di Wilayah Kerja LKKPN Pekanbaru	2. Persentase Peningkatan Nilai Efektivitas Kawasan Konservasi Nasional Wilayah Kerja LKKPN Pekanbaru (%)	5
3.	Meningkatnya Jejaring dan Kemitraan untuk Mendukung Konservasi yang Efektif di Wilayah Kerja LKKPN Pekanbaru	3. Jejaring Konservasi yang Diinisiasi di Wilayah Kerja LKKPN Pekanbaru (Dokumen)	1
		4. Kemitraan Konservasi yang Diinisiasi dan/atau Dievaluasi di Wilayah Kerja LKKPN Pekanbaru (Dokumen)	1
4.	Meningkatnya Partisipasi dan Kapasitas Masyarakat dalam Mendukung Konservasi di Wilayah Kerja LKKPN Pekanbaru	5. Bantuan Pemerintah Untuk Kelompok Masyarakat Penggerak Konservasi (KOMPAK) yang diserahkan di Wilayah Kerja LKKPN Pekanbaru (Kelompok)	2
5.	Meningkatnya Nilai PNBP LKKPN Pekanbaru	6. Nilai PNBP LKKPN Pekanbaru (Rp.000)	13.587
6.	Tata Kelola Pemerintahan yang baik lingkup LKKPN Pekanbaru	7. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Lingkup LKKPN Pekanbaru (Nilai)	93,75
		8. Nilai Kinerja Anggaran Lingkup LKKPN Pekanbaru (Nilai)	82

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
		9. Nilai Unit Kerja Berpredikat Menuju WBK LKKPN Pekanbaru (Nilai)	75
		10. Indeks Profesionalitas ASN Lingkup LKKPN Pekanbaru (Indeks)	84
		11. Nilai PM SAKIP lingkup LKKPN Pekanbaru (Nilai)	75
		12. Laporan SPIP yang Disusun Lingkup LKKPN Pekanbaru (Dokumen)	4
		13. Persentase Unit Kerja Lingkup LKKPN Pekanbaru yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar (%)	92
		14. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Lingkup LKKPN Pekanbaru yang Dokumen Tindak Lanjutnya Telah Dilengkapi dan Disampaikan (%)	75
		15. Persentase Penyelesaian Temuan LHP BPK Lingkup LKKPN Pekanbaru (%)	100
		16. Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan Bantuan Pemerintah lingkup LKKPN Pekanbaru (%)	77,5

Data Anggaran

NO.	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)
1.	Perencanaan Ruang Laut	400.000.000
2.	Perlindungan dan Pemanfaatan Kawasan Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut	4.274.780.000
3.	Dukungan Manajemen Internal Lingkup LKKPN Pekanbaru	8.321.313.000
Total Anggaran Loka Kawasan Konservasi Perairan Nasional (LKKPN) Pekanbaru Tahun 2023		12.996.093.000

Jakarta, 30 November 2023

Pihak Kedua
Direktur Jenderal
Pengelolaan Ruang Laut



Victor Gustaaf Manoppo

Pihak Pertama
Kepala Loka Kawasan Konservasi
Perairan Nasional Pekanbaru



Rahmat Irfansyah

LAMPIRAN II



Certificate of Registration

Registration No. : QAIC / ID / 11123 - A

QAI Indonesia Certification

Hereby grants to:

**LOKA KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN NASIONAL
PEKANBARU**

Jl. Budi Luhur Kelurahan Mentangor Pekanbaru-Riau

(hereinafter called the Registered Institution) the right to be listed in the Directory of Registered Institution in respect of the services listed below. These services shall be offered by the Registered Institution at or from only the address given below in accordance with the Quality Management System in compliance with

ISO 9001:2015

Approved Scope to which this Certificate refers:

**Provision of Administrative Services for the Utilization of National Marine
Protected Areas**

(Further clarification regarding the Scope of this Certificate and the applicability of ISO 9001:2015 requirement may be obtained by consulting the organization)

For and on behalf of QA Indonesia

Ir. Joko Nursapto, MEng.Sc-RLA

Certificate Issue Date : 17 November 2023 - Re-assessment Date : 17 November 2024

Date of Initial Registration : 17 November 2023 - Certificate Expiry Date : 17 November 2026

This Certificate of Registration is granted subject to the Regulations approved by the Governing Board.

QAI INDONESIA

CERTIFICATION

Address: Jl. Surabaya No.11, Menteng,
Jakarta, 10310

Telp: 021 - 21230866

Email: admin@qai.co.id

Website QAI: www.qai.co.id

Website Accreditor: www.ascb.com



Registration No. : QAIC / ID / 11123 – A

LOKA KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN NASIONAL
PEKANBARU

Location

Jl. Budi Luhur Kelurahan Mentangor Pekanbaru-Riau

Registered Activities :

1. Penerbitan Karcis Masuk Kawasan Konservasi Kegiatan Pariwisata Alam Perairan
2. Penerbitan Tanda Masuk Kawasan Konservasi Kegiatan Pendidikan
3. Penerbitan Tanda Masuk Kawasan Konservasi Kegiatan Penelitian

Certificate Issue Date : 17 November 2023 - **Re-assessment Date :** 17 November 2024

Date of Initial Registration : 17 November 2023 - **Certificate Expiry Date :** 17 November 2026

This Certificate of Registration is granted subject to the Regulations approved by the Governing Board.





KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL
PENGELOLAAN KELAUTAN DAN RUANG LAUT
LOKA KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN NASIONAL
PEKANBARU

JALAN BUDI LUHUR KELURAHAN MENTANGOR PEKANBARU-RIAU 28286

TELEPON/FAKSIMILE (0761) 8404510

LAMAM www.kkp.go.id SUREL kkpn.pekanbaru@kkp.go.id

Nomor : B.121/LKKPN/TU.140/I/2024

10 Januari 2024

Sifat : Biasa

Lampiran : -

Hal : Penyampaian Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan
pada IKU Rekomendasi Kebijakan Monitoring dan Verifikasi
Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut Tahun 2023

Yth. Kepala LKKPN Pekanbaru
di tempat

Sehubungan telah dilaksanakannya kegiatan pada IKU Rekomendasi Kebijakan Monitoring dan Verifikasi Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut Tahun 2023 di Wilayah Kerja Loka Kawasan Konservasi Perairan Nasional Pekanbaru dapat kami sampaikan sebagai berikut :

1. Ruang Laut dilaksanakan dalam 3 (tiga) kegiatan, diantaranya Sosialisasi Penyelenggaraan Penataan Ruang, Verifikasi Pemanfaatan Ruang Laut, dan Monitoring Pemanfaatan Ruang Laut.
2. Sosialisasi Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut telah diberikan kepada 136 orang yang terdiri atas pelaku usaha, pemerintah, maupun masyarakat lokal. Kegiatan sosialisasi ini disampaikan menggunakan metode sosialisasi pertemuan langsung, sosialisasi door to door, dan sosialisasi melalui media sosial. Pelaksanaan sosialisasi pertemuan langsung dilaksanakan sebanyak 3 kali pada tanggal 10 Agustus 2023, 24 Agustus 2023, dan 12 Oktober 2023. Pelaksanaan sosialisasi door to door dilaksanakan sebanyak 3 kali pada tanggal 28 – 30 Maret 2023, 9 Agustus 2023, dan 17 Desember 2023. Sedangkan pelaksanaan sosialisasi melalui media sosial dilaksanakan pada plat form youtube dan Instagram LKKPN Pekanbaru.
3. Telah dilaksanakan 3 (tiga) kali penilaian teknis diantaranya permohonan PKKPR atas nama Suriawati dan Dodo, dan permohonan KKRL atas nama Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Anambas. Terhadap tiga permohonan yang dinilai tersebut, dilakukan verifikasi lapangan sebanyak 1 (satu) kali terhadap

permohonan PKKPRL atas nama Suriawati. Selain melaksanakan penilaian teknis, LKKPN Pekanbaru juga menghadiri 17 permohonan KKPRL yang berlokasi di perairan Kepulauan Anambas. LKKPN Pekanbaru juga melaksanakan bantuan verifikasi lapangan terhadap dua permohonan PKKPRL atas nama Steven dan Nancy Sariki.

4. Monitoring pemanfaatan ruang laut telah dilaksanakan sebanyak 3 (tiga) kali dengan fokus kegiatan mengumpulkan foto udara terkini pemanfaatan ruang laut eksisting di wilayah kerja Kawasan Konservasi Kepulauan Anambas dan Laut Sekitarnya dengan menggunakan wahana drone. Pemetaan udara ini bertujuan untuk memperkuat basis data spasial pemanfaatan ruang laut terkini di kawasan konservasi yang akan digunakan sebagai data dasar dalam melaksanakan penilaian teknis terhadap permohonan KKPRL dan data dukung dalam pengambilan kebijakan dalam penyelenggaraan penataan ruang laut di kawasan konservasi Kepulauan Anambas dan Laut Sekitarnya. Area yang telah terpetakan diantaranya wilayah perairan Kecamatan Jemaja Timur, Jemaja Barat, Palmatak, dan sebagian Siantan Tengah.

Adapun laporan pelaksanaan kegiatan pada IKU Rekomendasi Kebijakan Monitoring dan Verifikasi Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut Tahun 2023 tersebut sebagaimana terlampir.

Demikian saya sampaikan, atas perhatian Bapak diucapkan terima kasih.



Syofyan Roni

Lampiran Surat
Nomor : B.121/LKKPN/TU.140/I/2024
Tanggal : 10 Januari 2024

**Laporan Kegiatan pada IKU Rekomendasi Kebijakan Monitoring dan Verifikasi
Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut Tahun 2023**

No	Dokumen	Jenis Data	Tautan
1.	Laporan Pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi Penyelenggaraan Penataan Ruang di KKPN	Softfile Dokumen (.pdf)	https://bit.ly/Laporan_Sosialisasi_PRL
2.	Laporan Pelaksanaan Kegiatan Verifikasi Pemanfaatan Ruang Laut di KKPN	Softfile Dokumen (.pdf)	https://bit.ly/verifikasiprl
3.	Laporan Pelaksanaan Kegiatan Monitoring Pemanfaatan Ruang Laut di KKPN	Softfile Dokumen (.pdf)	https://bit.ly/monitoringprl

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN RUANG LAUT
LOKA KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN NASIONAL PEKANBARU

MEMORANDUM
NOMOR. 1/LKKPN/TU.140/I/2024

Yth : Kepala LKKPN Pekanbaru
Dari : Fungsional PELP Ahli Muda LKKPN Pekanbaru
Hal : Penyampaian Laporan Hasil Penilaian Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi Pulau Pieh dan Kawasan Konservasi Kepulauan Anambas Tahun 2023
Lampiran : 1 (Satu) berkas
Tanggal : 9 Januari 2024

Sehubungan telah dilaksanakannya penilaian Evaluasi Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi (EVIKA) pada tanggal 28 Agustus 2023 di Kota Pekanbaru terhadap Kawasan Konservasi Kepulauan Anambas dan Laut Sekitarnya dan pada tanggal 7 September 2023 di Kota Padang terhadap Kawasan Konservasi Pulau Pieh dan Laut Sekitarnya, dimana pengelolaan kedua Kawasan Konservasi tersebut menjadi tanggung jawab UPT LKKPN Pekanbaru, maka dapat kami laporkan hal-hal sebagai berikut :

1. Berdasarkan hasil penilaian, Kawasan Konservasi Kepulauan Anambas dan Laut Sekitarnya di Provinsi Kepulauan Riau dinyatakan pada tahun 2023 mempunyai nilai akhir 72,67% dengan status **Dikelola Optimum**;
2. Berdasarkan hasil penilaian Kawasan Konservasi Pulau Pieh dan Laut Sekitarnya di Provinsi Sumatera Barat dinyatakan pada tahun 2023 mempunyai nilai akhir 75,57% dengan status **Dikelola Optimum**;
3. Perbandingan jumlah skor penilaian masing-masing kawasan konservasi dalam Evaluasi Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi Tahun 2022 s/d 2023 adalah :

Kawasan Konservasi	Skor Penilaian EVIKA (%)		Persentase Kenaikan (%)
	Tahun 2022	Tahun 2023	
Kepulauan Anambas	66.86	72.67	5,81
Pulau Pieh	68.15	75.57	7,42

4. Dari target 5% peningkatan efektivitas pengelolaan kawasan konservasi yang ditetapkan tahun 2023 di wilayah kerja LKKPN Pekanbaru. Realisasi pencapaian target rata-rata dengan nilai 6,615 atau bisa dikatakan pencapaian target persentase efektivitas Kawasan Konservasi tahun 2023 tahun 2023 sebesar 132,3%.

Adapun dokumen penilaian masing-masing kawasan konservasi tercantum pada berita acara verifikasi dan berita acara evaluasi tahun 2023 sebagaimana terlampir.

Demikian saya sampaikan, atas perhatian Bapak diucapkan terima kasih.



Nadia Amalina Daniel

**BERITA ACARA VERIFIKASI
KAWASAN KONSERVASI NASIONAL KEPULAUAN ANAMBAS
DAN LAUT SEKITARNYA DI PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

Pada hari ini Senin, tanggal dua puluh delapan, bulan Agustus, tahun 2023 bertempat di Kantor LKKPN Pekanbaru, telah dilakukan verifikasi terhadap pengelolaan Kawasan Konservasi Nasional Kepulauan Anambas dan Laut Sekitarnya yang telah ditetapkan melalui Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 30/KEPMEN-KP/2022 tentang Kawasan Konservasi Kepulauan Anambas dan Laut Sekitarnya di Provinsi Kepulauan Riau.

Verifikasi dihadiri oleh beberapa pihak, antara lain:

1. Rahmat Irfansyah, Kepala Loka Kawasan Konservasi Perairan Nasional Pekanbaru;
2. M. Imran Amin, Yayasan Konservasi Alam Nusantara (Tim Penilai);
3. Julham MS Pelupessy, (Tim Penilai);
4. Ririn Widiastutik, Ditjen Pengelolaan Ruang Laut;
5. Syofyan Roni, Loka Kawasan Konservasi Perairan Nasional Pekanbaru;
6. M. Lukman F, Loka Kawasan Konservasi Perairan Nasional Pekanbaru;
7. Andriyatno Hanif, Loka Kawasan Konservasi Perairan Nasional Pekanbaru;
8. Rifqi Maulid, Loka Kawasan Konservasi Perairan Nasional Pekanbaru;
9. Oki Pendar, Loka Kawasan Konservasi Perairan Nasional Pekanbaru;
10. Yeni Hutanto, Loka Kawasan Konservasi Perairan Nasional Pekanbaru;
11. Samsul Bahri, Loka Kawasan Konservasi Perairan Nasional Pekanbaru;
12. Muhammad Alrizky, Loka Kawasan Konservasi Perairan Nasional Pekanbaru;
13. Rijalul Fikri, Regional Manager Riau Islands - Program USAID Kolektif;
14. Dhika Rino Pratama, Program USAID Kolektif;
15. Devi Sa'adah, Program USAID Kolektif;
16. Neneng Sukiatur, Program USAID Kolektif;
17. Nugroho Arif Prabowo, Program USAID Kolektif;
18. Muhammad Azhar Prisetiahyadi, Program USAID Kolektif;
19. Ayi Kulsum Zam Zam, Program USAID Kolektif.

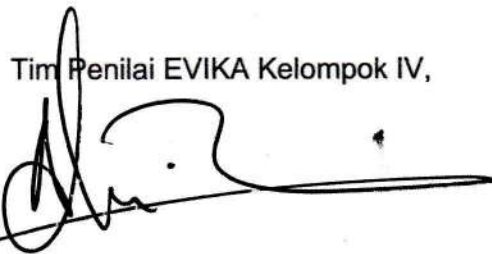
Berdasarkan pertemuan verifikasi hasil penilaian disepakati beberapa hal sebagai berikut:

1. Penilaian EVIKA dilakukan terhadap dokumen dan data dukung mulai dari bulan Januari – Desember 2022;
2. Penilaian EVIKA dilakukan berdasarkan rekomendasi hasil penilaian EVIKA tahun 2022;
3. Penilaian berdasarkan data yang sudah di upload pada *google drive* dari Dit. KKHL.

Demikian Berita Acara Verifikasi ini dibuat untuk dapat dijadikan pedoman.

Pekanbaru, 28 Agustus 2023

Tim Penilai EVIKA Kelompok IV,



M. Imran Amin

Kepala Loka Kawasan Konservasi
Perairan Nasional Pekanbaru



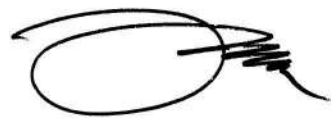
Rahmat Irfansyah

Tim Penilai EVIKA, Kelompok IV



Julham MS Pelupessy

LKKPN Pekanbaru



Syofyan Roni

LKKPN Pekanbaru



Oki Pendi

LKKPN Pekanbaru



Andriyatno Hanif

Program USAID Kolektif



Rijalul Fikri

Program USAID Kolektif



Dhika Rino Pratama

**BERITA ACARA EVALUASI
KAWASAN KONSERVASI NASIONAL KEPULAUAN ANAMBAS
DAN LAUT SEKITARNYA DI PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

Pada hari ini Senin, tanggal dua puluh delapan, bulan Agustus, tahun 2023 bertempat di Kantor LKKPN Pekanbaru, telah dilakukan verifikasi terhadap pengelolaan Kawasan Konservasi Nasional Kepulauan Anambas dan Laut Sekitarnya yang telah ditetapkan melalui Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 30/KEPMEN-KP/2022 tentang Kawasan Konservasi Kepulauan Anambas dan Laut Sekitarnya di Provinsi Kepulauan Riau.

Penilaian dilakukan dengan dengan susunan tim penilai sebagai berikut:

Ketua : Riyanto Basuki

Anggota : 1. M. Imran Amin
2. Julham, MS, Palupessy

Sekretariat : Ririn Widiastutik

dan dihadiri oleh perwakilan dari Satuan Unit Organisasi Pengelola Kawasan Konservasi:

Nama : Rahmat Irfansyah

Jabatan : Kepala Loka Kawasan Konservasi Perairan Nasional Pekanbaru

Hasil penilaian disepakati sebagai berikut:

- | | |
|---|------------------------------------|
| 1. Skor Penilaian Kriteria Input | : 825 dari total skor 1075 (76,7%) |
| 2. Skor Penilaian Kriteria Proses | : 325 dari total skor 430 (75,6%) |
| 3. Skor Penilaian Kriteria <i>Output</i> | : 450 dari total skor 650 (69,2%) |
| 4. Skor Penilaian Kriteria <i>Outcome</i> | : 405 dari total skor 625 (64,8%) |
| Jumlah Skor Penilaian | : 2005 |

Berdasarkan hasil penilaian, Kawasan Konservasi Nasional Kepulauan Anambas, dan Laut Sekitarnya di Provinsi Kepulauan Riau dinyatakan pada tahun 2023 mempunyai nilai akhir **72,67%** dengan status **PERAK (Dikelola Optimum)**. Rekomendasi untuk meningkatkan status efektivitas pengelolaan Kawasan Konservasi Nasional Kepulauan Anambas, dan Laut Sekitarnya di Provinsi Kepulauan Riau, yaitu:

1. Mendorong percepatan pengesahan revisi dokumen Rencana Pengelolaan;
2. Meningkatkan kompetensi pengelola antara lain sosial ekonomi budaya, pelayanan, kemitraan dan jejaring, penyadartahuan dan pendampingan masyarakat;
3. Meningkatkan sarana dan prasarana informasi;
4. Meningkatkan kegiatan pengawasan dengan melibatkan pemangku kepentingan terkait dan perlu melakukan perbaikan sistem basis data;
5. Meningkatkan program penjangkauan dan pemutakhiran data;
6. Meningkatkan kegiatan kemitraan untuk menjangkau pendampingan masyarakat, monitoring sumberdaya dan pengawasan;
7. Mengumpulkan data pemanfaatan kawasan konservasi untuk kegiatan perikanan tangkap dan pariwisata;
8. Menyusun perbandingan jumlah ancaman terhadap target konservasi dari tahun ke tahun berdasarkan jenis ancaman di dokumen Rencana Pengelolaan;

9. Memutakhirkan data dan informasi mengenai sosial budaya dan ekonomi.

Demikian Berita Acara Evaluasi ini dibuat untuk dapat dijadikan pedoman.

Pekanbaru, 28 Agustus 2023

Tim Penilai EVIKA Kelompok IV,



M. Imran Amin



Kepala Loka Kawasan Konservasi
Perairan Nasional Pekanbaru

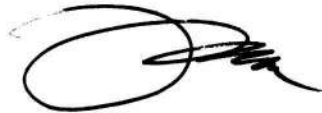
Rahmat Haryah

Tim Penilai EVIKA, Kelompok IV



Julham MS Pelupessy

LKKPN Pekanbaru



Syofyan Roni

LKKPN Pekanbaru



Oki Pendi

LKKPN Pekanbaru



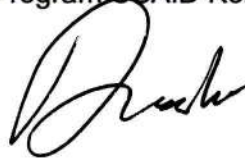
Andriyatno Hanif

Program USAID Kolektif



Rijalul Fikri

Program USAID Kolektif



Dhika Rino Pratama

BERITA ACARA VERIFIKASI

KAWASAN KONSERVASI PULAU PIEH DAN LAUT SEKITARNYA DI PROVINSI SUMATERA BARAT

Pada hari ini Kamis tanggal Tujuh bulan September tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (07-09-2023), telah dilakukan verifikasi terhadap pengelolaan Kawasan Konservasi Pulau Pieh dan Laut Sekitarnya di Provinsi Sumatera Barat yang telah ditetapkan melalui Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 31 Tahun 2022 tentang Kawasan Konservasi Pulau Pieh dan Laut Sekitarnya di Provinsi Sumatera Barat.

Verifikasi dihadiri oleh beberapa pihak, yaitu:

1. Tely Dasaluti – Tim Penilai
2. Rio Chantyno – Tim Penilai
3. Meta Haries – Tim Penilai
4. Rahmat Irfansyah – LKKPN Pekanbaru
5. Fadhlan Basiluddin – LKKPN Pekanbaru
6. Nadia Amalina – LKKPN Pekanbaru
7. Wahyudi Andrito – LKKPN Pekanbaru
8. Agung Putra Utama – LKKPN Pekanbaru
9. Ahmad Fahcruddin – LKKPN Pekanbaru
10. Nur Jasilah – LKKPN Pekanbaru
11. Lovedrian Ariston – BPSPL Padang
12. Anggita Sherly – Dit. KKHL

Berdasarkan pertemuan verifikasi hasil penilaian disepakati sebagai berikut:

1. Penilaian EVIKA dilakukan terhadap dokumen dan data dukung mulai dari bulan Januari – Desember 2022;
2. Penilaian EVIKA dilakukan berdasarkan rekomendasi hasil penilaian EVIKA tahun 2022;
3. Penilaian berdasarkan data yang sudah di upload pada google drive <https://bit.ly/DokumenEVIKAk2>

Demikian Berita Acara Verifikasi ini dibuat untuk dapat dijadikan pedoman.

Padang, 7 September 2023

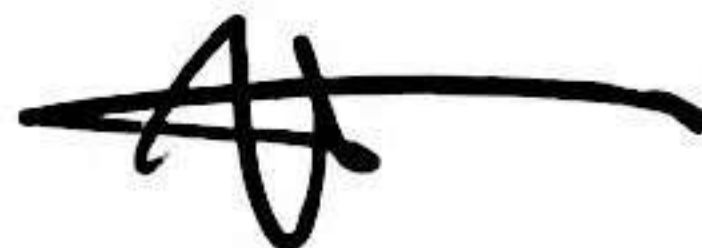
Ditandatangani oleh para pihak:

Ketua Tim Penilai Kelompok II,



Tely Dasaluti

Kepala Loka Kawasan Konservasi
Perairan Nasional,



Rahmat Irfansyah

BERITA ACARA EVALUASI

KAWASAN KONSERVASI PULAU PIEH DAN LAUT SEKITARNYA DI PROVINSI SUMATERA BARAT

Pada hari ini Kamis tanggal Tujuh bulan September tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (07-09-2023), telah dilakukan evaluasi terhadap pengelolaan Kawasan Konservasi Pulau Pieh dan Laut Sekitarnya di Provinsi Sumatera Barat yang telah ditetapkan melalui Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 31 Tahun 2022 tentang Kawasan Konservasi Pulau Pieh dan Laut Sekitarnya di Provinsi Sumatera Barat.

Penilaian dilakukan dengan dengan susunan tim penilai sebagai berikut:

Ketua : Tely Dasaluti
Anggota : 1) Rio Chantyno
 2) Meta Haries
Sekretariat : Anggita Sherly

dan dihadiri oleh perwakilan dari Satuan Unit Organisasi Pengelola Kawasan Konservasi:

Nama : Rahmat Irfansyah
Jabatan : Kepala Loka Kawasan Konservasi Perairan Nasional Pekanbaru

Hasil penilaian disepakati sebagai berikut:

1. Skor Penilaian Kriteria Input	:	735 dari total skor 1075 (68%)
2. Skor Penilaian Kriteria Proses	:	355 dari total skor 430 (83%)
3. Skor Penilaian Kriteria <i>Output</i>	:	535 dari total skor 650 (82%)
4. Skor Penilaian Kriteria <i>Outcome</i>	:	375 dari total skor 625 (60%)
Jumlah Skor Penilaian	:	2000 dari total skor 2780 (75,57%)

Berdasarkan hasil penilaian, Kawasan Konservasi Pulau Pieh dan Laut Sekitarnya di Provinsi Sumatera Barat dinyatakan pada tahun 2023 mempunyai nilai akhir **75,57%** dengan status **Dikelola Optimum**. Rekomendasi untuk meningkatkan status efektivitas pengelolaan Kawasan Konservasi Pulau Pieh dan Laut Sekitarnya di Provinsi Sumatera Barat, yaitu:

1. Mendorong percepatan pengesahan revisi rencana pengelolaan;
2. Perlu melakukan pemetaan fungsi dan jabatan sebagai dasar penambahan jumlah pegawai pengelola kawasan konservasi untuk menjalankan fungsi-fungsi pengelolaan;
3. Perlu meningkatkan kompetensi pengelola untuk melaksanakan fungsi - fungsi pengelolaan dengan mengikuti uji kompetensi dari BNSP dan Instansi yang berwenang mengeluarkan sertifikasi uji kompetensi;
4. Penambahan alokasi anggaran pengelolaan;
5. Perlu melengkapi sarana dan prasarana pengelolaan;
6. Perlu adanya pembahasan batasan kewenangan pengawasan pada pengelolaan kawasan konservasi antara LKKPN Pekanbaru dengan Satwas SDKP Padang untuk mengurangi pelanggaran yang terjadi didalam kawasan konservasi nasional;

7. Perlu adanya analisis dampak ekonomi dari keberadaan kawasan konservasi nasional di 3 Kabupaten/Kota sekitar KKN Pulau Pieh.

Demikian Berita Acara Evaluasi ini dibuat untuk dapat dijadikan pedoman.

Padang, 7 September 2023

Ditandatangani oleh para pihak:

Ketua Tim Penilai Kelompok II,  Tely Dasaluti	Kepala Loka Kawasan Konservasi Perairan Nasional,  Rahmat Irfansyah
Tim Penilai Kelompok II,  Meta Haries	Koordinator Kawasan Konservasi TWP Pulau Pieh,  Fadhlani Basiluddin
Tim Penilai Kelompok II,  Rio Chantyno	PELP Ahli Pertama - BPSPL Padang  Lovedrian Ariston



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL
PENGELOLAAN KELAUTAN DAN RUANG LAUT
LOKA KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN NASIONAL
PEKANBARU

JALAN BUDI LUHUR KELURAHAN MENTANGOR PEKANBARU-RIAU 28286

TELEPON/FAKSIMILE (0761) 8404510

LAMAM www.kkp.go.id SUREL lkkn.pekanbaru@kkp.go.id

Nomor	: B.1821/LKKPN/PRL.440/X/2023	31 Oktober 2023
Sifat	: Biasa	
Lampiran	: Satu Berkas	
Hal	: Usulan Prakarsa Jejaring Kawasan Konservasi Kepulauan Riau	

Yth. Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut
di Jakarta

Sehubungan dengan peningkatan efektifitas pengelolaan Kawasan Konservasi di Provinsi Kepulauan Riau dan dalam rangka mendukung Agenda Prioritas KKP, Loka Kawasan Konservasi Perairan Nasional (LKKPN) Pekanbaru menginisiasi pembangunan Jejaring Kawasan Konservasi Kepulauan Riau dengan Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau. Selanjutnya kami mohon arahan Bapak terhadap usulan prakarsa Jejaring Kawasan Konservasi Kepulauan Riau yang telah kami bahas dengan perwakilan Direktorat KKHL, Sekretariat Ditjen PKRL, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau dan pihak terkait lainnya sebagaimana draft usulan terlampir.

Demikian kami sampaikan. Atas perhatian dan arahan Bapak kami ucapkan terima kasih.

Kepala Loka Kawasan Konservasi
Perairan Nasional Pekanbaru,



**Ditandatangani
Secara Elektronik**

Rahmat Irfansyah

Tembusan:

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut;
2. Direktur Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut.



**NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN KELAUTAN DAN RUANG LAUT
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA
DAN
PEMERINTAHAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU
TENTANG
SINERGITAS PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN PEMBANGUNAN
JEJARING PENGELOLAAN KAWASAN KONSERVASI DI PROVINSI
KEPULAUAN RIAU**

NOMOR:

NOMOR:

Kami yang bertandatangan di bawah ini:

I. **Victor Gustaaf Manoppo** : Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut, berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Timur Nomor 16, Jakarta Pusat 10110, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama, Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

II. **Ansar Ahmad** : Gubernur Kepulauan Riau, berkedudukan di Pulau Dompok, Kecamatan Bukit Bestari, Kota Tanjungpinang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama, Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama dalam Nota Kesepakatan ini disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. **PIHAK KESATU** adalah Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan kelautan dan ruang laut serta perlindungan lingkungan laut;

- b. **PIHAK KEDUA** adalah lembaga yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. bahwa ekosistem di Kawasan Konservasi Nasional (KKN) Kepulauan Anambas dan Laut Sekitarnya di Provinsi Kepulauan Riau selanjutnya disebut sebagai Kawasan Konservasi Kepulauan Anambas, mempunyai keterkaitan dan ketergantungan baik secara bio-fisik, maupun sosial-ekonomi dengan Kawasan Konservasi Daerah (KKD) di Provinsi Kepulauan Riau sehingga perlu dikelola secara jejaring guna meningkatkan fungsi kawasan tersebut;
- d. bahwa untuk itu perlu dilakukan sinergitas pengelolaan dalam bentuk jejaring konservasi Kawasan Konservasi Nasional Kepulauan Anambas dengan Kawasan Konservasi Daerah di Provinsi Kepulauan Riau dengan memperhatikan ketentuan dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 13 Tahun 2014 tentang Jejaring Kawasan Konservasi Perairan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang tata cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk melaksanakan Nota Kesepakatan tentang Jejaring Kawasan Konservasi di Provinsi Kepulauan Riau, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Nota Kesepakatan ini adalah memberikan landasan dan acuan bagi **PARA PIHAK** dalam melakukan sinergitas sebagaimana dimaksud dalam ruang lingkup Nota Kesepakatan ini.
- (2) Tujuan Nota Kesepakatan ini adalah untuk mensinergikan pengelolaan Kawasan Konservasi Kepulauan Anambas dengan Kawasan Konservasi Daerah di Provinsi Kepulauan Riau dalam bentuk jejaring.

PASAL 2 LOKASI SINERGITAS

- (1) Lokasi pelaksanaan jejaring pengelolaan kawasan konservasi di Provinsi Kepulauan Riau, adalah lokasi kawasan konservasi yang menjadi kewenangan dan tanggung jawab **PARA PIHAK** di Kawasan Konservasi Kepulauan Anambas dan Kawasan Konservasi Daerah di Provinsi Kepulauan Riau.
- (2) Lokasi pelaksanaan jejaring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan peta lokasi jejaring kawasan konservasi yang memuat posisi geografis antar kawasan konservasi perairan dengan koordinat lintang dan bujur.

PASAL 3

OBJEK

Objek Nota Kesepakatan ini adalah Sinergitas Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Jejaring Pengelolaan Kawasan Konservasi di Provinsi Kepulauan Riau.

PASAL 4

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepakatan ini mencakup kerjasama pengelolaan jejaring Kawasan Konservasi Kepulauan Anambas dengan Kawasan Konservasi Daerah di Provinsi Kepulauan Riau dalam hal;

- (1) Pelestarian dan penguatan basis data penyu dan terumbu karang.
- (2) Pengendalian pemanfaatan kawasan konservasi.
- (3) Peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

PASAL 5

PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepakatan ini diatur lebih rinci dalam Rencana Kerja yang memuat sinergi pengelolaan Kawasan Konservasi Kepulauan Anambas dengan Kawasan Konservasi Daerah di Provinsi Kepulauan Riau dalam bentuk jejaring sesuai dengan ruang lingkup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- (2) Rencana Kerja merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Nota Kesepakatan ini.
- (3) Untuk melaksanakan Nota Kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), **PARA PIHAK** akan menunjuk wakil-wakilnya sesuai dengan kebutuhan, tugas dan fungsinya.
- (4) Guna menindaklanjuti Nota Kesepakatan ini, **PARA PIHAK** menunjuk pejabat penghubung, dari **PIHAK KESATU** adalah Direktur Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut dan dari **PIHAK KEDUA** adalah Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau.

PASAL 6

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

- (1) Tugas dan Tanggung Jawab PIHAK KESATU;
 - a. Melakukan penyiapan bahan pemangkuan, pemanfaatan, dan pengawasan kawasan konservasi yang bertujuan untuk melestarikan sumber daya ikan dan lingkungannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. PIHAK KESATU bertanggung jawab terhadap pelaksanaan Nota Kesepakatan sesuai dengan kewenangan, ruang lingkup, yang dituangkan dalam Rencana Kerja.
- (2) Tugas dan Tanggung Jawab PIHAK KEDUA;

- a. Melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/ atau kegiatan teknis penunjang kedinasan di bidang konservasi dan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan dalam Kawasan Konservasi Daerah di Provinsi Kepulauan Riau;
- b. PIHAK KEDUA bertanggungjawab terhadap pelaksanaan Nota Kesepakatan sesuai dengan kewenangan, ruang lingkup, yang dituangkan dalam Rencana Kerja.

PASAL 7

HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

Hak kekayaan intelektual yang merupakan hasil dari Nota Kesepakatan sepenuhnya akan menjadi milik PARA PIHAK.

PASAL 8

MASA BERLAKU

- (1) Nota Kesepakatan ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, dihitung sejak tanggal ditandatanganinya dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan evaluasi setiap tahun sesuai kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) PARA PIHAK melakukan konsultasi atas rancangan perpanjangan Nota Kesepakatan ini selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Nota Kesepakatan ini.
- (3) Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk mengakhiri Nota Kesepakatan sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pihak tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya, selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum keinginan diakhirinya Nota Kesepakatan ini.
- (4) Dalam hal Nota Kesepakatan ini tidak diperpanjang lagi, baik karena permintaan salah satu pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ataupun karena alasan lain, pengakhiran Nota Kesepakatan tidak akan mempengaruhi tugas dan tanggungjawab masing-masing pihak yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebelum berakhirnya Nota Kesepakatan ini.

PASAL 9

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

- (1) PARA PIHAK akan melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala setiap 1 (satu) tahun sekali atau sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan PARA PIHAK.
- (2) Laporan hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Menteri Kelautan dan Perikanan, dan Gubernur Kepulauan Riau, serta ditembuskan kepada Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi.
- (3) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dilaksanakan oleh PARA PIHAK secara bersama yang mengacu pada ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada pasal 4.

PASAL 10

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perselisihan dalam penafsiran dan pelaksanaan Nota Kesepakatan ini akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat oleh PARA PIHAK dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PASAL 11

PEMBIAYAAN

Biaya yang diperlukan untuk kegiatan-kegiatan yang termasuk dalam ruang lingkup Nota Kesepakatan ini dibebankan kepada anggaran belanja PARA PIHAK dan sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 12

PERUBAHAN

- (1) Nota Kesepakatan ini dapat diubah berdasarkan persetujuan PARA PIHAK.
- (2) Perubahan dan/ atau hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepakatan ini akan diatur dalam bentuk *addendum* dan/ atau amandemen yang disepakati oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.

PASAL 13

FORCE MAJEURE (KEADAAN KAHAR)

- (1) Salah satu **PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab atas kegagalan atau keterlambatan dalam melaksanakan kewajibannya berdasarkan Nota Kesepakatan ini yang disebabkan oleh hal-hal di luar kemampuan yang wajar dari **PARA PIHAK** dan bukan disebabkan kesalahan salah satu atau **PARA PIHAK**, yang selanjutnya dalam Nota Kesepakatan ini disebut Keadaan Kahar.
- (2) Kejadian-kejadian berikut adalah keadaan Kahar: kerusakan masal, perang saudara, pemberontakan, perebutan kekuasaan, perang dengan negara lain atau terorisme; gempa bumi, banjir, kebakaran, ledakan gunung berapi, bencana alam dan/ atau bencana non alam lainnya; sengketa hubungan industrial atau pemogokan masal yang terjadi di tingkat nasional maupun daerah; atau perubahan peraturan perundang-undangan nasional maupun daerah secara material.
- (3) Salah satu **PIHAK** hanya akan dibebaskan dari kewajibannya berdasarkan Nota Kesepakatan ini dengan alasan Keadaan Kahar jika:
a) keadaan dimaksud berdampak langsung pada pelaksanaan kewajiban **PIHAK** tersebut, dan b) tidak ada unsur kesenjangan dan/ atau kelalaian yang dilakukan oleh **PIHAK** tersebut.

- (4) **PIHAK** yang mengalami Keadaan Kahar wajib memberitahukan **PIHAK** lainnya secara tertulis dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender setelah terjadinya Keadaan Kahar tersebut. Pemberitahuan itu sekurang-kurangnya harus menjelaskan jenis Keadaan Kahar yang terjadi, perkiraan lamanya Keadaan Kahar akan berlangsung dan upaya-upaya penanggulangan yang telah dan akan dilakukan oleh **PIHAK** yang mengirimkan pemberitahuan.
- (5) **PIHAK** yang mengalami Keadaan Kahar wajib mengambil langkah-langkah yang diperlukan agar **PIHAK** tersebut dapat melanjutkan pelaksanaan kewajibannya sesuai Nota Kesepakatan.
- (6) Apabila dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender sejak terjadinya Keadaan Kahar, **PIHAK** yang mengalami Keadaan Kahar itu tidak mengirimkan pemberitahuan sesuai dengan Ayat (4) Pasal ini, maka Keadaan Kahar dianggap tidak pernah terjadi.
- (7) **PIHAK** yang menerima pemberitahuan Keadaan Kahar dapat menolak mengakui adanya Keadaan Kahar selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender setelah diterimanya pemberitahuan sebagaimana dimaksud Ayat dalam Pasal ini. Apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kalender tersebut tidak ada penolakan dari **PIHAK** yang diberitahu, maka **PIHAK** itu dianggap mengakui adanya suatu Keadaan Kahar.
- (8) Apabila adanya Keadaan Kahar ditolak untuk diakui oleh **PIHAK** yang diberitahu, maka **PIHAK** yang menyatakan Keadaan Kahar tersebut harus tetap melaksanakan kewajibannya sesuai Nota Kesepakatan ini.
- (9) Jika **PIHAK** yang mengalami Keadaan Kahar berkeberatan atas penolakan oleh **PIHAK** yang diberitahu, maka **PIHAK** yang berkeberatan atas penolakan itu dapat meminta agar keberatannya diselesaikan melalui mekanisme penyelesaian perselisihan sebagaimana diatur dalam Nota Kesepakatan ini.
- (10) Apabila terjadinya Keadaan Kahar tersebut diakui oleh **PIHAK** yang diberitahu, maka **PARA PIHAK** akan merundingkan perubahan-perubahan yang diperlukan agar Nota Kesepakatan ini dapat tetap dilaksanakan.

Demikian Nota Kesepakatan Sinergitas Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Jejaring Pengelolaan Kawasan Konservasi ini dibuat dan ditandatangani secara terpisah dalam rangkap 3 (tiga) dengan 2 (dua) bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama

PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU

ANSAR AHMAD

VICTOR GUSTAAF MANOPPO

Di Tandatangani di :
Pada:

Di Tandatangani di :
Pada:

Lampiran Nota Kesepakatan

Nomor :

Nomor :

**RENCANA KERJA
SINERGITAS PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN PEMBANGUNAN
JEJARING PENGELOLAAN KAWASAN KONSERVASI DI PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

NO	RUANG LINGKUP	KEGIATAN	TUJUAN	INDIKATOR	TARGET	OUTPUT	PERAN PARA PIHAK		SUMBER PEMBIAYAAN	WAKTU PELAKSANAAN				
							PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA		I	II	III	IV	V
1.	Pelestarian dan penguatan basis data Penyu dan Terumbu Karang	Penetapan base line dan monitoring terumbu karang	Mendapatkan T0 dst	Data base tutupan terumbu karang	KK Anambas dan KKD Kepulauan Riau	Tersediany a data base line dan persentase tutupan terumbu karang	Melakukan Monitoring di KK Anambas dan pendampingan monitoring di KKD Kepulauan Riau	Melakukan monitoring terumbu karang di KKD Kepulauan Riau	APBN/ APBD/ Pendanaan Lainnya					
		Identifikasi lokasi habitat peneluran penyu	Penetapan lokasi / stasiun pengamatan	Data base penyu di kawasan konservasi	Estimasi populasi penyu di KK Anambas dan KKD Kepulauan Riau	Tersediany a data identifikasi habitat peneluran dan estimasi populasi penyu	Melakukan identifikasi habitat peneluran penyu KK Anambas dan pendampingan penghitungan estimasi populasi penyu	Melakukan identifikasi habitat peneluran penyu di KKD	APBN/ APBD/ Pendanaan Lainnya					
		Monitoring Penyu	Mendapatkan data T0 dst	Data base penyu di kawasan konservasi	KK Anambas dan KKD Kepulauan Riau	Tersediany an data series konservasi penyu	Melakukan monitoring di KK Anambas dan pendampingan monitoring penyu di KKD Kepulauan Riau	Melaksanakan penetapan base line dan monitoring penyu di KKD	APBN/ APBD/ Pendanaan Lainnya					

NO	RUANG LINGKUP	KEGIATAN	TUJUAN	INDIKATOR	TARGET	OUTPUT	PERAN PARA PIHAK		SUMBER PEMBIAYAAN	WAKTU PELAKSANAAN				
							PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA		I	II	III	IV	V
		Sinkronisasi data terumbu karang dan penyu	Menyamakan format dan informasi data	Tersedianya basis data yang sama	KK Anambas dan KKD Kepulauan Riau	Tersedianya a database terumbu karang dan penyu	Melaksanakan sinkronisasi data terumbu karang dan penyu, serta pendampingan penyusunan data di KKD Kepulauan Riau	Melaksanakan sinkronisasi data terumbu karang dan penyu	APBN/ APBD/ Pendanaan Lainnya					
2.	Pengendalian dan pemanfaatan kawasan konservasi	Penyusunan database dan peta pemanfaatan kawasan konservasi	Menyediakan data spasial pemanfaatan kawasan konservasi	Tersedianya data dan peta spasial pemanfaatan kawasan konservasi	KK Anambas dan KKD Kepulauan Riau	Tersedianya data base dan peta spasial pemanfaatan kawasan konservasi	Melakukan penyusunan database dan peta pemanfaatan kawasan konservasi dan pendampingan penyusunan peta pemanfaatan KKD Kepulauan Riau	Melakukan penyusunan database dan peta pemanfaatan kawasan konservasi	APBN/ APBD/ Pendanaan Lainnya					
3.	Peningkatan kapasitas sumberdaya manusia	Sosialisasi dan Bimbingan Teknis pelestarian terumbu karang dan konservasi penyu	Meningkatkan kapasitas SDM dalam pelestarian terumbu karang dan konservasi penyu	SDM memiliki kemampuan dalam pelestarian terumbu karang dan konservasi penyu	SDM pengelola kawasan konservasi perairan, masyarakat , mitra dan stakeholder terkait	Laporan kegiatan sosialisasi dan bimbingan teknis pelestarian terumbu karang dan konservasi penyu	Menyediakan bahan dukungan dan materi penyadartahuan terkait konservasi penyu dan pelestarian terumbu karang	Melaksanakan kegiatan penyadartahuan terkait konservasi penyu dan pelestarian terumbu karang di KKD Kepulauan Riau	APBN/ APBD/ Pendanaan Lainnya					

NO	RUANG LINGKUP	KEGIATAN	TUJUAN	INDIKATOR	TARGET	OUTPUT	PERAN PARA PIHAK		SUMBER PEMBIAYAAN	WAKTU PELAKSANAAN				
							PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA		I	II	III	IV	V
		Bimbingan teknis pengendalian pemanfaatan kawasan konservasi	Meningkatkan pengetahuan pengelola kawasan dalam pengendalian dan pemanfaatan kawasan konservasi	Pengelola kawasan memiliki pengetahuan dan informasi untuk melakukan pengendalian pemanfaatan kawasan konservasi	Pengelola kawasan KK Anambas dan KKD Kepulauan Riau	Laporan bimbingan teknis pengendalian pemanfaatan kawasan konservasi	Menyediakan bahan dukungan dan pemateri kegiatan penyadartahuan terkait pemanfaatan kawasan konservasi	Melaksanakan kegiatan penyadartahuan terkait pemanfaatan kawasan konservasi	APBN/ APBD/ Pendanaan Lainnya					

PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU

ANSAR AHMAD

VICTOR GUSTAAF MANOPPO



PERJANJIAN KEMITRAAN

ANTARA

**LOKA KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN NASIONAL PEKANBARU
DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN KELAUTAN DAN RUANG LAUT
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**

DAN

**KOMUNITAS KONSERVASI MANGROVE PENYU ALAM DAN KARANG
(KOMPAK)**

NOMOR:

NOMOR:

TENTANG

**PENGELOLAAN EKOWISATA PENYU DAN MANGROVE
DI PULAU PAHAT DAN SENGALONG KAWASAN KONSERVASI
KEPULAUAN ANAMBAS**

Pada hari ini, tanggal, bulan tahun dua ribu dua puluh tiga (...-...-2023), bertempat di Kabupaten Kepulauan Anambas, Provinsi Kepulauan Riau, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : RAHMAT IRFANSYAH

Jabatan : Kepala Loka Kawasan Konservasi Perairan Nasional (LKKPN)
Pekanbaru, Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut,
Kementerian Kelautan dan Perikanan

Alamat : Jalan Budi Luhur, Kelurahan Mentangor, Kecamatan Kulim,
Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, 28286

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama LKKPN Pekanbaru, Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut, Kementerian Kelautan dan Perikanan, yang berkedudukan di Jalan Budi Luhur, Kelurahan Mentangor, Kecamatan Kulim, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, 28286, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.

2. Nama : SYAHRUL HIDAYAT

Jabatan : Ketua Komunitas Konservasi Mangrove Penyu Alam dan Karang
(KOMPAK)

Alamat :Jalan Kampung Melayu, Desa Tarempa Barat, Kecamatan Siantan, Kabupaten Kepulauan Anambas

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Komunitas Konservasi Mangrove Penyu Alam dan Karang yang berkedudukan di Jalan Kampung Melayu, Desa Tarempa Barat, Kecamatan Siantan, Kabupaten Kepulauan Anambas, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Secara bersama-sama untuk selanjutnya disebut sebagai **PARA PIHAK**.

Dengan berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** adalah Unit Pelaksana Teknis (UPT) di bidang Kawasan Konservasi Perairan Nasional, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut, Kementerian Kelautan dan Perikanan, yang mempunyai tugas melaksanakan pemangkuan, pemanfaatan, dan pengawasan kawasan konservasi perairan yang bertujuan untuk melestarikan sumber daya ikan dan lingkungannya, sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2023 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 48/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor 37/PERMEN-KP/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Ruang Laut; dan
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Komunitas masyarakat yang peduli terhadap keberlanjutan sumber daya kelautan yang terdiri dari berbagai latar belakang pendidikan, dan telah menjalankan kegiatan di bidang konservasi dan pelestarian lingkungan dengan melibatkan masyarakat di Kepulauan Anambas.

Oleh karena itu **PARA PIHAK** sepakat melakukan Perjanjian Kemitraan tentang Pengelolaan Ekowisata Penyu dan Mangrove di Pulau Pahat dan Senggalong, Kawasan Konservasi Kepulauan Anambas, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana tertuang dalam pasal-pasal di bawah ini:

Pasal 1 TUJUAN

Tujuan Perjanjian Kemitraan ini adalah untuk mendukung pengelolaan ekowisata penyu dan mangrove Pulau Pahat dan Senggalong Kawasan Konservasi Kepulauan Anambas.

Pasal 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kemitraan ini meliputi:

- a. perlindungan dan rehabilitasi habitat dan populasi ikan;
- b. peningkatan pemahaman dan kesadaran masyarakat; dan
- c. peningkatan pelayanan dan pemanfaatan kawasan untuk pariwisata alam dan perikanan berkelanjutan.

Pasal 3

PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Perjanjian Kemitraan ini dijabarkan lebih lanjut dalam Rencana Aksi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kemitraan ini.
- (2) Dalam melaksanakan Rencana Aksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PARA PIHAK** dapat terlibat secara aktif, bekerja sama dan bersinergi dengan pihak lain.
- (3) Dalam melaksanakan kegiatan dan evaluasi Perjanjian Kemitraan ini **PARA PIHAK** akan menunjuk wakil-wakilnya sesuai dengan kebutuhan, tugas, dan fungsi masing-masing.

Pasal 4

TANGGUNG JAWAB PARA PIHAK

- (1) **PIHAK KESATU** mempunyai tanggung jawab:
 - a. menyiapkan dukungan teknis pelestarian penyu dan mangrove;
 - b. mengolah data dan informasi terkait penyu dan mangrove;
 - c. memberikan dukungan berupa narasumber, bahan/materi, dan/atau kebijakan konservasi penyu dan mangrove; dan
 - d. memberikan layanan pemanfaatan kawasan konservasi untuk kegiatan ekowisata dan perikanan berkelanjutan.
- (2) **PIHAK KEDUA** mempunyai tanggung jawab:
 - a. melakukan pelestarian penyu dan mangrove;
 - b. mengumpulkan data dan informasi terkait penyu dan mangrove;
 - c. Melaksanakan kegiatan penyadartahuan terkait konservasi penyu dan mangrove; dan
 - d. mendukung kegiatan layanan pemanfaatan kawasan konservasi untuk kegiatan ekowisata dan perikanan berkelanjutan (Penerimaan Negara Bukan Pajak - PNBP izin masuk kawasan).

Pasal 5

PEMBIAYAAN

Seluruh biaya yang timbul akibat dari Perjanjian Kemitraan ini akan ditanggung dan dibebankan kepada anggaran masing-masing pihak dan/atau sumber pembiayaan lainnya yang sah dan tidak mengikat berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

- (1) Setiap Kekayaan Intelektual (KI) yang dibawa dan digunakan oleh masing-masing pihak dalam Perjanjian Kemitraan ini tetap menjadi milik masing-masing pihak.

- (2) Pemilik KI dalam pelaksanaan Perjanjian Kemitraan ini yang dibawa dan digunakan oleh masing-masing pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjamin bahwa KI yang dibawa bukan hasil dari pelanggaran hukum dan bertanggung jawab atas semua gugatan yang diajukan oleh pihak manapun terhadap kepemilikan dan keabsahan KI.
- (3) KI yang dihasilkan dari Perjanjian Kemitraan ini menjadi milik bersama **PARA PIHAK** dengan didasarkan pada kontribusi masing-masing pihak dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Publikasi KI yang dihasilkan dari Perjanjian Kemitraan ini wajib mencantumkan keterangan pemegang hak intelektual dan logo **PARA PIHAK**.

Pasal 7 KERAHASIAAN

- (1) Dalam hal terdapat data dan/atau informasi dinyatakan rahasia, **PARA PIHAK** dilarang menggunakan data dan/atau informasi yang berhubungan dengan Perjanjian Kemitraan ini, baik sebagian atau keseluruhan untuk keperluan dan tujuan lain, selain untuk pelaksanaan Perjanjian Kemitraan ini.
- (2) **PARA PIHAK** wajib untuk menjaga kerahasiaan setiap dan semua informasi dan/atau data yang berhubungan dengan Perjanjian Kemitraan ini dan/atau hasil pelaksanaan Perjanjian Kemitraan ini, kecuali hal-hal yang merupakan milik umum (*public domain*) atau diharuskan dibuka berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) **PARA PIHAK** dilarang untuk membuat pengumuman dan/atau memberikan informasi dan/atau data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), kecuali dengan persetujuan tertulis dari **PARA PIHAK**.
- (4) Ketentuan Kerahasiaan dalam pasal ini akan tetap berlaku walaupun Perjanjian Kemitraan telah berakhir dengan sebab apapun.

Pasal 8 PEMANTAUAN DAN EVALUASI

- (1) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Perjanjian Kemitraan ini dilaksanakan secara bersama-sama oleh wakil **PARA PIHAK**, paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun sejak penandatanganan perjanjian.
- (2) Penyusunan laporan hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 disepakati bersama oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 9 PELAPORAN

PARA PIHAK bertanggung jawab dalam menyusun laporan secara berkala dari pelaksanaan Perjanjian Kemitraan ini paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun terhitung sejak Perjanjian Kemitraan ini ditandatangani, dan disampaikan oleh **PIHAK KESATU** kepada Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut, Kementerian Kelautan dan Perikanan, **PIHAK KEDUA** kepada Harbour Energy.

Pasal 10
KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*)

- (1) Salah satu **PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab atas kegagalan atau keterlambatan dalam melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian Kemitraan ini yang disebabkan oleh hal-hal di luar kemampuan yang wajar dari **PARA PIHAK** dan bukan disebabkan kesalahan salah satu pihak atau **PARA PIHAK**, yang selanjutnya dalam Perjanjian Kemitraan ini disebut Keadaan Kahar.
- (2) Kejadian-kejadian berikut adalah keadaan kahar:
 - a. bencana alam;
 - b. wabah;
 - c. perang;
 - d. pemberontakan;
 - e. huru-hara;
 - f. kebakaran;
 - g. pemogokan umum;
 - h. perubahan kebijakan pemerintah.
- (3) Salah satu pihak hanya akan dibebaskan dari kewajibannya berdasarkan Perjanjian Kemitraan ini dengan alasan Keadaan Kahar jika:
 - a. keadaan dimaksud berdampak langsung pada pelaksanaan kewajiban pihak tersebut; dan
 - b. tidak ada unsur kesengajaan dan/atau kelalaian yang dilakukan oleh pihak tersebut.
- (4) Pihak yang mengalami Keadaan Kahar wajib memberitahukan pihak lainnya secara lisan selambat-lambatnya dalam waktu 3 x 24 jam sejak terjadinya Keadaan Kahar yang diikuti dengan pemberitahuan tertulis dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender setelah terjadinya Keadaan Kahar tersebut. Pemberitahuan itu sekurang-kurangnya harus menjelaskan jenis Keadaan Kahar yang terjadi, perkiraan lamanya Keadaan Kahar akan berlangsung dan upaya-upaya penanggulangan yang telah dan akan dilakukan oleh pihak yang mengirimkan pemberitahuan.

Pasal 11
MASA BERLAKU

- (1) Perjanjian Kemitraan ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani Perjanjian Kemitraan ini dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan atas dasar evaluasi kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) **PARA PIHAK** melakukan konsultasi atas rancangan perpanjangan Perjanjian Kemitraan ini paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Perjanjian Kemitraan ini.
- (3) Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk mengakhiri Perjanjian Kemitraan ini sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pihak tersebut wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya.

- (4) Pengakhiran Perjanjian Kemitraan sebagaimana yang dimaksud ayat (3) tidak mempengaruhi tanggung jawab masing-masing pihak yang harus disesuaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan sebelum berakhirnya Perjanjian Kemitraan ini.

Pasal 12 **PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

Apabila terjadi perselisihan dalam penafsiran dan/atau pelaksanaan Perjanjian Kemitraan ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13 **PEMBERITAHUAN**

- (1) Segala pemberitahuan, peringatan dan lain-lain bentuk penyampaian informasi berkenaan dengan pelaksanaan Perjanjian Kemitraan ini dilakukan secara tertulis kepada masing-masing pihak dengan alamat:

PIHAK KESATU

Kepala Loka Kawasan Konservasi Perairan Nasional Pekanbaru, Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut, Kementerian Kelautan dan Perikanan

Alamat : Jalan Budi Luhur, Kelurahan Mentangor, Kecamatan
Kulim, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, 28286
No Telepon : (0761) 840410
E-mail : pekanbarulkkpn@gmail.com/lkkpn.pekanbaru@kkp.go.id

PIHAK KEDUA

Ketua Komunitas Konservasi Mangrove Penyu Alam dan Karang
Alamat : Jalan Kampung Melayu, Desa Tarempa Barat,
Kecamatan Siantan, Kabupaten Kepulauan Anambas
No Telepon : 081275931083
E-mail : syahrulhidayat72@gmail.com

- (2) Apabila terjadi perubahan alamat pemberitahuan dan/atau struktur organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pihak yang melakukan perubahan alamat dan/atau struktur organisasi berkewajiban memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya dan tidak perlu dilakukan amendemen atas Perjanjian Kemitraan ini.

Pasal 14 **PERUBAHAN**

- (1) Perjanjian Kemitraan ini dapat diubah berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**;
- (2) Perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kemitraan ini diatur dalam bentuk addendum dan/atau amendemen yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kemitraan ini.

Pasal 15
PENUTUP

Perjanjian Kemitraan ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal Perjanjian Kemitraan ini, dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup, dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani **PARA PIHAK**.

Demikian Perjanjian Kemitraan ini dibuat dengan semangat kerja sama yang baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK KEDUA



SYAHRUL HIDAYAT

PIHAK KESATU



RAHMAT IRFANSYAH

Lampiran Perjanjian Kemitraan

Nomor :

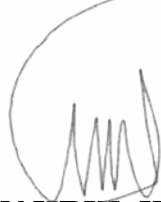
Nomor :

RENCANA AKSI
PENGELOLAAN EKOWISATA PENYU DAN MANGROVE DI PULAU PAHAT DAN SENGGALONG
KAWASAN KONSERVASI KEPULAUAN ANAMBAS

NO	RUANG LINGKUP	PERAN PARA PIHAK		LOKASI	WAKTU	OUTPUT	OUTCOME
		PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA				
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)
1.	Perlindungan dan rehabilitasi habitat dan populasi ikan	Menyiapkan dukungan teknis pelestarian penyu dan mangrove	Melakukan pelestarian penyu dan mangrove	Pulau Pahat, Kawasan Konservasi Kepulauan Anambas & Pantai Senggalong, Desa Temburun, Kecamatan Siantan Timur, Kabupaten Kepulauan Anambas	2023-2026	Terlaksananya paling sedikit 2 (dua) kegiatan konservasi penyu dan mangrove di Pulau Pahat dan Senggalong dalam 1 (satu) tahun	Terkelolanya penyu dan mangrove di Kawasan Konservasi Kepulauan Anambas
		Mengolah data dan informasi terkait penyu dan mangrove	Mengumpulkan data dan informasi terkait penyu dan mangrove			Tersedianya 1 data dan informasi terkait penyu dan mangrove	
2.	Peningkatan pemahaman dan kesadaran masyarakat	Memberikan dukungan berupa narasumber, bahan/materi, dan/atau kebijakan	Melaksanakan kegiatan penyadartahuan terkait konservasi penyu dan mangrove	Pulau Pahat, Kawasan Konservasi Kepulauan Anambas & Pantai Senggalong, Desa Temburun, Kecamatan Siantan	2023-2026	Terlaksananya paling sedikit 2 (dua) kegiatan penyadartahuan dan pelibatan masyarakat terkait konservasi dan pengelolaan	Meningkatnya kesadaran masyarakat terkait konservasi penyu dan mangrove di Kawasan Konservasi

NO	RUANG LINGKUP	PERAN PARA PIHAK		LOKASI	WAKTU	OUTPUT	OUTCOME
		PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA				
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)
		konservasi penyu dan mangrove		Timur, Kabupaten Kepulauan Anambas		penyu dan mangrove	Kepulauan Anambas
3.	Peningkatan dan pelayanan pemanfaatan pariwisata alam dan perikanan berkelanjutan	Memberikan layanan pemanfaatan kawasan konservasi untuk kegiatan ekowisata dan perikanan berkelanjutan	Mendukung kegiatan pelayanan pemanfaatan kawasan konservasi untuk kegiatan ekowisata dan perikanan berkelanjutan (PNBP izin masuk kawasan)	Pulau Pahat, Kawasan Konservasi Kepulauan Anambas & Pantai Senggalong, Desa Temburun, Kecamatan Siantan Timur, Kabupaten Kepulauan Anambas	2023-2026	Terlaksananya paling sedikit 2 (dua) kegiatan pemanfaatan kawasan konservasi yang berizin untuk kegiatan ekowisata dan perikanan berkelanjutan	Terkelolanya kawasan konservasi melalui layanan pemanfaatan pemanfaatan pariwisata alam dan perikanan berkelanjutan

PIHAK KEDUA



SYAHRUL HIDAYAT

PIHAK KESATU



RAHMAT IRFANSYAH



PERJANJIAN KEMITRAAN

ANTARA

**LOKA KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN NASIONAL PEKANBARU
DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN KELAUTAN DAN RUANG
LAUT
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**

DAN

**PT PERTAMINA PATRA NIAGA REGIONAL SUMBAGUT
DPPU MINANGKABAU**

**NOMOR: B.1640/LKKPN/PRL.440/X/2023
NOMOR: 680/PND425000/2023-S5**

TENTANG

**PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI LAUT DI KAWASAN
KONSERVASI PULAU PIEH DAN LAUT SEKITARNYA**

Pada hari ini Rabu, tanggal empat, bulan sepuluh tahun dua ribu dua puluh tiga (04-10-2023), bertempat di Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, yang bertanda tangan di bawah ini:

- 1. Nama : RAHMAT IRFANSYAH**
Jabatan : Kepala Loka Kawasan Konservasi Perairan Nasional (LKKPN) Pekanbaru, Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut, Kementerian Kelautan dan Perikanan
Alamat : Jalan Budi Luhur, Kelurahan Mentangor, Kecamatan Kulim, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, 28286

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama LKKPN Pekanbaru, Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut, Kementerian Kelautan dan Perikanan, yang berkedudukan di Jalan Budi Luhur, Kelurahan Mentangor, Kecamatan Kulim, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, 28286, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.

2. Nama : I KOMANG BUDHIARTA

Jabatan : Operation Head PT. Pertamina Patra Niaga Regional Sumatera Bagian Utara (Sumbagut) Depot Pengisian Pesawat Udara (DPPU) Minangkabau

Alamat : Jl. MR.S.T.Moh. Rasjid Komplek Bandara Internasional Minangkabau, Katapiang, Kec. Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat, 25586

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut DPPU Minangkabau yang berkedudukan di Jalan MR.S.T.Moh. Rasjid, Komplek Bandara Internasional Minangkabau, Katapiang, Kecamatan Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Secara bersama-sama untuk selanjutnya disebut sebagai **PARA PIHAK**.

Dengan berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** adalah Unit Pelaksana Teknis (UPT) di bidang Kawasan Konservasi Perairan Nasional, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut, Kementerian Kelautan dan Perikanan, yang mempunyai tugas melaksanakan pemangkuhan, pemanfaatan, dan pengawasan kawasan konservasi perairan yang bertujuan untuk melestarikan sumber daya ikan dan lingkungannya berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor 37/PERMEN-KP/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Ruang Laut; dan
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Perusahaan Badan Usaha Milik Negara dalam bisnis hilir minyak dan gas yang beroperasi di Komplek Bandara Internasional Minangkabau, Katapiang, Kecamatan Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat, yang melakukan berbagai kegiatan di bidang keberlanjutan sosial dan ekologi di wilayah Sumatera Barat.

Oleh karena itu **PARA PIHAK** sepakat melakukan Perjanjian Kemitraan tentang Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Laut di Kawasan Konservasi Pulau Pieh dan Laut Sekitarnya, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana tertuang dalam pasal-pasal di bawah ini:

Pasal 1 **Tujuan**

Tujuan Perjanjian Kemitraan ini adalah untuk melakukan upaya penguatan efektivitas pengelolaan Kawasan Konservasi Nasional LKKPN Pekanbaru Wilayah Kerja Kawasan Konservasi Pulau Pieh dan Laut Sekitarnya di Provinsi Sumatera Barat.

Pasal 2

Ruang Lingkup

Ruang lingkup Perjanjian Kemitraan ini meliputi:

- a. pelestarian dan rehabilitasi habitat dan populasi ikan;
- b. peningkatan pemahaman dan kesadaran masyarakat; dan
- c. penguatan sosial ekonomi masyarakat sekitar kawasan konservasi.

Pasal 3

Pelaksanaan

- (1) Pelaksanaan Perjanjian Kemitraan ini dijabarkan lebih lanjut dalam Rencana Aksi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kemitraan ini.
- (2) Dalam melaksanakan Rencana Aksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PARA PIHAK** dapat terlibat secara aktif, bekerja sama dan bersinergi dengan pihak lain.
- (3) Dalam melaksanakan kegiatan dan evaluasi Perjanjian Kemitraan ini **PARA PIHAK** akan menunjuk wakil-wakilnya sesuai dengan kebutuhan, tugas, dan fungsi masing-masing.

Pasal 4

Tanggung Jawab Para Pihak

- (1) **PIHAK KESATU** mempunyai tanggung jawab:
 - a. menyiapkan dukungan teknis konservasi penyu dan terumbu karang;
 - b. memberikan dukungan kepakaran, materi, pendampingan dan/atau koordinasi pada kegiatan penyadartahuan terkait konservasi penyu, terumbu karang, pengendalian sampah laut dan pesisir;
 - c. memberikan rekomendasi dan pendampingan teknis untuk penguatan sosial ekonomi masyarakat sekitar kawasan konservasi melalui pengelolaan sampah dan aktivitas ekowisata; dan
- (2) **PIHAK KEDUA** mempunyai tanggung jawab:
 - a. memfasilitasi dukungan pengelolaan habitat penyu dan terumbu karang serta memberikan pendampingan ke kelompok masyarakat;
 - b. melaksanakan kegiatan penyadartahuan terkait konservasi penyu, terumbu karang, pengendalian sampah laut dan pesisir; dan
 - c. memberikan penguatan sosial ekonomi masyarakat sekitar kawasan konservasi melalui pengelolaan sampah dan aktivitas ekowisata.

Pasal 5

Pembiayaan

Seluruh biaya yang timbul akibat dari Perjanjian Kemitraan ini akan ditanggung dan dibebankan kepada anggaran masing-masing pihak dan/atau sumber pembiayaan lainnya yang sah dan tidak mengikat

berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6 **Hak Kekayaan Intelektual**

- (1) Setiap Kekayaan Intelektual (KI) yang dibawa dan digunakan oleh masing-masing pihak dalam Perjanjian Kemitraan ini tetap menjadi milik masing-masing pihak.
- (2) Pemilik KI dalam pelaksanaan Perjanjian Kemitraan ini yang dibawa dan digunakan oleh masing-masing pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjamin bahwa KI yang dibawa bukan hasil dari pelanggaran hukum dan bertanggung jawab atas semua gugatan yang diajukan oleh pihak manapun terhadap kepemilikan dan keabsahan KI.
- (3) KI yang dihasilkan dari Perjanjian Kemitraan ini menjadi milik bersama **PARA PIHAK** dengan didasarkan pada kontribusi masing-masing pihak dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Publikasi KI yang dihasilkan dari Perjanjian Kemitraan ini wajib mencantumkan keterangan pemegang hak intelektual dan logo **PARA PIHAK**.

Pasal 7 **Kerahasiaan**

- (1) Dalam hal terdapat data dan/atau informasi dinyatakan rahasia, **PARA PIHAK** dilarang menggunakan data dan/atau informasi yang berhubungan dengan Perjanjian Kemitraan ini, baik sebagian atau keseluruhan untuk keperluan dan tujuan lain, selain untuk pelaksanaan Perjanjian Kemitraan ini.
- (2) **PARA PIHAK** wajib untuk menjaga kerahasiaan setiap dan semua informasi dan/atau data yang berhubungan dengan Perjanjian Kemitraan ini dan/atau hasil pelaksanaan Perjanjian Kemitraan ini, kecuali hal-hal yang merupakan milik umum (*public domain*) atau diharuskan dibuka berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) **PARA PIHAK** dilarang untuk membuat pengumuman dan/atau memberikan informasi dan/atau data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), kecuali dengan persetujuan tertulis dari **PARA PIHAK**.
- (4) Ketentuan Kerahasiaan dalam pasal ini akan tetap berlaku walaupun Perjanjian Kemitraan telah berakhir dengan sebab apapun.

Pasal 8 **Pemantauan dan Evaluasi**

- (1) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Perjanjian Kemitraan ini dilaksanakan secara bersama-sama oleh wakil **PARA PIHAK**, paling

sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun sejak penandatanganan perjanjian.

- (2) Penyusunan laporan hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 disepakati bersama oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 9 **Pelaporan**

PARA PIHAK bertanggung jawab dalam menyusun laporan secara berkala dari pelaksanaan Perjanjian Kemitraan ini paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun terhitung sejak Perjanjian Kemitraan ini ditandatangani, dan disampaikan oleh **PIHAK KESATU** kepada Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut, Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Pasal 10 **Keadaan Kahar (*Force Majeure*)**

- (1) Salah satu **PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab atas kegagalan atau keterlambatan dalam melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian Kemitraan ini yang disebabkan oleh hal-hal di luar kemampuan yang wajar dari **PARA PIHAK** dan bukan disebabkan kesalahan salah satu pihak atau **PARA PIHAK**, yang selanjutnya dalam Perjanjian Kemitraan ini disebut Keadaan Kahar.
- (2) Kejadian-kejadian berikut adalah keadaan Keadaan Kahar: kerusakan masal, perang saudara, pemberontakan, perebutan kekuasaan, perang dengan negara lain atau terorisme; gempa bumi, banjir, wabah penyakit/pandemi, kebakaran, ledakan gunung berapi dan/atau bencana alam lainnya; sengketa hubungan industrial atau pemogokan masal yang terjadi di tingkat nasional maupun daerah; atau perubahan peraturan perundang-undangan nasional maupun daerah secara material.
- (3) Salah satu pihak hanya akan dibebaskan dari kewajibannya berdasarkan Perjanjian Kemitraan ini dengan alasan Keadaan Kahar jika: a) keadaan dimaksud berdampak langsung pada pelaksanaan kewajiban pihak tersebut, dan b) tidak ada unsur kesengajaan dan/atau kelalaian yang dilakukan oleh pihak tersebut.
- (4) Pihak yang mengalami Keadaan Kahar wajib memberitahukan pihak lainnya secara lisan selambat-lambatnya dalam waktu 3x24 jam sejak terjadinya Keadaan Kahar yang diikuti dengan pemberitahuan tertulis dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender setelah terjadinya Keadaan Kahar tersebut. Pemberitahuan itu sekurang-kurangnya harus menjelaskan jenis Keadaan Kahar yang terjadi, perkiraan lamanya Keadaan Kahar akan berlangsung dan upaya-upaya penanggulangan yang telah dan akan dilakukan oleh pihak yang mengirimkan pemberitahuan.

Pasal 11

Masa Berlaku

- (1) Perjanjian Kemitraan ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani Perjanjian Kemitraan ini dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan atas dasar evaluasi kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) **PARA PIHAK** melakukan konsultasi atas rancangan perpanjangan Perjanjian Kemitraan ini paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Perjanjian Kemitraan ini.
- (3) Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk mengakhiri Perjanjian Kemitraan ini sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pihak tersebut wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya.
- (4) Pengakhiran Perjanjian Kemitraan sebagaimana yang dimaksud ayat (3) tidak mempengaruhi tanggung jawab masing-masing pihak yang harus disesuaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan sebelum berakhirnya Perjanjian Kemitraan ini.

Pasal 12

Penyelesaian Perselisihan

Apabila terjadi perselisihan dalam penafsiran dan/atau pelaksanaan Perjanjian Kemitraan ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

Pemberitahuan

- (1) Segala pemberitahuan, peringatan dan lain-lain bentuk penyampaian informasi berkenaan dengan pelaksanaan Perjanjian Kemitraan ini dilakukan secara tertulis kepada masing-masing pihak dengan alamat:

PIHAK KESATU

Kepala Loka Kawasan Konservasi Perairan Nasional Pekanbaru, Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut, Kementerian Kelautan dan Perikanan

Alamat : Jalan Budi Luhur, Kelurahan Mentangor, Kecamatan
Kulim, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, 28286

No Telepon : (0761) 840410

E-mail : pekanbarulkkpn@gmail.com
kkpn.pekanbaru@kkp.go.id

PIHAK KEDUA

Operation Head PT. Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut DPPU
Minangkabau

Alamat : Jalan MR.S.T.Moh. Rasjid, Komplek Bandara
Internasional Minangkabau, Katapiang, Kecamatan
Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera
Barat

No Telepon : (0751) 819065

E-mail : aviation.pdg@pertamina.com

- (2) Apabila terjadi perubahan alamat pemberitahuan dan/atau struktur organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pihak yang melakukan perubahan alamat dan/atau struktur organisasi berkewajiban memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya dan tidak perlu dilakukan amendemen atas Perjanjian Kemitraan ini.

**Pasal 14
Perubahan**

- (1) Perjanjian Kemitraan ini dapat diubah berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**;
- (2) Perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kemitraan ini diatur dalam bentuk addendum dan/atau amendemen yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kemitraan ini.

**Pasal 15
Penutup**

Perjanjian Kemitraan ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal Perjanjian Kemitraan ini, dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup, dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani **PARA PIHAK**.

Demikian Perjanjian Kemitraan ini dibuat dengan semangat kerja sama yang baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK KEDUA**I KOMANG BUDHIARTA****PIHAK KESATU****RAHMAT IRFANSYAH**

Lampiran Perjanjian Kemitraan
 Nomor : B.1640/LKKPN/PRL.440/X/2023
 Nomor : 680/PND425000/2023-S5

RENCANA AKSI
PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI LAUT DI KAWASAN KONSERVASI PULAU PIEH

NO	RUANG LINGKUP	PERAN PARA PIHAK		LOKASI	WAKTU	OUTPUT	OUTCOME
		PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA				
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)
1.	Pelestarian dan rehabilitasi habitat dan populasi ikan	Menyiapkan dukungan teknis konservasi penyu dan terumbu karang	Memfasilitasi dukungan pengelolaan habitat penyu dan terumbu karang serta memberikan pendampingan ke kelompok masyarakat	Pulau Bando, Kawasan Konservasi Pulau Pieh	2023-2025	Terlaksananya paling sedikit 1 (satu) kegiatan penguatan pengelolaan habitat penyu dan terumbu karang dalam 1 (satu) tahun	Terjaganya habitat penyu & ekosistem terumbu karang di Kawasan Konservasi Pulau Pieh
2.	Peningkatan pemahaman dan kesadaran masyarakat	Memberikan dukungan kepakaran, materi, pendampingan dan/ atau koordinasi pada kegiatan penyadartahuan terkait konservasi penyu, terumbu karang, pengendalian	Melaksanakan kegiatan penyadartahuan terkait konservasi penyu, terumbu karang, pengendalian sampah laut dan pesisir	Sekitar Kawasan Konservasi Pulau Pieh	2023-2025	Terlaksananya paling sedikit 2 (dua) kali kegiatan penyadartahuan dan pelibatan masyarakat terkait konservasi dan pengelolaan penyu, terumbu karang, pengendalian sampah laut dan pesisir	Meningkatnya kesadaran masyarakat terkait pentingnya keanekaragaman hayati laut di sekitar Kawasan Konservasi Pulau Pieh

NO	RUANG LINGKUP	PERAN PARA PIHAK		LOKASI	WAKTU	OUTPUT	OUTCOME
		PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA				
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)
		sampah laut dan pesisir					
3.	Penguatan Sosial Ekonomi Masyarakat Sekitar Kawasan Konservasi	Memberikan rekomendasi dan pendampingan teknis untuk penguatan sosial ekonomi masyarakat sekitar kawasan konservasi melalui pengelolaan sampah dan aktivitas ekowisata	Memberikan penguatan sosial ekonomi masyarakat sekitar kawasan konservasi melalui pengelolaan sampah dan aktivitas ekowisata	Sekitar Kawasan Konservasi Pulau Pieh	2023-2025	Terlaksananya paling sedikit 2 (dua) jenis kegiatan penguatan sosial ekonomi masyarakat	Terkelolanya Sekitar Kawasan Konservasi Pulau Pieh melalui penguatan sosial ekonomi masyarakat

PIHAK KEDUA



I KOMANG BUDHIARTA

PIHAK KESATU



RAHMAT IRFANSYAH



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN RUANG LAUT
LOKA KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN NASIONAL
PEKANBARU**

JALAN BUDI LUHUR KELURAHAN MENTANGOR PEKANBARU-RIAU 28286
TELEPON/FAKSIMILE (0761) 8404510
LAMAR www.kkp.go.id SUREL kkpn.pekanbaru@kkp.go.id

**BERITA ACARA SERAH TERIMA
BANTUAN KONSERVASI TAHUN 2023
NOMOR: B.778/LKKPN/PL.450/V/2023**

Pada hari ini Jum'at tanggal Lima Bulan Mei Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, yang bertanda tangan di bawah ini :

I. Nama : **Fajar Kurniawan, ST. M.AP. M.MG**
Jabatan : Kepala Loka Kawasan Konservasi Perairan Nasional (LKKPN) Pekanbaru selaku Kuasa Pengguna Barang
Alamat : Jalan Budi Luhur, Kelurahan Mentangor, Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau

Bertindak untuk dan atas nama Menteri Kelautan dan Perikanan selaku Pengguna Barang, berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Timur No. 16, Jakarta Pusat, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

II. Nama : **Tomi Syamsuar**
Jabatan : Ketua Kelompok Masyarakat Penggerak Konservasi (KOMPAK) Tabuik Diving Club
Alamat : Jalan Syech Abdul Arief, Desa Ampalu, Kecamatan Pariaman Utara, Kota Pariaman, Provinsi Sumatera Barat.

untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Dengan ini menyatakan sebagai berikut:

1. **PIHAK KESATU** menyerahkan hasil pengadaan Bantuan Konservasi dari Pejabat Pembuat Komitmen Satuan Kerja Loka Kawasan Konservasi Perairan Nasional (LKKPN) Pekanbaru kepada **PIHAK KEDUA**, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Berita Acara ini.

2. **PIHAK KEDUA** telah memeriksa dan menerima dengan baik hasil penyerahan barang/jasa dari **PIHAK KESATU**.
3. **PIHAK KEDUA** menyetujui kewajiban memelihara dan mengoperasikan barang/jasa hasil penyerahan dari **PIHAK KESATU** sesuai Petunjuk Teknis.
4. **PIHAK KEDUA** bersedia untuk mengalihkan barang/jasa Bantuan Pemerintah yang diterima atas persetujuan **PIHAK KESATU** kepada penerima lain, jika tidak sanggup memelihara, mengelola, dan memanfaatkan Bantuan Pemerintah.

Demikian Berita Acara Serah Terima ini dibuat dengan sebenarnya dan ditandatangani oleh Para Pihak pada hari ini dan tanggal tersebut di atas, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KESATU

Kuasa Pengguna Barang,

PIHAK KEDUA

Ketua KOMPAK Tabuik Diving Club,



Fajar Kurniawan, ST, M.AP, M.MG

NIP. 19760804 200312 1 003



Tomi Syamsuar

**LAMPIRAN BERITA ACARA SERAH TERIMA
BANTUAN KONSERVASI TAHUN 2023**

Nomor : B.778/LKKPN/PL.450/V/2023
Tanggal : 5 Mei 2023

DAFTAR BARANG/JASA YANG DISERAHTERIMAKAN

No.	Nama Barang	Vol	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Total Harga (Rp)
1	Regulator Cressi AC2 XS Compact	2	Unit	4.968.500	9.937.000
2	Octopus Cressi XS Compact	2	Unit	1.426.500	2.853.000
3	Amscud Console	2	Unit	2.146.500	4.293.000
4	BCD Cressi	2	Unit	6.568.500	13.137.000
5	Tabung Amscud 80 Cuft	2	Unit	4.500.000	9.000.000
6	Amscud Pemberat Diving no.2 (1 KG)	10	Unit	99.750	997.500
7	Weight Belt Amscud Kepala Plastik	2	Unit	131.500	263.000
8	Wetsuit Amscud X-Admiral Size 4	2	Unit	2.437.500	4.875.000
9	Amscud Stagy Bag Blue	2	Unit	599.000	1.198.000
10	Amscud Sausage SMB 1,5M	1	Unit	550.000	550.000
11	Reel Amscud Spool 15 meter 45 Ft W/Brass Clip	1	Unit	140.000	140.000
12	Amscud Aluminium Tickle Stick Green	2	Unit	98.000	196.000
13	Fin Amscud Orca 43-44 (L) Black	2	Unit	679.500	1.359.000
14	Combo MS Amscud Fortec Black SIL Aqua/Green	1	Unit	600.000	600.000
15	Combo MS Amscud Fortec Black SIL Aqua-Black	1	Unit	600.000	600.000
TOTAL NILAI PEROLEHAN					Rp49.998.500
Terbilang: Empat Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Rupiah					

PIHAK KESATU

Kuasa Pengguna Barang,

PIHAK KEDUA

Ketua KOMPAK Tabuik Diving Club,



Fajar Kurniawan, ST, M.AP, M.MG
NIP. 19760804 200312 1 003

Tomi Syamsuar



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN RUANG LAUT
LOKA KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN NASIONAL
PEKANBARU**

JALAN BUDI LUHUR KELURAHAN MENTANGOR PEKANBARU-RIAU 28286
TELEPON/FAKSIMILE (0761) 8404510

LAMAM www.kkp.go.id SUREL lkkn.pekanbaru@kkp.go.id

**BERITA ACARA SERAH TERIMA
BANTUAN KONSERVASI TAHUN 2023**

NOMOR: B.1035/LKKPN/PL.450/VI/2023

Pada hari ini Kamis tanggal Dua Puluh Dua bulan Juni tahun Dua Ribu Dua puluh Tiga, yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. Nama : **Fajar Kurniawan, ST. M.AP. M.MG**
 Jabatan : Kepala Loka Kawasan Konservasi Perairan Nasional
 (LKKPN) Pekanbaru selaku Kuasa Pengguna Barang
 Alamat : Jalan Budi Luhur, Kelurahan Mentangor, Kecamatan
 Tenayan Raya, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau

Bertindak untuk dan atas nama Menteri Kelautan dan Perikanan selaku Pengguna Barang, berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Timur No. 16, Jakarta Pusat, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

- II. Nama : **Syahrul Hidayat, S.Tr.Pi**
 Jabatan : Ketua Kelompok Masyarakat Penggerak Konservasi
 (KOMPAK) Komunitas Konservasi Mangrove Penyu
 Alam dan Karang (KOMPAK)
 Alamat : Jalan Kampung Melayu, No. 43 RT.006/RW.002, Desa
 Tarempa Barat, Kecamatan Siantan, Kabupaten
 Kepulauan Anambas, Kepulauan Riau

untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Dengan ini menyatakan sebagai berikut:

1. **PIHAK KESATU** menyerahkan hasil pengadaan Bantuan Konservasi dari Pejabat Pembuat Komitmen Satuan Kerja Loka Kawasan Konservasi Perairan Nasional (LKKPN) Pekanbaru kepada **PIHAK KEDUA**, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Berita Acara ini.

2. **PIHAK KEDUA** telah memeriksa dan menerima dengan baik hasil penyerahan barang/jasa dari **PIHAK KESATU**.
3. **PIHAK KEDUA** menyetujui kewajiban memelihara dan mengoperasikan barang/jasa hasil penyerahan dari **PIHAK KESATU** sesuai Petunjuk Teknis.
4. **PIHAK KEDUA** bersedia untuk mengalihkan barang/jasa Bantuan Pemerintah yang diterima atas persetujuan **PIHAK KESATU** kepada penerima lain, jika tidak sanggup memelihara, mengelola, dan memanfaatkan Bantuan Pemerintah.

Demikian Berita Acara Serah Terima ini dibuat dengan sebenarnya dan ditandatangani oleh Para Pihak pada hari ini dan tanggal tersebut di atas, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KESATU

Kuasa Pengguna Barang,



Fajar Kurniawan, ST, M.AP, M.MG

NIP. 19760804 200312 1 003

PIHAK KEDUA

Ketua KOMPAK Komunitas Konservasi
Mangrove Penyu Alam dan Karang
(KOMPAK)



Syahrul Hidayat, S.Tr.Pi

**LAMPIRAN BERITA ACARA SERAH TERIMA
BANTUAN KONSERVASI TAHUN 2023**

Nomor : B.1035/LKKPN/PL.450/VI/2023
Tanggal : 22 Juni 2023

DAFTAR BARANG/JASA YANG DISERAHTERIMAKAN

No.	Nama Barang	Vol	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Total Harga (Rp)
1	Kayak VUE I Transparant	1	Unit	22.267.400	22.267.400
2	Kamera Digital Fujifilm X-T30 II Mirrorless	1	Unit	18.800.000	18.800.000
3	Notebook Acer Travelmate P214 Core I5	1	Unit	14.400.000	14.400.000
4	Go Pro Hero 11 Black Action	1	Unit	10.750.000	10.750.000
5	Handy Talky ICOM IC-V80	2	Unit	1.400.000	2.800.000
6	Fin Amscud	4	Unit	679.500	2.718.000
7	Combo MS Amscud Fortec	4	Unit	600.000	2.400.000
8	Windnest Double Hammock	2	Unit	595.000	1.190.000
9	Tenda Santalum 4P	1	Unit	1.069.000	1.069.000
TOTAL NILAI PEROLEHAN					Rp76.394.400
Terbilang: Tujuh Puluh Enam Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Empat Ratus Rupiah					

PIHAK KESATU

Kuasa Pengguna Barang,

Fajar Kurniawan, ST, M.AP, M.MG

NIP. 19760804 200312 1 003

PIHAK KEDUA

Ketua KOMPAK Komunitas Konservasi
Mangrove Penyuluhan Alam dan Karang
(KOMPAK)

Syahrul Hidayat, S.Tr.Pi



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN RUANG LAUT
LOKA KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN NASIONAL
PEKANBARU**

JALAN BUDI LUHUR KELURAHAN MENTANGOR PEKANBARU-RIAU 28286

TELEPON/FAKSIMILE (0761) 8404510

LAMAR www.kkp.go.id SUREL lkkn.pekanbaru@kkp.go.id

**BERITA ACARA SERAH TERIMA
BANTUAN KONSERVASI TAHUN 2023
NOMOR: B.1036/LKKPN/PL.450/VI/2023**

Pada hari ini Kamis tanggal Dua Puluh Dua bulan Juni tahun Dua Ribu Dua puluh Tiga, yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. Nama : **Fajar Kurniawan, ST. M.AP. M.MG**
 Jabatan : Kepala Loka Kawasan Konservasi Perairan Nasional
 (LKKPN) Pekanbaru selaku Kuasa Pengguna Barang
 Alamat : Jalan Budi Luhur, Kelurahan Mentangor, Kecamatan
 Tenayan Raya, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau

Bertindak untuk dan atas nama Menteri Kelautan dan Perikanan selaku Pengguna Barang, berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Timur No. 16, Jakarta Pusat, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

- II. Nama : **Dasril**
 Jabatan : Ketua Kelompok Masyarakat Penggerak Konservasi
 (KOMPAK) KUB Anggoli
 Alamat : Jalan Tanjung Lambai RT.002/RW.004, Desa Sri
 Tanjung, Kecamatan Siantan, Kabupaten Kepulauan
 Anambas, Kepulauan Riau

untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Dengan ini menyatakan sebagai berikut:

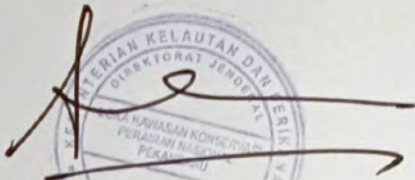
1. **PIHAK KESATU** menyerahkan hasil pengadaan Bantuan Konservasi dari Pejabat Pembuat Komitmen Satuan Kerja Loka Kawasan Konservasi Perairan Nasional (LKKPN) Pekanbaru kepada **PIHAK KEDUA**, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Berita Acara ini.

2. **PIHAK KEDUA** telah memeriksa dan menerima dengan baik hasil penyerahan barang/jasa dari **PIHAK KESATU**.
3. **PIHAK KEDUA** menyetujui kewajiban memelihara dan mengoperasikan barang/jasa hasil penyerahan dari **PIHAK KESATU** sesuai Petunjuk Teknis.
4. **PIHAK KEDUA** bersedia untuk mengalihkan barang/jasa Bantuan Pemerintah yang diterima atas persetujuan **PIHAK KESATU** kepada penerima lain, jika tidak sanggup memelihara, mengelola, dan memanfaatkan Bantuan Pemerintah.

Demikian Berita Acara Serah Terima ini dibuat dengan sebenarnya dan ditandatangani oleh Para Pihak pada hari ini dan tanggal tersebut di atas, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KESATU

Kuasa Pengguna Barang,



Fajar Kurniawan, ST, M.AP, M.MG

NIP. 19760804 200312 1 003

PIHAK KEDUA

Ketua KOMPAK KUB Anggoli,



Dasril

**LAMPIRAN BERITA ACARA SERAH TERIMA
BANTUAN KONSERVASI TAHUN 2023**

Nomor : B.1036/LKKPN/PL.450/VI/2023
Tanggal : 22 Juni 2023

DAFTAR BARANG/JASA YANG DISERAHTERIMAKAN

No.	Nama Barang	Vol	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Total Harga (Rp)
1	Fish Finder FCV-688	4	Unit	18.400.000	73.600.000
TOTAL NILAI PEROLEHAN					Rp73.600.000
Terbilang: Tujuh Puluh Tiga Juta Enam Ratus Ribu Rupiah					

PIHAK KESATU

Kuasa Pengguna Barang,

Fajar Kurniawan, ST, M.AP, M.MG

NIP. 19760804 200312 1 003

PIHAK KEDUA

Ketua KOMPAK KUB Anggoli,

Dasril

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN RUANG LAUT

MEMORANDUM
Nomor: 107/DJPRL.1/TU.220/I/2024

Yth : Sekretaris Direktorat Jenderal PKRL
Dari : Ketua Tim Kerja Pengelolaan Keuangan dan BMN
Hal : Capaian PNBP Lingkup Ditjen PKRL Tahun 2023
Lampiran : satu (1) lembar
Tanggal : 11 Januari 2024

Sehubungan dengan Indikator Kinerja Nilai Capaian PNBP lingkup Direktorat Jenderal PKRL Tahun 2023, bersama ini kami sampaikan capaian PNBP sebesar Rp704.349.456.508,00 dari target yang telah ditetapkan sesuai dengan Perjanjian Kinerja tahun 2023 sebesar Rp333.169.648.000,00 atau 211,41% yang berasal dari PNBP fungsional dan PNBP KSP Pulau Nipa. Adapun capaian PNBP fungsional masing masing satker sebagai terlampir.

Demikian disampaikan. atas perhatiannya diucapkan terima kasih.



Ony Satiti

Lampiran surat

Nomor : 107/DJPRL.1/TU.220/I/2024

Tanggal : 11 Januari 2024

No	Satker	Target PNB dalam PK (Rp)	Realisasi PNB (Rp)	Realisasi PNB (%)
1	Direktorat Jasa Kelautan	12.431.094.000	169.327.754.043	1362,13
2	Direktorat PRL	300.017.190.000	475.538.657.172	158,50
3	Direktorat P4K	2.914.608.000	34.499.124.127	1183,66
4	Direktorat KKHL	9.850.642.000	10.631.068.752	107,92
5	BPSPL Padang	524.347.000	958.877.695	182,87
6	BPSPL Denpasar	850.000.000	3.037.033.914	357,30
7	BPSPL Pontianak	900.000.000	2.374.620.820	263,85
8	BPSPL Makassar	675.000.000	882.681.301	130,77
9	LPSPL Serang	2.550.000.000	3.030.253.433	118,83
10	LPSPL Sorong	718.180.000	1.647.742.751	229,43
11	BKKPN Kupang	1.725.000.000	2.369.683.750	137,37
12	LKKPN Pekanbaru	13.587.000	51.958.750	382,42
	Total	333.169.648.000	704.349.456.508	211,41

Ony Satiti

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
SEKRETARIAT JENDERAL

NOTA DINAS
NOMOR 1903/SJ.2/TU.210/XI/2023

Yth : 1. Sekretaris Inspektorat Jenderal
2. Para Sekretaris Direktorat Jenderal
3. Para Sekretaris Badan
4. Kepala Biro Umum dan Pengadaan Barang/Jasa
5. Direktur Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan
6. Kepala Balai Pengelolaan Sumber Daya Informasi Kelautan dan Perikanan

Dari : Kepala Biro Keuangan

Hal : Perubahan Target Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Tahun 2023 dan 2024

Tanggal : 6 November 2023

Menindaklanjuti Nota Dinas Kepala Biro Perencanaan Nomor 938/SJ.1/RC.610/XI/2023 tanggal 1 November 2023 hal Hasil Pembahasan Indikator Kinerja Manajerial Tahun 2024 (*copy* surat terlampir), dengan ini diberitahukan berdasarkan Nota Dinas dimaksud terdapat perubahan target IKPA:

Tahun	Semula	Berubah Menjadi	Kewajiban Pencantuman Pada IKU/PK Tahun 2023 dan 2024
2023	89	93,75	Level 0, Level 1, Level 2 (Satker Pusat, UPT, Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan)
2024	90	93,76	Level 0, Level 1, Level 2 (Satker Pusat, UPT, Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan)

Berkaitan IKPA sudah menjadi Indikator Kinerja Utama Satuan Kerja di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan dan dengan adanya perubahan target IKPA Tahun 2023 dan 2024 tersebut, Saudara wajib melakukan perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2023.

Mengingat substansi Nota Dinas ini sangat penting, dimohon bantuan Saudara supaya menginformasikan kepada Satuan Kerja yang menjadi tanggung jawabnya.

Atas perhatian dan kerja sama Saudara, diucapkan terima kasih.



Setyawati

**Ditandatangani
Secara Elektronik**

Tembusan:

1. Plt. Sekretaris Jenderal
2. Kepala Biro Perencanaan

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
SEKRETARIAT JENDERAL

NOTA DINAS
NOMOR 100/SJ.2/TU.210/I/2024

Yth : 1. Sekretaris Inspektorat Jenderal
2. Para Sekretaris Direktorat Jenderal
3. Para Sekretaris Badan
4. Kepala Biro Umum dan Pengadaan Barang/Jasa
5. Kepala Balai Pengelolaan Informasi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

Dari : Kepala Biro Keuangan

Hal : Capaian Indikator Kinerja Utama Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan Triwulan IV Tahun 2023

Tanggal : 10 Januari 2024

Menindaklanjuti Memorandum Kepala Biro Perencanaan Nomor 20/SJ.1/RC.610/I/2024 tanggal 3 Januari 2024 hal Penyampaian Data Capaian Indikator Kinerja Manajerial Triwulan IV Tahun 2023, dengan ini kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Penarikan data capaian IKU IKPA triwulan IV tahun 2023 berdasarkan aplikasi OMSPAN yang dilakukan pada tanggal 10 Januari 2024 pukul 07.30.
2. Capaian IKU IKPA Triwulan IV tahun 2023 KKP sebesar 91,90 dari target nilai 93,75.
3. Terlampir kami sampaikan data capaian IKU IKPA level 0 (KKP), level 1 (Unit Eselon I) dan level 2 (Satker). Data tersebut dapat digunakan sebagai penetapan capaian nilai IKU IKPA triwulan IV tahun 2023 pada Unit Eselon I dan Satker lingkup KKP.

Meningat pentingnya Nota Dinas ini, kami mohon bantuan Saudara untuk dapat menyampaikan Nota Dinas capaian IKPA ini kepada seluruh Satker lingkup unit kerja masing-masing.

Atas perhatian dan kerja samanya, kami mengucapkan terima kasih.



**Ditandatangani
Secara Elektronik**

Setyawati

Tembusan:
Kepala Biro Perencanaan



INDIKATOR PELAKSANAAN ANGGARAN

Sampai Dengan : DESEMBER

No	Kode KL	Nama KL	Keterangan	Kualitas Perencanaan Anggaran		Kualitas Pelaksanaan Anggaran					Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran	Nilai Total	Konversi Bobot	Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot)
				Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP	Dispensasi SPM	Capaian Output			
1	032	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN	Nilai	100.00	68.93	85.57	93.10	99.17	95.72	85.00	99.73	91.99	100%	91.99
			Bobot	10	10	20	10	10	10	5	25			
			Nilai Akhir	10.00	6.89	17.11	9.31	9.92	9.57	4.25	24.93			
			Nilai Aspek	84.47		91.71					99.73			

**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA****KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**

18	042	032	567538	STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN PONTIANAK	Nilai	100.00	80.29	100.00	94.00	100.00	97.74	100.00	100.00	97.20	100%	97.20
					Bobot	10	10	20	10	10	10	5	25			
					Nilai Akhir	10.00	8.03	20.00	9.40	10.00	9.77	5.00	25.00			
					Nilai Aspek	90.15		98.35								
19	008	032	477456	LOKA KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN NASIONAL PEKANBARU	Nilai	100.00	80.63	100.00	91.00	100.00	99.79	100.00	100.00	97.14	100%	97.14
					Bobot	10	10	20	10	10	10	5	25			
					Nilai Akhir	10.00	8.06	20.00	9.10	10.00	9.98	5.00	25.00			
					Nilai Aspek	90.32		98.16								
20	039	032	245160	STASIUN PSDKP KUPANG	Nilai	100.00	93.59	93.38	91.00	100.00	100.00	100.00	100.00	97.14	100%	97.14
					Bobot	10	10	20	10	10	10	5	25			
					Nilai Akhir	10.00	9.36	18.68	9.10	10.00	10.00	5.00	25.00			
					Nilai Aspek	96.80		96.88								
21	014	032	567481	STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN PALEMBANG	Nilai	100.00	77.07	96.79	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	97.07	100%	97.07
					Bobot	10	10	20	10	10	10	5	25			
					Nilai Akhir	10.00	7.71	19.36	10.00	10.00	10.00	5.00	25.00			
					Nilai Aspek	88.54		99.36								
22	086	032	403837	POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN KARAWANG	Nilai	100.00	79.99	98.14	94.00	100.00	100.00	100.00	100.00	97.03	100%	97.03
					Bobot	10	10	20	10	10	10	5	25			
					Nilai Akhir	10.00	8.00	19.63	9.40	10.00	10.00	5.00	25.00			
					Nilai Aspek	90.00		98.43								
23	049	032	567631	BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN MANADO	Nilai	100.00	82.01	98.49	91.00	100.00	99.92	100.00	100.00	96.99	100%	96.99
					Bobot	10	10	20	10	10	10	5	25			
					Nilai Akhir	10.00	8.20	19.70	9.10	10.00	9.99	5.00	25.00			
					Nilai Aspek	91.01		97.88								

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
SEKRETARIAT JENDERAL

NOTA DINAS

Nomor 84/SJ.2/RC.610/I/2024

Yth. : 1. Sekretaris Inspektorat Jenderal
2. Sekretaris Ditjen Perikanan Tangkap
3. Sekretaris Ditjen Perikanan Budi Daya
4. Sekretaris Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
5. Sekretaris Ditjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan
6. Sekretaris Ditjen Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut
7. Sekretaris Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan
8. Sekretaris Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan

Dari : Kepala Biro Keuangan

Hal : Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Nilai Kinerja Anggaran (NKA) Lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Triwulan IV Tahun 2023

Tanggal : 10 Januari 2024

Menindaklanjuti memorandum Kepala Biro Perencanaan Nomor.2/SJ.1/ RC.610/ 2024 tentang Penyampaian Data Capaian Indikator Kinerja (IK) Manajerial Triwulan IV tahun 2023 disampaikan paling lambat tanggal 10 Januari 2024, dengan ini kami sampaikan capaian IK Nilai Kinerja Anggaran (NKA) lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) tahun 2023 sebagai berikut:

1. Proses mengunduh (*download*) data capaian IK NKA triwulan IV tahun 2023 berdasarkan data SMART DJA per tanggal 10 Januari 2024 sesuai dengan Nota Dinas Kepala Biro Keuangan Nomor 54/SJ.2/TU.210/1/2024 tanggal 4 Januari 2024.
2. Capaian nilai IK NKA KKP triwulan IV tahun 2023 sebesar 95.04, seluruh Unit Eselon I **telah mencapai target** yang telah ditetapkan sebesar 86,00 dan terdapat Satuan Kerja (Satker) **tidak mencapai target** sebesar 82,00 (terlampir).

3. Berikut kami sampaikan data capaian IK NKA level 0 (KKP), level 1 (Unit Eselon I) dan level 2 (Satker). Data tersebut dapat digunakan sebagai penetapan capaian nilai IK NKA pada triwulan IV tahun 2023 pada Unit Eselon I dan Satker lingkup KKP (terlampir).

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya, kami mengucapkan terima kasih.



**Ditandatangani
Secara Elektronik**

Setyawati

Tembusan:

1. Sekretaris Jenderal
2. Kepala Biro Perencanaan

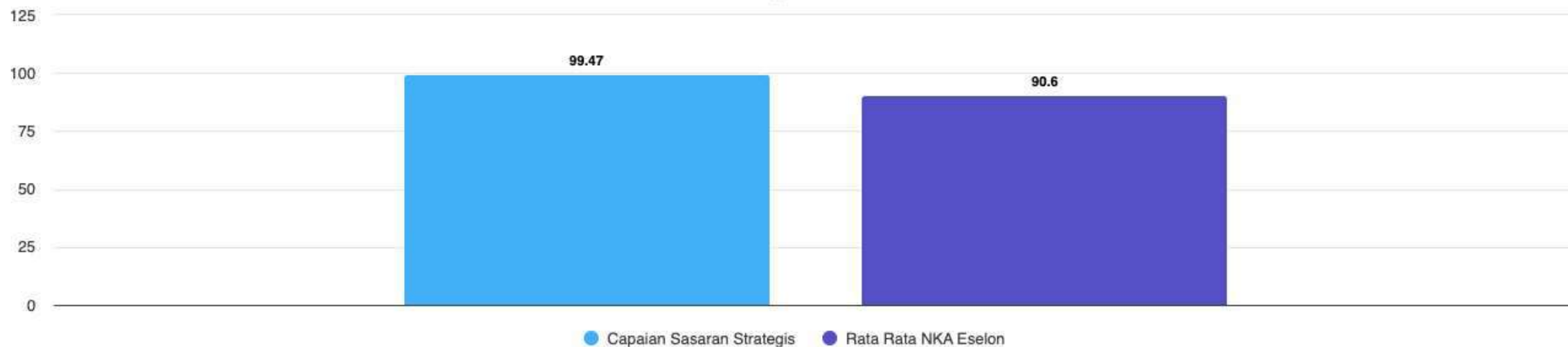
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

Dashboard

Nilai Kinerja

95.04

Sangat Baik



Pagu dan Realisasi Anggaran

Tahun Anggaran 2011 s.d. 2023





Ditjen Pengelolaan Ruang Laut

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

Nilai Kinerja

90.63

Sangat Baik



Pagu dan Realisasi Anggaran

Tahun Anggaran 2011 s.d. 2023





NKA Satuan Kerja

Monitoring / NKA Satker

[Download Excel](#)Tampilkan All entriCari:

No.	Kode Satuan Kerja	Satuan Kerja	Kinerja	Penyerapan	Konsistensi	CRO	Efisiensi	Nilai Efisiensi
44	477456	LOKA KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN NASIONAL PEKANBARU	88,46	96,38	99,09	100,00	4,58	61,45
45	499346	BALAI PENGELOLAAN SUMBERDAYA PESISIR DAN LAUT (BPSPL) PADANG	90,24	97,33	99,67	100,00	6,80	66,99
46	499352	BALAI KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN NASIONAL (BKKPN) KUPANG	94,48	95,90	96,73	100,00	13,67	84,18
47	603201	DINAS KETAHANAN PANGAN, KELAUTAN DAN PERTANIAN PROVINSI DKI JAKARTA	85,75	98,81	96,19	100,00	1,19	52,99
48	622145	SEKRETARIAT DITJEN PENGELOLAAN RUANG LAUT	87,20	96,45	84,94	100,00	6,41	66,03

Menampilkan 1 sampai 48 dari 48 entri

[Sebelumnya](#)[1](#)[Selanjutnya](#)

**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL
PENGELOLAAN KELAUTAN DAN RUANG LAUT**

MEMORANDUM

Nomor: 02/DJPKRL.1.4/TU.210/I/2024

Yth : Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut
Dari : Ketua Tim Kerja Hubungan Masyarakat dan Pelayanan
Hal : Capaian Indikator Kinerja Program Unit Kerja Berpredikat Menuju WBK
Tanggal : 04 Januari 2024

Berkenaan dengan pencapaian target kinerja Sasaran Program Tata Kelola Pemerintahan yang baik Lingkup DJPRL dengan Indikator Kinerja Program Unit Kerja Berpredikat Menuju WBK, kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Target indikator kinerja program Unit Kerja Berpredikat Menuju WBK pada Tahun 2023 adalah 8 dan pada triwulan IV tahun 2023 target dimaksud telah tercapai 8 (delapan) unit kerja;
2. Capaian indikator kinerja program Unit Kerja Berpredikat Menuju WBK diperoleh melalui unit kerja yang memenuhi standar penilaian sebagai Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi dengan nilai total (pengungkit dan hasil) minimal 75;
3. Data dukung capaian Indikator kinerja program Unit Kerja Berpredikat Menuju WBK dapat dilihat pada bit.ly/SAKIPDJPRL.

Atas perhatian Bapak diucapkan terima kasih dan mohon arahan lebih lanjut.



Fivien Ocktaviani

Tembusan:
Dirjen PKRL

Lampiran
 Nomor : 02/DJPKRL.1.4/TU.140/I/2023
 Tanggal : 04 Januari 2024

**CAPAIAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM
 UNIT KERJA BERPREDIKAT MENUJU WBK**

NO	UNIT KERJA	PREDIKAT WBK	NILAI	KETERANGAN
1	BPSPL PADANG	TPI KKP	93,31	BPSPL Padang diusulkan Predikat Menuju WBK TPN KemenPANRB Tahun 2023
2	BKKPN KUPANG	TPI KKP dan TPN	93,03	BKKPN Kupang pada Tahun 2022 berhasil memperoleh Predikat Menuju WBK dari TPN KemenPANRB
3	LKKPN PEKANBARU	TPI KKP dan TPN	92,49	LKKPN Pekanbaru pada Tahun 2022 berhasil memperoleh Predikat Menuju WBK dari TPN KemenPANRB
4	BPSPL PONTIANAK	TPI KKP dan TPN	90,81	BPSPL Pontianak pada Tahun 2022 berhasil memperoleh Predikat Menuju WBK dari TPN KemenPANRB
5	BPSPL DENPASAR	TPI KKP	87,57	Pemantauan Penilaian dilakukan oleh TPI KKP pada tahun 2022
6	BPSPL MAKASSAR	TPI KKP	87,41	Pemantauan Penilaian dilakukan oleh TPI KKP pada tahun 2022
7	LPSPL SERANG	TPI KKP	85,68	LPSPL Serang diusulkan Predikat Menuju WBK TPN KemenPANRB Tahun 2023
8	LPSPL SORONG	TPI KKP	81,64	LPSPL Sorong pada Tahun 2021 berhasil memperoleh Predikat Menuju WBK dari TPI

*penilaian berlaku 2 tahun



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL
PENGELOLAAN KELAUTAN DAN RUANG LAUT

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NO. 16
JAKARTA 10110, KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3513300 (LACAK) EXT. 6201 FAKSIMILE (021) 3520357 LAMAN
www.kkp.go.id SUREL sespridirjenprl@kkp.go.id

Nomor : B.272/DJPKRL.1/KP.720/I/2024
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (satu) lembar
Hal : Capaian Indikator Kinerja Utama Indeks Profesional
Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Semester II Tahun 2023
lingkup Direktorat Jenderal PKRL

12 Januari 2024

Yth.

1. Direktur lingkup Ditjen PKRL
 2. Kepala UPT lingkup Ditjen PKRL
- di Tempat

Menindaklanjuti hasil pengukuran Indikator Kinerja Utama Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Tahun 2023 di triwulan IV atau capaian Semester II Tahun 2023 lingkup Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut, bersama ini disampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Target pengukuran IKU IP ASN Tahun 2023 adalah sebesar 85 (Kategori Tinggi);
2. Capaian IKU Indeks Profesionalitas ASN lingkup Direktorat Jenderal PKRL Semester II Tahun 2023, berdasarkan hasil pengukuran *Kualifikasi, Kompetensi, Kinerja dan Disiplin* pada Dashboard IP ASN KKP yang berbasis data Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian KKP tanggal 9 Januari 2024 yaitu **89,95 (kategori tinggi)** terdiri dari **Kualifikasi 21,26, Kompetensi 38,56, Kinerja 25,13, dan Disiplin 5** (tabel terlampir);
3. Berdasarkan data capaian IKU IP ASN diatas, maka target capaian IP ASN Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut pada tahun 2023 telah tercapai, dan diharapkan pada tahun 2024, setiap unit kerja mendorong para pegawainya untuk melakukan peningkatan kualifikasi, kinerja dan kompetensi terutama komponen **Diklat 20 JP (jam pelatihan)** dengan metode e-learning baik yang diselenggarakan oleh internal KKP maupun diluar instansi yang sifatnya menunjang tugas fungsi pegawai.

Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

a.n. Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan dan
Ruang Laut
Sekretaris Direktorat Jenderal,



Ditandatangani
Secara Elektronik

Kusdiantoro

Tembusan:
Dirjen PKRL

Lampiran Surat Dinas
 Nomor : B.272/DJPKRL.1/KP.720/I/2024
 Tanggal : 12 Januari 2024

**Tabel Capaian Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Lingkup
 Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut
 Semester II Tahun 2023**

No.	Unit Kerja	Komponen IP ASN				Total
		Kualifikasi	Kompetensi	Kinerja	Disiplin	
1.	Sekretariat Ditjen PRL	21,71	37,54	24,7	5	88,95
2.	Direktorat Perencanaan Ruang Laut	22,03	33,69	26	5	86,72
3.	Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	22,1	36,15	25,41	5	88,66
4.	Direktorat Jasa Kelautan	21,77	37,31	25,9	5	89,99
5.	Direktorat Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut	21,88	39,03	25	5	90,91
6.	Balai Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut Padang	20,72	40	25,1	5	90,82
7.	Balai Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut Pontianak	20,84	40	25	5	90,84
8.	Balai Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut Makassar	21,09	39,8	25	5	90,89
9.	Balai Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut Denpasar	20,83	39,59	25	5	90,43
10.	Loka Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut Sorong	20,67	38,5	25	5	89,17
11.	Balai Kawasan Konservasi Perairan Nasional Kupang	20,75	40	25,78	5	91,53
12.	Loka Kawasan Konservasi Perairan Nasional Pekanbaru	21,13	39,62	24,36	5	90,1
13.	Loka Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut Serang	20,84	40	24,49	5	90,33
Nilai IP ASN Ditjen PKRL :		21,26	38,56	25,13	5	89.95

Keterangan :

1. Capaian nilai IP ASN Ditjen PRL diatas telah memenuhi target capaian akhir tahun 2023 yaitu sebesar 85 (Data diambil per tanggal 9 Januari 2024);
2. Dashboard Pengukuran IP ASN dapat dilihat pada <http://ropeg.kkp.go.id:4080/ip-asn/2023/eselon>.

a.n. Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut
 Sekretaris Direktorat Jenderal,



**Ditandatangani
 Secara Elektronik**

Kusdiantoro



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL
PENGELOLAAN KELAUTAN DAN RUANG LAUT**

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3520357
LAMAM www.kkp.go.id SUREL sespridirjenprl@kkp.go.id

Nomor	:	B. 7124/DJPKRL.1/RC.610/XII/2023	15 Desember 2023
Sifat	:	Biasa	
Lampiran	:	1 (Satu) Berkas	
Hal	:	Hasil Penilaian Mandiri Evaluasi AKIP Tahun 2023 Lingkup DJPKRL	

Yth. Daftar Terlampir

Berkenaan dengan pelaksanaan kegiatan Penilaian Mandiri Evaluasi AKIP Tahun 2023 di Lingkungan DJPKRL dan memperhatikan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Apresiasi dan terima kasih atas peran aktif Tim Saudara dalam pelaksanaan kegiatan dimaksud sehingga berkontribusi besar pada pencapaian Nilai SAKIP DJPKRL yang merupakan Terbaik 1 di Kementerian Kelautan dan Perikanan.
2. Tujuan Evaluasi AKIP adalah untuk mengetahui sejauh mana implementasi SAKIP dilaksanakan, serta untuk mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil, sehingga diharapkan dapat mendorong setiap unit kerja untuk berkomitmen dan secara konsisten mewujudkan capaian kinerja yang telah direncanakan melalui implementasi SAKIP.
3. Evaluasi dilakukan untuk keseluruhan komponen manajemen kinerja, yaitu:
 - a. Perencanaan Kinerja;
 - b. Pengukuran Kinerja;
 - c. Pelaporan Kinerja; dan
 - d. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal.

Komponen – komponen tersebut kemudian dituangkan dalam Lembar Kerja Evaluasi (LKE) sesuai dengan kriteria masing-masing komponen pada Sistem Aplikasi Pengelolaan Kinerja/SAPK (www.kinerjaku.kkp.go.id) menu Evaluasi – LKE.

4. Penilaian Mandiri Evaluasi AKIP Lingkungan DJPKRL telah dilaksanakan pada 12 – 15 Juni di Jakarta dan 20-23 Juni 2023 di Bali dengan melibatkan Inspektorat III dan Biro Perencanaan Sekretariat Jenderal KKP.
5. Hasil penilaian AKIP lingkup DJPKRL Tahun 2023 disajikan sebagaimana terlampir.
6. Hasil penilaian AKIP lingkup DJPKRL Tahun 2023 dipergunakan sebagai data capaian kinerja Nilai PM SAKIP unit kerja terkait.

7. Uraian hasil keseluruhan penilaian terhadap masing-masing komponen manajemen kinerja dituangkan dalam Berita Acara Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2023 yang dapat diunduh pada bit.ly/SAKIPDjPRL2023 (folder 2013 > folder 19. PM SAKIP).
8. Secara garis besar rekomendasi hasil evaluasi SAKIP adalah perlu dilakukannya validasi setiap indikator kinerja agar SMART (*Specific, Measurable, Attainable, Relevant, dan Time-bound*).
9. Keterangan lebih lanjut terkait hal tersebut diatas dapat menghubungi narahubung Sdri. Enny Syafrida Marpaung (HP: 081314 789106).

Atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

an. Direktur Jenderal PKRL
Sekretaris Direktorat Jenderal PRL



Ditandatangani
secara
Elektronik

Kusdiantoro

Tembusan:

1. Dirjen PKRL
2. Inspektur III, Itjen KKP
3. Kepala Biro Perencanaan, Setjen KKP

Lampiran 1. Surat
 Nomor : B. 7124/DJPKRL.1/RC.610/XII/2023
 Tanggal : 15 Desember 2023

Hasil Penilaian Mandiri AKIP lingkup DJPKRL Tahun 2023

No	Unit Kerja	Target	Komponen				Nilai AKIP	Predikat	Interpretasi
			Perencanaan Kinerja (30)	Pengukuran Kinerja (30)	Pelaporan Kinerja (15)	Evaluasi Kinerja (25)			
1.	DJPKRL	80.5	24.30	26.40	13.20	20.63	84.53	A	Memuaskan
2.	Sekretariat Ditjen PRL	75	25.20	27.00	12.60	22.50	87.3	A	Memuaskan
3.	Direktorat Perencanaan Ruang Laut	75	22.20	24.00	12.65	21.05	79.9	BB	Sangat Baik
4.	Direktorat Pelayaran Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	75	25.20	27.00	11.10	20.00	83.3	A	Memuaskan
5.	Direktorat Jasa Kelautan	75	25.20	27.00	12.60	20.05	84.85	A	Memuaskan
6.	Direktorat Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut	75	25.20	27.00	11.10	17.75	81.05	A	Memuaskan
7.	BKKPN Kupang	75	25.20	27.00	13.50	22.50	88.2	A	Memuaskan
8.	LKKPN Pekanbaru	75	25.20	27.00	11.95	20.00	84.15	A	Memuaskan
9.	LPSPL Serang	75	25.20	27.00	12.00	18.75	82.95	A	Memuaskan
10.	BPSPL Makassar	75	25.20	27.00	12.00	20.00	84.2	A	Memuaskan
11.	BPSPL Padang	75	25.20	27.00	13.45	22.55	88.2	A	Memuaskan
12.	BPSPL Pontianak	75	25.20	27.00	13.50	22.50	88.2	A	Memuaskan

No	Unit Kerja	Target	Komponen				Nilai AKIP	Predikat	Interpretasi
			Perencanaan Kinerja (30)	Pengukuran Kinerja (30)	Pelaporan Kinerja (15)	Evaluasi Kinerja (25)			
13.	LPSPL Sorong	75	25.20	27.00	12.00	18.50	82.7	A	Memuaskan
14.	BPSPL Denpasar	75	25.20	27.00	12.00	20.00	84.2	A	Memuaskan

an. Direktur Jenderal PKRL
Sekretaris Direktorat Jenderal PRL



Ditandatangani
secara
Elektronik

Kusdiantoro

Lampiran 2. Surat

Nomor : B. 7124/DJPKRL.1/RC.610/XII/2023

Tanggal : 15 Desember 2023

Surat disampaikan Kepada Yth.:

1. Direktur Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
2. Direktur Jasa Kelautan
3. Direktur Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut
4. Plt. Direktur Perencanaan Ruang Laut
5. Kepala Balai Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut Padang
6. Kepala Balai Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut Pontianak
7. Kepala Balai Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut Makassar
8. Kepala Balai Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut Denpasar
9. Kepala Balai Kawasan Konservasi Perairan Nasional Kupang
10. Kepala Loka Kawasan Konservasi Perairan Nasional Pekanbaru
11. Kepala Loka Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut Serang
12. Kepala Loka Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut Sorong
13. Ketua Tim Kerja Lingkup Sekretariat Ditjen PRL

an. Direktur Jenderal PKRL
Sekretaris Direktorat Jenderal PRL



Kusdiantoro

Ditandatangani
secara
Elektronik



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL
PENGELOLAAN KELAUTAN DAN RUANG LAUT
LOKA KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN NASIONAL
PEKANBARU

JALAN BUDI LUHUR KELURAHAN MENTANGOR PEKANBARU-RIAU 28286

TELEPON/FAKSIMILE (0761) 8404510

LAMAM www.kkp.go.id SUREL lkkn.peganbaru@kkp.go.id

Nomor : B.1681/LKKPN/TU.140/X/2023 9 September 2023
Sifat : Biasa
Lampiran : Satu Berkas
Hal : Penyampaian Laporan SPIP Bulan September 2023

Yth. Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut
di Jakarta

Menindaklanjuti Surat Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Nomor B.5260/DJPRL.1/TU.140/IX/2023 tanggal 02 Oktober 2023 perihal Pelaporan Penyelenggaraan SPIP Bulan September Tahun 2023, bersama ini dengan hormat kami sampaikan laporan SPIP bulan September 2023 dan Manajemen Risiko (MR) SPIP Loka Kawasan Konservasi Perairan Nasional Pekanbaru sebagaimana terlampir.

Demikian kami sampaikan. Atas perhatian Bapak kami ucapkan terima kasih.

Kepala Loka Kawasan Konservasi
Perairan Pekanbaru



**Ditandatangani
Secara
Elektronik**

Rahmat Irfansyah

Bagus Wak

Bersih, Amanah, Giat Untuk
Sumberdaya Kawasan Konservasi



**LAPORAN
SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
(SPIP)
SEPTEMBER 2023**

Loka Kawasan Konservasi Perairan Nasional Pekanbaru
Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut
Kementerian Kelautan dan Perikanan
2023

Kata Pengantar

Puji syukur kepada Tuhan yang Maha Esa kami panjatkan atas terselesaikannya Laporan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Loka Kawasan Konservasi Perairan Nasional Pekanbaru bulan September 2023 ini. Penyusunan laporan ini merupakan pelaksanaan amanat Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 16 tahun 2016 tentang penyelenggaraan sistem pengendalian Intern di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Laporan ini merupakan rangkuman rangkaian upaya pengendalian risiko yang dilakukan Loka Kawasan Konservasi Perairan Nasional (LKKPN) Pekanbaru bulan September tahun 2023 dalam melaksanakan program dan kegiatan. Pengendalian risiko dilaksanakan melalui tahapan, yaitu: (i) identifikasi penyebab; (ii) analisis risiko; (iii) penilaian risiko; (iv) penanganan risiko; dan (v) pemantauan penanganan risiko. serta rencana mitigasi dan penyelesaian yang diperlukan dalam rangka pengendalian risiko lingkup LKKPN Pekanbaru di bulan September tahun 2023, sehingga dapat menjadi masukan bagi semua pihak baik di internal LKKPN Pekanbaru, maupun di luar LKKPN Pekanbaru untuk perbaikan pelaksanaan pengendalian risiko dimasa yang akan datang.

Akhir kata kami mengucapkan terima kasih kepada semuanya pihak yang telah memberikan kontribusi dan terlibat dalam penyusunan

laporan ini. Berbagai masukan dan saran terbuka untuk perbaikan dimasa yang akan datang.

Pekanbaru, 9 Oktober 2023

Kepala LKKPN Pekanbaru,



Rahmat Infansyah



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL
PENGELOLAAN KELAUTAN DAN RUANG LAUT

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3520357
LAMAM www.kkp.go.id SUREL sespridirjenprl@kkp.go.id

Nomor : B. 59 /DJPKRL.1/TU.210/II/2024 04 Januari 2024
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (Satu) Berkas
Hal : Menyampaikan Capaian Presentase Satuan Kerja UPT Lingkup DJPKRL
yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar
Triwulan IV Tahun 2023

Yth. Daftar Terlampir

Berkenaan dengan pengukuran capaian kinerja Presentase Satuan Kerja UPT Lingkup DJPKRL yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar Triwulan IV Tahun 2023, disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Apresiasi dan terima kasih atas peran aktif Saudara dalam mendukung capaian Presentase Unit Kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan terstandar sampai dengan Triwulan IV Tahun 2023 melalui *posting* berbagi pengetahuan melalui <https://portal.kkp.go.id/> dengan target 3 poin dan nilai maksimal yang dapat diterima adalah 4 poin per triwulan.
2. Penghitungan poin tersebut berasal dari pilihan kategori dan pembobotan, yaitu:
 - a. Dokumentasi kegiatan **rapat/seminar/workshop/diseminasi** yang diunggah dan dilengkapi foto dan notulensi serta narasi memenuhi kriteria 5W1H (what, where, when, who, why, and how) mempunyai **bobot poin 0,5**. Dalam hal unggah kegiatan **Apel Pagi** tidak mendapatkan nilai;
 - b. Berbagi informasi berupa karya tulis, jurnal atau hasil penelitian sesuai tugas dan fungsi jabatan mempunyai **bobot poin 1**; dan/atau
 - c. Berbagi informasi berupa video atau *campaign* dengan tema Kelautan dan Perikanan sesuai tugas dan fungsi jabatan mempunyai **bobot poin 3**.

Target 3 poin per triwulan dapat berasal dari 1 kategori penilaian maupun kombinasi dari ketiga kategori tersebut dengan penghitungan sesuai rumus:

$$\text{Keaktifan} = \frac{\text{Jumlah poin pejabat yang aktif}}{\text{Jumlah target poin pejabat yang aktif}} \times 100\%$$

3. Hasil pengukuran capaian Nilai Manajemen Pengetahuan Terstandar Triwulan IV disajikan sebagaimana terlampir.

Atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

a.n. Direktur Jenderal PKRL
Sekretaris Ditjen PRL



Ditandatangani
Secara Elektronik

Kusdiantoro

Tembusan:
Dirjen PKRL

Lampiran 1 Surat

Nomor : B. 59 /DJPRL.1/TU.210/I/2024

Tanggal : 04 Januari 2024

DAFTAR TUJUAN SURAT

1. Kepala Balai Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut Makassar
2. Kepala Balai Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut Denpasar
3. Kepala Balai Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut Pontianak
4. Kepala Balai Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut Padang
5. Kepala Balai Kawasan Konservasi Perairan Nasional Kupang
6. Kepala Loka Kawasan Konservasi Perairan Nasional Pekanbaru
7. Kepala Loka Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut Serang
8. Kepala Loka Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut Sorong

a.n. Direktur Jenderal PKRL
Sekretaris Ditjen PRL



**Ditandatangani
Secara Elektronik**

Kusdiantoro

A. Capaian Presentase Satuan Kerja UPT Lingkup DJPKRL yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar Tahun 2023

No	Satker	Target PK	Capaian (%)				
			TW I	TW II	TW III	TW IV	Rata-Rata
1.	BPSPL Padang	92	100	100	133,3	133,3	116,65
2.	LKKPN Pekanbaru	92	100	100	133,3	133,3	116,65
3.	LPSPL Serang	92	100	100	133,3	133,3	116,65
4.	BPSPL Pontianak	92	100	100	133,3	133,3	116,65
5.	BPSPL Makassar	92	100	100	133,3	133,3	116,65
6.	BPSPL Denpasar	92	100	100	0	133,3	83,325
7.	BKKPN Kupang	92	100	100	133,3	133,3	116,65
8.	LPSPL Sorong	92	100	100	133,3	133,3	116,65

B. Daftar Nilai Rinci per Satuan Kerja UPT Lingkup DJPKRL yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar Triwulan IV Tahun 2023

1. BPSPL Padang

BPSPL Padang		Keaktifan
Target		3
Realisasi		4
Skor		133,3%
Nilai MP		133,3%
Nilai MP TW I		100,0%
Nilai MP TW II		100,0%
Nilai MP TW III		133,3%
Nilai MP TW IV		133,3%
Rata-Rata Nilai MP		116,7%

2. LKKPN Pekanbaru

LKKPN Pekanbaru		Keaktifan
Target		3
Realisasi		4
Skor		133,3%
Nilai MP		133,3%
Nilai MP TW I		100,0%
Nilai MP TW II		100,0%
Nilai MP TW III		133,3%
Nilai MP TW IV		133,3%
Rata-Rata Nilai MP		116,7%

3. LPSPL Serang

LPSPL Serang		Keaktifan
Target		3
Realisasi		4
Skor		133,3%
Nilai MP		133,3%
Nilai MP TW I	100,0%	
Nilai MP TW II	100,0%	
Nilai MP TW III	133,3%	
Nilai MP TW IV	133,3%	
Rata-Rata Nilai MP	116,7%	

4. BPSPL Pontianak

BPSPL Pontianak		Keaktifan
Target		3
Realisasi		4
Skor		133,3%
Nilai MP		133,3%
Nilai MP TW I	100,0%	
Nilai MP TW II	100,0%	
Nilai MP TW III	133,3%	
Rata-Rata Nilai MP	116,7%	

5. BPSPL Makassar

BPSPL Makassar		Keaktifan
Target		3
Realisasi		4
Skor		133,3%
Nilai MP		133,3%
Nilai MP TW I	100,0%	
Nilai MP TW II	100,0%	
Nilai MP TW III	133,3%	
Nilai MP TW IV	133,3%	
Rata-Rata Nilai MP	116,7%	

6. BPSPL Denpasar

BPSPL Denpasar	Dokumen	Keaktifan
Target		3
Realisasi		4
Skor		133,3%
Nilai MP		133,3%
Nilai MP TW I	100,0%	
Nilai MP TW II	100,0%	
Nilai MP TW III	0,0%	
Nilai MP TW IV	133,3%	
Rata-Rata Nilai MP	83,3%	

7. BKKPN Kupang

BKKPN Kupang		Keaktifan
Target		3
Realisasi		4
Skor		133,3%
Nilai MP		133,3%
Nilai MP TW I	100,0%	
Nilai MP TW II	100,0%	
Nilai MP TW III	133,3%	
Nilai MP TW IV	133,3%	
Rata-Rata Nilai MP	116,7%	

8. LPSPL Sorong

LPSPL Sorong		Keaktifan
Target		3
Realisasi		4
Skor		133,3%
Nilai MP		133,3%
Nilai MP TW I	100,0%	
Nilai MP TW II	100,0%	
Nilai MP TW III	133,3%	
Nilai MP TW IV	133,3%	
Rata-Rata Nilai MP	116,7%	

a.n. Direktur Jenderal PKRL
Sekretaris Ditjen PRL



**Ditandatangani
Secara Elektronik**

Kusdiantoro



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL
PENGELOLAAN KELAUTAN DAN RUANG LAUT

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110, KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3513300 (LACAK) EXT. 6201, FAKSIMILE (021) 3520357
LAMAM www.kkp.go.id SUREL sespridirjenprl@kkp.go.id

Nomor : B. 317/DJPKRL.1/HP.470/II/2024 15 Januari 2024
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Capaian IKU "Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup Ditjen PKRL" Triwulan IV Tahun 2023 lingkup Kantor Unit Pelaksana Teknis (UPT)

Yth. Para Kepala UPT Lingkup Ditjen PKRL

Sehubungan dengan Indikator Kinerja "Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup Ditjen PKRL" Tahun 2023, bersama ini disampaikan capaian IKU Lingkup Kantor UPT Direktorat Jenderal PKRL sebagai berikut:

1. Realisasi capaian IKU diperoleh dari hasil tindak lanjut atas Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Itjen KKP yang diterbitkan pada periode 1 Oktober 2022 s.d. 30 September 2023 Triwulan IV Tahun 2022 s.d. Triwulan III Tahun 2023) yang telah ditindaklanjuti secara tuntas oleh unit eselon I sampai dengan 31 Desember 2023 (Triwulan IV Tahun 2023).
2. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, capaian IKU persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang telah ditindaklanjuti (tuntas) pada periode pengukuran hingga Triwulan IV Tahun 2023 lingkup Kantor UPT Ditjen PKRL sebesar 100% yaitu sebanyak 236 rekomendasi telah berstatus tuntas dari 236 rekomendasi yang diterbitkan;
3. Rincian capaian IKU tindak lanjut hasil pengawasan Itjen dan sisa temuan yang belum tuntas sebagaimana terlampir;
4. Atas rekomendasi yang sudah tuntas, kami menyampaikan apresiasi kepada satker terkait dan untuk rekomendasi yang belum tuntas agar segera dituntaskan.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

a.n. Direktur Jenderal
Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut,
Sekretaris Direktorat Jenderal,



Kusdiantoro

Ditandatangani
Secara Elektronik

Lampiran 1 Surat
Nomor : B.317/DJPKRL.1/HP.470/I/2024
Tanggal : 15 Januari 2024

Data Rekapitulasi Capaian IKU
“Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan
Kinerja Lingkup Kantor UPT Ditjen PKRL” Triwulan IV Tahun 2023

No	Satker	Rekomendasi (Jumlah)	Tindak Lanjut		Sisa Rekomendasi		% Capaian IKU
			Jumlah	(%)	Jumlah	(%)	
1	BKKPN Kupang	23	23	100	0	0	100
2	BPSPL Makasar	50	50	100	0	0	100
3	BPSPL Padang	30	30	100	0	0	100
4	LPSPL Sorong	23	23	100	0	0	100
5	LPSPL Serang	36	36	100	0	0	100
6	LKKPN Pekanbaru	19	19	100	0	0	100
7	BPSPL Denpasar	32	32	100	0	0	100
8	BPSPL Pontianak	23	23	100	0	0	100
		236	236	100	0	0	100

a.n. Direktur Jenderal
Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut,
Sekretaris Direktorat Jenderal,



**Ditandatangani
Secara Elektronik**

Kusdiantoro



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL
PENGELOLAAN KELAUTAN DAN RUANG LAUT

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110, KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3513300 (LACAK) EXT. 6201, FAKSIMILE (021) 3520357
LAMAM www.kkp.go.id SUREL sespridirjenprl@kkp.go.id

Nomor : B. 592/DJPKRL.1/HP.520/II/2024 24 Januari 2024
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Penyampaian Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI atas
LK KKP Tahun 2022 lingkup UPT Ditjen PKRL

Yth. Para Kepala UPT Lingkup Ditjen PKRL
Di tempat

Bersama ini disampaikan kepada Saudara hasil tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan (LK) KKP Tahun 2022 pada Kantor UPT lingkup Ditjen PKRL sebagai salah satu indikator kinerja berdasarkan hasil rekapitulasi temuan pemeriksaan BPK RI, terdapat temuan kerugian negara sebesar sebesar Rp54.363.452,00 yang telah tuntas ditindaklanjuti atau 100% sebagaimana rincian terlampir.

Atas perhatian dan kerja samanya, diucapkan terima kasih.

a.n. Direktur Jenderal
Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut
Sekretaris Direktorat Jenderal,



Ditandatangani
Secara Elektronik

Kusdiantoro

Tembusan:
Dirjen PKRL

Lampiran I Surat
Nomor : B. 592/DJPKRL.1/HP.520/I/2024
Tanggal : 24 Januari 2024

Data Rekapitulasi Capaian IKU
Penyelesaian Temuan LHP BPK RI atas LK KKP TA.2022
Lingkup Kantor UPT Direktorat Jenderal PKRL

NO	SATKER	SALDO TEMUAN (Rp)	TINDAK LANJUT (Rp)	(%)	SISA TEMUAN (Rp)	(%)
1	BPSPL Padang	0	0	0	0	0
2	LKKPN Pekanbaru	0	0	0	0	0
3	LPSPL Serang	54.363.452	54.363.452	100	0	0
4	BPSPL Makassar	0	0	0	0	0
5	BPSPL Pontianak	0	0	0	0	0
6	BKKPN Kupang	0	0	0	0	0
7	LPSPL Sorong	0	0	0	0	0
8	BPSPL Denpasar	0	0	0	0	0
	JUMLAH	54.363.452	54.363.452	100	0	0

a.n. Direktur Jenderal
Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut
Sekretaris Direktorat Jenderal,



**Ditandatangani
Secara Elektronik**

Kusdiantoro

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN KELAUTAN DAN
RUANG LAUT

MEMORANDUM
NOMOR 3027 /DJPKRL.1/HP.410/XII/2023

Yth : 1. Direktur Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut
2. Direktur Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
3. Direktur Jasa Kelautan
4. UPT di Lingkup DJPKRL

Dari : Plh. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut

Hal : Hasil Evaluasi Efektivitas Pelaksanaan Bantuan Pemerintah Tahun 2022

Lampiran : 1 (satu) Berkas

Tanggal : 19 Desember 2023

Menindaklanjuti Rapat Pembahasan Hasil Evaluasi Efektivitas Pelaksanaan Bantuan Pemerintah Tahun 2022 yang diselenggarakan pada hari Jumat, 1 Desember 2023 di Hotel Yuan Garden Pasar Baru, berikut disampaikan:

1. Rapat bertujuan untuk menyepakati hasil Evaluasi Efektivitas Pelaksanaan Bantuan Pemerintah Tahun 2022 yang telah dilaksanakan oleh tim Setditjen PRL; Direktorat Jasa Kelautan, Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil; serta UPT di lingkup DJPKRL. Evaluasi telah dilakukan di 7 lokasi untuk 7 jenis bantuan yang menjadi *sampling* yakni bantuan konservasi, sarana / prasarana pengelolaan sampah, dermaga apung, sarana / prasarana produk turunan mangrove, wisata bahari, rumah garam dan *washing plant*.
2. Adapun aspek yang dievaluasi adalah:
 - a. Pencapaian Tujuan (PT) yang diukur berdasarkan kesesuaian tujuan pelaksanaan kegiatan, dengan bobot 80%;
 - b. Integrasi (IG) yang diukur berdasarkan pemahaman penerima atas hak dan kewajiban, dengan bobot 10%; dan
 - c. Adaptasi (AT) yang diukur berdasarkan kemampuan penerima mengembangkan bantuan, dengan bobot 10%.
3. Berdasarkan Hasil Evaluasi Efektivitas Pelaksanaan Bantuan Pemerintah (Lampiran 1) diperoleh nilai unit Eselon II sebesar 84 s.d. 100 dari target sebesar 77,5. Nilai tersebut dapat digunakan sebagai capaian kinerja Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan Prioritas pada Level 2 (Direktorat dan UPT di Lingkup DJPKRL).
4. Beberapa rekomendasi terhadap pemanfaatan bantuan pemerintah yang telah dievaluasi, sebagai berikut:
 - a. Pada tahapan perencanaan pemberian bantuan pemerintah, pemberi perlu mempertimbangkan kebutuhan lokasi/kelompok penerima bantuan yang akan diberikan serta kesiapan penerima bantuan dalam memanfaatkan bantuan khususnya kesiapan dalam hal pembiayaan pemeliharaan bantuan.

- b. Pada tahapan pelaksanaan pemberian bantuan maupun setelahnya, diharapkan pemberi bantuan dapat meningkatkan kapasitas penerima bantuan untuk pemanfaatan bantuan agar bantuan dimanfaatkan dengan lebih baik dan berkelanjutan.
 - c. Pemberi bantuan agar tetap melakukan pendampingan untuk keberlanjutan kegiatan dan pemanfaatan bantuan.
5. Sehubungan dengan hal tersebut, mohon dukungan Saudara menindaklanjutinya pada proses pemberian dan evaluasi pemanfaatan bantuan pemerintah ke depan.

Atas perhatian dan kerja samanya, diucapkan terima kasih.



Yudha Rajabudin

Tembusan:

- 1. Dirjen PKRL
- 2. Sesditjen PRL

Lampiran 1. Memorandum
 Nomor : 3027/DJPKRL.1/HP.410/XII/2023
 Tanggal : 19 Desember 2023

**Hasil Penilaian Efektivitas Pemanfaatan Bantuan Pemerintah di Lingkup DJPRL
 Tahun 2022**

Unit Kerja	Bantuan Pemerintah	Kab/Kota	PT	IG	AT	TOTAL*
BPSPL Padang	Bantuan Konservasi	Aceh Barat Daya	80	10	10	100
	Bantuan Konservasi	Pasaman Barat	80	10	10	100
	Bantuan Konservasi	Kota Sabang	80	10	10	100
	Nilai Rata-Rata		80	10	10	100
BPSPL Pontianak	Bantuan Konservasi	Bulungan	80	10	10	100
BKKPN Kupang	Bantuan Konservasi	Biak Numfor	80	10	10	100
	Bantuan Konservasi	Raja Ampat	80	10	10	100
	Bantuan Konservasi	Manggarai Barat	80	10	10	100
	Nilai Rata-Rata		80	10	10	100
LPSPL Sorong	Bantuan Konservasi	Halmahera Barat	80	10	10	100
	Bantuan Konservasi	Seram Bagian Barat	80	10	10	100
	Nilai Rata-Rata		80	10	10	100
LKKPN Pekanbaru	Bantuan Konservasi	Kepulauan Anambas	80	10	10	100
	Bantuan Konservasi	Kota Padang	65	10	10	85
	Nilai Rata-Rata		72,5	10	10	92,5
LPSPL Serang	Bantuan Konservasi	Kepulauan Seribu	65	7,5	10	82,5
	Bantuan Konservasi	Bengkulu	75	8	10	93
	Bantuan Konservasi	Pandeglang	65	7,5	10	82,5
	Nilai Rata-Rata		68,33	7,67	10	86
BPSPL Denpasar	Bantuan Konservasi	Karangasem	65	10	10	85
	Bantuan Konservasi	Klungkung	75	10	10	95
	Bantuan Konservasi	Flores Timur	80	10	10	100
	Nilai Rata-Rata		73	10	10	93,33
BPSPL Makassar	Bantuan Konservasi	Bulukumba	80	10	10	100
	Bantuan Konservasi	Minahasa Utara	80	10	10	100
	Nilai Rata-Rata		80	10	10	100
Dit. Jasa Kelautan	Wisata Bahari	Buleleng	80	10	10	100
	Rumah Garam	Karangasem	80	10	10	100
	Washing Plant	Tuban	80	10	10	100
	Gudang Garam Nasional (GGN)	Tuban	80	10	10	100
	Nilai Rata-Rata		80	10	10	100
Dit. P4K	TPS/PDU	Banyuwangi	80	10	10	100
	TPS/PDU	Buleleng	80	10	10	100
	Dermaga Apung	Sinjai	80	5	0	85

Unit Kerja	Bantuan Pemerintah	Kab/Kota	PT	IG	AT	TOTAL*
	Sarpras Produk Turunan Mangrove	Makassar	40	1	10	51
	Nilai Rata-Rata		70	6,5	7,5	84

Keterangan:

*Total adalah Nilai Efektivitas yang dihitung berdasarkan jumlah PT, IG dan AT

PT = Pencapaian tujuan

IG = Integrasi

AT = Adaptasi

Kategori Predikat Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Bantuan Pemerintah

Predikat & Nilai	Interpretasi
AA : > 90 - 100	Memuaskan Tujuan kegiatan prioritas/bantuan pemerintah tercapai dan patut menjadi percontohan
A : > 80 - 90	Efektif Tujuan kegiatan prioritas/bantuan pemerintah tercapai dan perlu dilakukan pemantauan untuk mendorong pengembangan pemanfaatan
B : > 60 - 80	Cukup Efektif Sebagian besar tujuan kegiatan prioritas/ bantuan pemerintah tercapai namun perlu upaya untuk menjamin pemanfaatan berkelanjutan
C : > 40 - 60	Kurang Efektif Kegiatan prioritas/bantuan pemerintah hanya mencapai sebagian kecil tujuan dan pemanfaatan berpotensi tidak berkelanjutan
D : 0 - 40	Tidak Efektif Kegiatan prioritas/bantuan pemerintah tidak mencapai seluruh tujuan serta tidak bermanfaat bagi penerima, perlu dipertimbangkan untuk tidak melanjutkan kegiatan prioritas/bantuan pemerintah tersebut

Yudha Rajabudin